

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2005 – 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANDUNG



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung disusun sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang maju dan sejahtera;
 - c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagai mana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005-2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan Pembangunan.
6. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat Kabupaten Bandung.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJP Daerah memuat visi, misi, arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja SKPD yang bersifat indikatif.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Bandung.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

14. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
15. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan Daerah Kabupaten Bandung periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJP Daerah Kabupaten Bandung tahun 2005-2025.
- (2) Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 tahun ke depan, yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan pembangunan.

Pasal 4

RPJP Daerah Kabupaten Bandung mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5

Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Gambaran Umum Kabupaten Bandung |
| BAB III | : Analisis Isu Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung |
| BAB IV | : Perumusan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 |
| BAB V | : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2025 |
| BAB VI | : Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung |

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJP Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian penting dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati.

- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

RPJP Daerah Kabupaten Bandung adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Bandung dan strategi untuk mencapainya. RPJP Daerah Kabupaten Bandung disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, RPJP 2005 – 2025 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025. Namun, periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan kepala daerah (Presiden dan Bupati) tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 terdiri dari 4 Bab dan 8 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

RPJP Daerah Kabupaten Bandung mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup platform pembangunan nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Bandung terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Bappeda Kabupaten Bandung mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bandung, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode berikutnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I- 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I- 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I- 6
1.4 Sistematika Penulisan	I- 7
1.5 Maksud dan Tujuan	I- 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II- 1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi Kabupaten Bandung	II- 1
2.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bandung	II- 2
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung	II- 3
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bandung	II- 8
2.1.4 Kondisi Umum Demografi Kabupaten Bandung	II-10
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-12
2.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-14
2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial	II-23
2.2.3 Seni Budaya dan Olah Raga	II-28
2.3 Aspek Pelayanan Publik	II-29
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II-29
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-85
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-107
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-107
2.4.2 Produktivitas Total Daerah	II-108
2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-110
2.4.4 Iklim Berinvestasi	II-112
2.4.5 Sumber Daya Manusia	II-118
BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS	III- 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	III- 1
3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.....	III- 1

3.1.2	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah terkait urusan Piilhan Pemerintah Kabupaten Bandung	III-16
3.2	Isu Strategis	III-19
3.2.1	Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat	III-19
3.2.2	Penelaahan RPJP Daerah Lain.....	III-21
3.2.3	Isu-isu Strategis Kabupaten Bandung	III-23
BAB IV PERUMUSAN VISI DAN MISI DAERAH		IV-1
4.1	Perumusan Visi.....	IV-1
4.2	Perumusan Misi	IV-4
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.....		V-1
5.1	Tujuan dan Sasaran Pokok	V-1
5.2	Tahapan dan Prioritas Pembangunan	V-13
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN		VI-1
LAMPIRAN		L-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Bandung.....	I- 3
Gambar I.2	Kedudukan RPJP Daerah Kabupaten Bandung Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I- 6
Gambar II.1	Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bandung.....	II- 9
Gambar II.2	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kab. Bandung Tahun 2010...	II- 12
Gambar II.3	Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur Kab. Bandung Tahun 2010.....	II- 12
Gambar II.4	PDRB Per Kapita Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 19
Gambar II.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 20
Gambar II.6	Tingkat Inflasi PDRB Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 21
Gambar II.7	Angka Melek Huruf Kab. Bandung Tahun 2006 – 2009.....	II- 24
Gambar II.8	Rata-rata Lama Sekolah di Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 25
Gambar II.9	Angka Harapan Hidup di Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 25
Gambar II.10	TPAK Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 28
Gambar II.11	Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010....	II-31
Gambar II.12	Grafik Pertumbuhan Penduduk Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 60
Gambar II.13	Grafik Pertumbuhan Industri Kab. Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Pengembangan di Kabupaten Bandung.....	II- 1
Tabel 2.2	Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2010.....	II-3
Tabel 2.3	Penyebaran Komoditas Peternakan di Kabupaten Bandung.....	II- 5
Tabel 2.4	Potensi Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung.....	II- 6
Tabel 2.5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bandung.....	II- 10
Tabel 2.6	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Bandung Tahun 2006-2010 Atas Harga Konstan	II- 14
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Bandung Tahun 2006-2010 Atas Harga Berlaku.....	II- 16
Tabel 2.8	Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kab. Bandung Tahun 2006-2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan.....	II- 17
Tabel 2.9	Kondisi Perekonomian Kab. Bandung	II- 21
Tabel 2.10	Indikator Makro Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 22
Tabel 2.11	Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 - 2010.....	II- 24
Tabel 2.12	IPM di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 26
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 26
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 27
Tabel 2.15	Perkembangan Seni, Budaya, Olah Raga di Kab. Bandung Tahun 2006- 2010..	II- 29
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 30
Tabel 2.17	Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 32
Tabel 2.18	Jumlah Guru dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 33
Tabel 2.19	Rasio Guru Per Kelas Rata-rata Terhadap Jumlah Murid di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 34
Tabel 2.20	Kondisi Ruang Kelas Baik Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 35
Tabel 2.21	Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 36
Tabel 2.22	Jumlah Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 37
Tabel 2.23	Jumlah dan Rasio Rumah sakit Per Jumlah Penduduk di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 39

Tabel 2.24	Jumlah Posyandu dan Balita di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 40
Tabel 2.25	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 40
Tabel 2.26	Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kab. Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2006-2010.....	II- 42
Tabel 2.27	Rasio Jaringan Irigasi di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 43
Tabel 2.28	Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.	II- 45
Tabel 2.29	Jumlah Permukiman dan Rumah Layak Huni Kab. Bandung Tahun 2006-2010...	II- 46
Tabel 2.30	Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 47
Tabel 2.31	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 48
Tabel 2.32	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 49
Tabel 2.33	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 50
Tabel 2.34	Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 50
Tabel 2.35	Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 52
Tabel 2.36	Rasio Izin Trayek di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 53
Tabel 2.37	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 54
Tabel 2.38	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 55
Tabel 2.39	Persentase Volume Sampah Yang Tertangani Kab. Bandung Tahun 2006-2010..	II- 56
Tabel 2.40	Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 56
Tabel 2.41	Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 57
Tabel 2. 12	Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006-2010.....	II-58
Tabel 2.42	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 59
Tabel 2.43	Jumlah Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 60
Tabel 2.44	Rasio KDRT di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 60
Tabel 2.45	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 61
Tabel 2.46	Rasio Akseptor KB di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 61
Tabel 2.47	Rasio Tempat Ibadah di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 62
Tabel 2.48	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 63
Tabel 2.49	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kab. Bandung Menurut Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja Tahun 2006-2010.....	II- 65

Tabel 2.50	Jumlah Penduduk Kab. Bandung Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010.....	II- 66
Tabel 2.51	Persentase Koperasi Aktif di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 67
Tabel 2.52	Jumlah UKM non BPR/LKM di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 67
Tabel 2.53	Jumlah BPR/LKM di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 68
Tabel 2.54	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 69
Tabel 2.55	Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 69
Tabel 2.56	Sarana dan Penyelenggaraan Seni Budaya di Kab. Bandung Tahun 2006-2010....	II- 70
Tabel 2.57	Jumlah Organisasi Pemuda dan Olah Raga di Kab. Bandung Tahun 2006-2010...	II- 71
Tabel 2.58	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 72
Tabel 2.59	Rasio Jumlah Linmas di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 72
Tabel 2.60	Rasio Pos Siskamling di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 73
Tabel 2.61	Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 74
Tabel 2.62	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 75
Tabel 2.63	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 76
Tabel 2.64	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010.....	II- 76
Tabel 2.65	Regulasi Ketahanan Pangan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 77
Tabel 2.66	Kelompok Binaan LPM di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 78
Tabel 2.67	Kelompok Binaan PKK di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 79
Tabel 2.68	Jumlah LSM Aktif di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 80
Tabel 2.69	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 80
Tabel 2.70	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 81
Tabel 2.71	Pengelolaan Arsip Terpadu di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 82
Tabel 2.72	Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana (Teknologi) Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 83
Tabel 2.73	Jumlah Perpustakaan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 84
Tabel 2.74	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 84
Tabel 2.75	Jumlah Kendaraan Perpustakaan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 85
Tabel 2.76	Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 86
Tabel 2.77	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 89
Tabel 2.78	Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Sapi di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 90
Tabel 2.79	Rehabilitas Hutan dan Lahan Kritis di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 91
Tabel 2.80	Kerusakan Kawasan Hutan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 92
Tabel 2.81	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kab. Bandung Tahun 2006-2010...	II- 93
Tabel 2.82	Pertambangan Tanpa Izin di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 94

Tabel 2.83	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 95
Tabel 2.84	Jumlah Kunjungan Wisata di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 95
Tabel 2.85	Kontribusi Sektor Jasa-jasa Terhadap PDRB Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 96
Tabel 2.86	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 98
Tabel 2.87	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 99
Tabel 2.88	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 100
Tabel 2.89	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 101
Tabel 2.90	Pertumbuhan Industri di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 102
Tabel 2.91	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB di Kab. Bandung Tahun 2006-2010...	II-103
Tabel 2.92	Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Per Bulan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II- 104
Tabel 2.93	Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-105
Tabel 2.94	Jenis, Jumlah Bank Serta Cabangnya di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-107
Tabel 2.97	Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-111
Tabel 2.98	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel di Kab. Bandung Tahun 2006-2010...	II-111
Tabel 2.97	Angka Kriminalitas di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-111
Tabel 2.99	Lama Proses Perizinan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-112
Tabel 2.100	Jumlah Demonstrasi di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-113
Tabel 2.101	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung.....	II-113
Tabel 2.102	Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-115
Tabel 2.103	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kab. Bandung Tahun 2006-2010	II-117
Tabel 2.104	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-117
Tabel 2.105	Rasio Ketergantungan di Kab. Bandung Tahun 2006-2010.....	II-119
Tabel 3.1	Permasalahan Kabupaten Bandung Terkait Urusan Wajib Penentuan Pemerintah Daerah.....	III- 14
Tabel 3.2	Permasalahan Kab. Bandung Terkait Urusan Pilihan Penentuan Pemerintah Daerah.....	III- 19
Tabel 3.3	Identifikasi Isu-isu Strategis.....	III- 20
Tabel 3.4	Identifikasi RPJPD Daerah Lain (Kab. Garut dan Kota Bandung)	III- 21
Tabel 3.5	Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Kab.Bandung.....	III- 24
Tabel 4.1	Perumusan Visi	IV - 1
Tabel 4.2	Penyusunan Penjelasan Visi	IV - 1

Tabel 4.3	Keterkaitan Sasaran Visi RPJP Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Visi Kab. Bandung	IV - 3
Tabel 4.4	Perumusan Misi Kab. Bandung	IV - 6
Tabel 4.5	Sinkronisasi Misi Jangka Panjang daerah Kab. Bandung Dengan Misi Jangka Panjang Nasional dan Jawa Barat	IV - 8
Tabel 4.6	Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Bandung	IV - 9
Tabel 5.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kab. Bandung Tahun 2005 - 2025	V - 1
Tabel 5.2	Perumusan Sasaran Pokok dan Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Kab. Bandung Tahun 2005 - 2025	V - 4
Tabel 5.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Dalam RPJP Kab. Bandung Dengan RPJP Nasional dan Provinsi Jawa Barat.....	V - 14
Tabel 5.4	Tahapan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2025.....	V - 19

Lampiran

Tabel L.1	Proyeksi Indikator Kinerja Makro Daerah
Tabel L.2	Proyeksi Indikator Kinerja Perekonomian Daerah
Tabel L.3	Proyeksi Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB Atas Harga Konstan
Tabel L.4	Identifikasi Permasalahan Terkait Urusan Wajib Penentuan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bandung
Tabel L.5	Identifikasi Permasalahan Terkait Urusan Pilihan Penentuan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bandung



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan kewenangannya.

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, diantaranya: dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tahapan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diawali dengan persiapan penyusunan, rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta penetapan perda. Secara sistematis tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung hingga saat ini, berawal dari hasil rumusan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya seperti tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah maupun rencana strategis daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dalam indikator makro pembangunan seperti IPM, PDRB, LPE, yang mengalami peningkatan serta LPP dan Laju Inflasi yang cenderung mengalami penurunan.

Fakta menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan diiringi pula oleh meningkatnya jumlah penduduk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk kabupaten Bandung tahun 2001 mencapai 2.491.527 jiwa menjadi 3.215.548 jiwa pada tahun 2010 atau bertambah sebanyak 724.021 jiwa selama kurun waktu 10 tahun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 2,88%. Kondisi sebaliknya justru terjadi pada ketersediaan sumber daya alam yang semakin terbatas bahkan cenderung berkurang, seperti halnya ketersediaan lahan, alih fungsi lahan pertanian, perkebunan maupun hutan rakyat serta daya tampung lingkungan semakin menurun. Kondisi ini, berakibat pula pada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk memenuhi segala kebutuhan penduduk sehingga menimbulkan persaingan ekonomi yang berlebihan. Masih tingginya jumlah penduduk miskin, masih tingginya tingkat pengangguran, tingkat pendidikan yang belum memadai, belum meratanya pelayanan kesehatan serta keterbatasan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan permasalahan yang masih akan dihadapi di masa mendatang.

Secara geografis Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam kawasan metropolitan cekungan Bandung (MCB) yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Berbagai kegiatan dan fasilitas sosial ekonomi dan



pemerintahan tumbuh dan berkembang pesat di Metropolitan Cekungan Bandung. Perkembangan yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai berdampak pula pada kesemrawutan terutama di wilayah-wilayah perkotaan dan kualitas lingkungan, khususnya di Kabupaten Bandung. Selain itu, kejadian bencana yang kerap terjadi di wilayah kabupaten Bandung memerlukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan peran aktif semua pemangku kepentingan.

Mencermati perkembangan yang terjadi saat ini serta masih banyaknya permasalahan yang dihadapi kabupaten Bandung, diperlukan upaya-upaya terencana, strategis dan berkesinambungan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi jangka panjang dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. RPJPD ini selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan, yaitu periode 2005 – 2010; 2010 – 2015; 2015 – 2020; dan 2020 – 2025 serta menjadi arah bagi para calon kepala daerah dalam merumuskan visi misi 5 (lima) tahunan. RPJPD yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengikat seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bandung, baik itu pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat umum lainnya.

Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis, menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan di masa 20 tahun mendatang, sekaligus sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Selain itu, untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan lima tahunan maupun tahunan tidak ada landasan pijakannya.

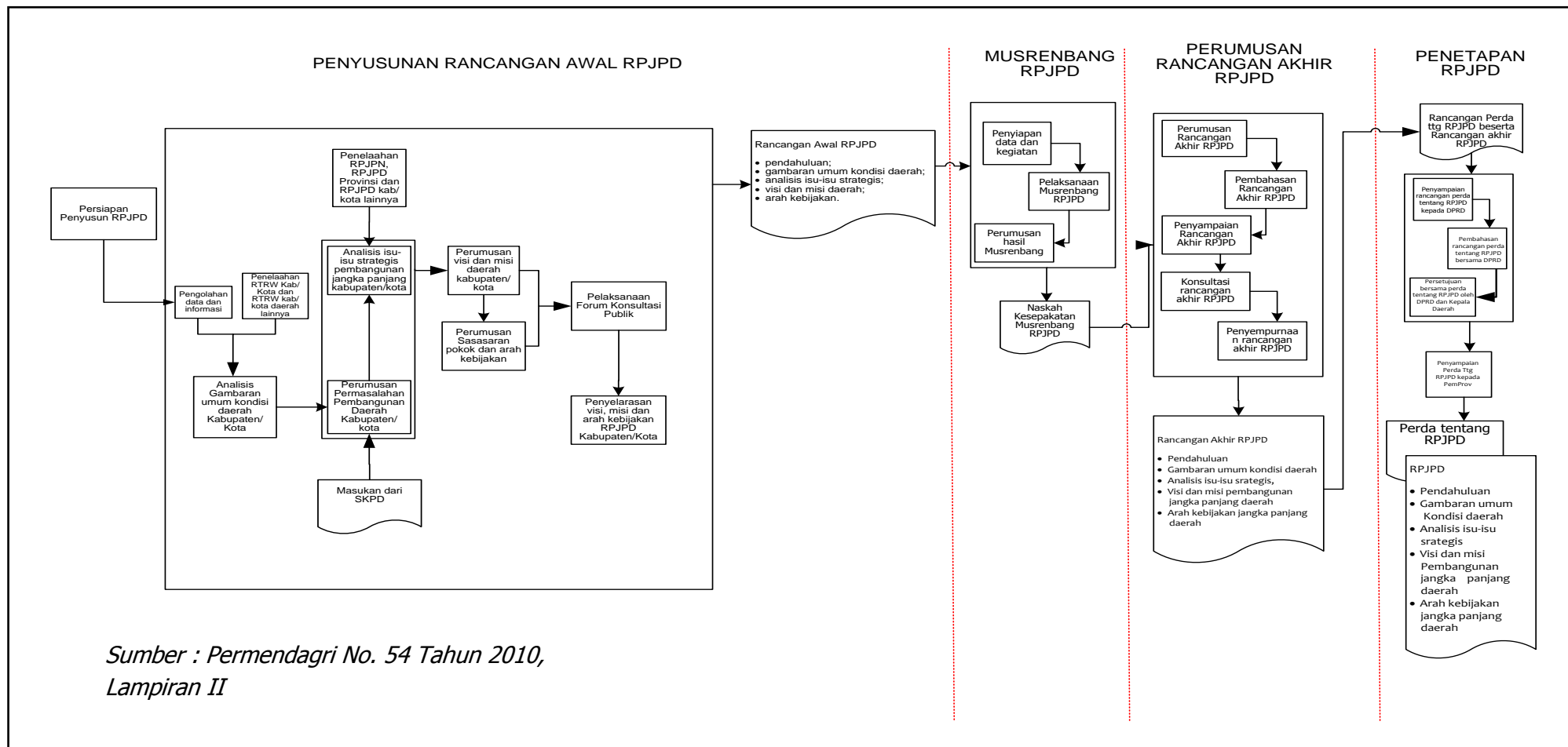
Substansi RPJPD Kabupaten Bandung memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dilaksanakan melalui beberapa misi dan dijabarkan melalui berbagai strategi serta arah kebijakan pembangunan. Perumusan dan penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*.

Pendekatan teknokratis menitikberatkan kepada metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, antara lain digunakan untuk: evaluasi kinerja pembangunan daerah periode yang lalu berdasar pengolahan data dan informasi, penelaahan dokumen RTRW, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan, penelaahan RPJPN, RPJMD Provinsi serta RPJPD kabupaten/kota perbatasan, analisis isu-isu strategis pembangunan, perumusan visi, misi, dan arah kebijakan, pelaksanaan forum konsultasi publik serta penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bandung. Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk partisipatif semua pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi dan arah kebijakan merupakan bentuk penjabaran dari pendekatan politik, yang diperkuat melalui penyelarasan dalam forum musrenbang RPJPD dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*.



Gambar I.1

Bagan Alir Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Bandung



Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010, Lampiran II



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagai mana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran II, tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaen Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);

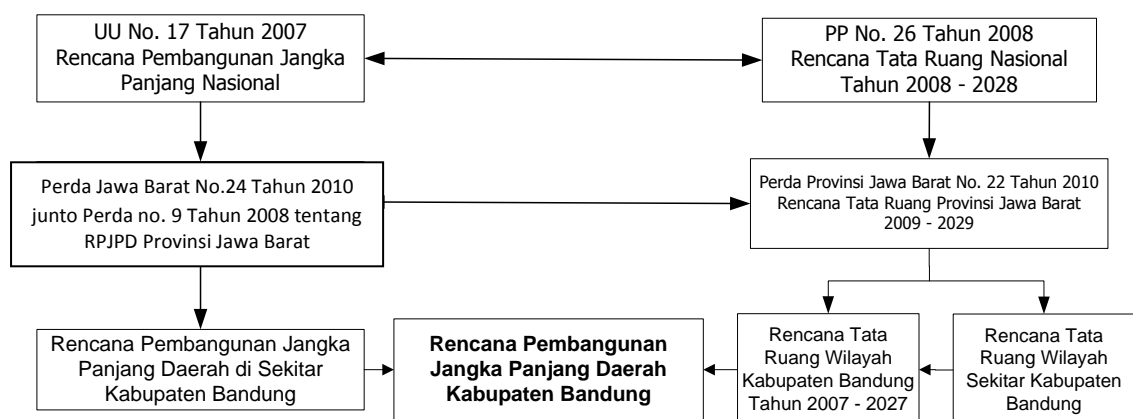


23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

RPJPD Kabupaten Bandung disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Bandung dengan dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Penyusunan RPJPD Kabupaten Bandung disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional 2005 – 2025, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kabupaten Bandung 2007-2027, RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Dalam hal ini, proses memperhatikan dilaksanakan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur serta pola ruang Kab/Kota yang terletak di sekitar Kabupaten Bandung (yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut).

Gambar I.2
Kedudukan RPJP Daerah Kabupaten Bandung
Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya





1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung disusun berdasarkan pada urutan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
- Bab II : Gambaran Umum Kabupaten Bandung yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting sampai dengan titik awal penyusunan RPJPD dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama kurun waktu 20 tahun ke depan.
- Bab III : Analisis isu-isu strategis yang berisi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
- Bab IV : Visi dan Misi Kabupaten Bandung, yang memuat perumusan visi dan misi Kabupaten Bandung untuk 20(dua puluh) tahun mendatang.
- Bab V : Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi setiap tahapan 5(lima) tahunan selama kurun waktu 20(dua puluh) tahun dan prioritas masing – masing tahapan.
- Bab IV : Kaidah pelaksanaan pada bagian ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi dan misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

RPJP Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bandung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJPD Kabupaten Bandung disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD).

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Bandung adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Bandung untuk 20 tahun mendatang dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung.
3. Mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional serta *Millenium Development Goals* (MDGs).



BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

2.1 Aspek Geografis dan Demografi Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung, yang beribukota di Kecamatan Soreang, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berada di dataran tinggi. Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April tahun 1641 M. Pada awalnya, Kabupaten Bandung terdiri atas 33 Kecamatan. Sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, pemekaran daerah marak terjadi di Indonesia, demikian juga di Kabupaten Bandung. Kota Cimahi memekarkan diri dari Kabupaten Bandung pada tahun 2001, yang kemudian disusul dengan pemekaran Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007. Dengan demikian, pada tahun 2010 terdapat 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, yang terbagi atas 8 Wilayah Pengembangan (WP).

Tabel 2.1
Wilayah Pengembangan di Kabupaten Bandung

No	Wilayah Pengembangan (WP)	Kecamatan
1.	WP Soreang	1. Kec. Soreang 2. Kec. Kutawaringin 3. Kec. Katapang 4. Kec. Rancabali 5. Kec. Pasirjambu 6. Kec. Ciwidey
2.	WP Baleendah	1. Kec. Baleendah 2. Kec. Dayeuhkolot 3. Kec. Bojongsoang
3.	WP Banjaran	1. Kec. Banjaran 2. Kec. Pengalengan 3. Kec. Cangkuang 4. Kec. Cimaung 5. Kec. Arjasari 6. Kec. Pameungpeuk
4.	WP Majalaya	1. Kec. Majalaya 2. Kec. Ciparay 3. Kec. Pacet 4. Kec. Kertasari 5. Kec. Paseh 6. Kec. Ibum 7. Kec. Solokan Jeruk
5.	WP Cicalengka	1. Kec. Cicalengka 2. Kec. Nagreg 3. Kec. Cikancung
6.	WP Cileunyi	1. Kec. Cileunyi 2. Kec. Rancaekek
7.	WP Cimenyan – Cilengkrang	1. Kec. Cimenyan 2. Kec. Cilengkrang



No	Wilayah Pengembangan (WP)	Kecamatan
8.	WP Margaasih-Margahayu	1. Kec. Margaasih 2. Kec. Margahayu

Sumber : Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung 2007 - 2027

2.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 176.238,67 ha, yang terdiri atas 31 Kecamatan, 267 Desa dan 9 Kelurahan. Kecamatan **Pasirjambu** merupakan wilayah dengan luas terbesar dan Kecamatan Margahayu merupakan wilayah dengan luas terkecil di Kabupaten Bandung.

Batas wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang

Sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut

Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur

Sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi

Secara geografis, Kabupaten Bandung terletak pada 6°49' – 7°18' Lintang Selatan dan 107°14' – 107°56' Bujur Timur. Letak geografis wilayah Kabupaten Bandung di bagian timur dan selatan cekungan Bandung yang merupakan tubir danau purba dengan tipe geologis berbentuk kandungan batuan vulkanis. Kabupaten Bandung merupakan hulu daerah aliran sungai Citarium, dengan beberapa anak sungainya, seperti sungai Citarik, Cikeruh, Cirasea, Cisangkuy, Ciwidey, dan Cimahi. Keberadaan sungai-sungai ini menguntungkan bagi masyarakat sebagai sumber air bersih, juga bagi sektor pertanian dan industri.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung adalah pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian 500 – 1.800 meter di atas permukaan laut, semakin terjal ke arah selatan. Dengan ketinggian tersebut, suhu udara di Kabupaten Bandung cukup sejuk yaitu 12 °Celcius – 21 ° Celcius. Pegunungan yang terdapat di Kabupaten Bandung adalah Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 meter, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 meter, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 meter.

Kelembaban udara di Kabupaten Bandung berkisar antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata tahunan bervariasi antara 1.500 mm – 4.000 mm. Daerah di sekitar Soreang-Katapang bercurah hujan 2000 mm pertahun; curah hujan rata-rata 3000 mm pertahun di daerah Cicalengka, Soreang hingga Majalaya; curah hujan rata-rata 3500 mm pertahun di daerah Ciwidey hingga Pangalengan; dan lebih dari 4000 mm per tahun di sekitar Gunung Patuha. Curah hujan rata-rata bulanan yang relatif paling basah (lebih dari 2000 mm) terjadi pada bulan November hingga April, sedangkan curah hujan rata-rata bulanan yang relatif kering (di bawah 2000 mm) terjadi pada bulan Mei hingga Oktober.



Tabel 2.2
Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bandung Tahun 2010

No	Pemanfaatan Ruang	Luas Area	Persentase
1.	Tegal/Kebun	20.901 Ha	11,859%
2.	Ladang/Huma	12.650 Ha	7,178%
3.	Perkebunan PBS/PTP	27.350 Ha	15,519%
4.	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	6.132 Ha	3,479%
5.	Tambak	- Ha	0%
6.	Kolam/Empang	980 Ha	0,556%
7.	Pengembalaan/Padang rumput	376 Ha	0,213%
8.	Sementara tidak diusahakan	8 Ha	0,005 %
9.	Pekarangan yang ditanami pertanian	6.381 Ha	3,621%
10.	Rumah/Bangunan/Halaman	18.090 Ha	10,264%
11.	Hutan negara	37.733 Ha	21,410%
12.	Rawa-rawa	- Ha	0%
13.	Lainnya/jalan/sungai/tandus	9.426 Ha	5,348%
14.	Sawah	36.212 Ha	20,547%
Jumlah		176.238,67 Ha	100%

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, 2010

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung

Perbedaan kondisi geografis antar wilayah di Kabupaten Bandung menyebabkan perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan oleh setiap kecamatan, yang berarti perbedaan komoditi unggulan pula. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung memiliki banyak komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing kecamatan, terutama dari sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.

Kabupaten Bandung memiliki komoditi yang menjadi unggulan, bukan hanya pada tingkat kabupaten, namun hingga tingkat provinsi dan nasional. Komoditi-komoditi tersebut dikategorikan sebagai komoditi khas Kabupaten Bandung. Komoditi tersebut disebut unggulan karena berdasarkan jenisnya, komoditinya tersebut hanya dihasilkan atau sebagian besar produksinya terpusat di Kabupaten Bandung. Selain itu, komoditi disebut unggulan karena cita rasa yang dimiliki berbeda dengan komoditi sejenis sama yang dihasilkan oleh daerah lain.

Komoditi-komoditi khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Bandung berasal dari sektor pertanian; yaitu stroberi, kopi, sapi perah dan produk turunannya. Sementara dari sektor industri, diantaranya industri peralatan pertanian dan industri kerajinan



wayang golek. Komoditi-komoditi tersebut menjadi unggulan baik pada tingkat propinsi hingga tingkat nasional, bahkan beberapa komoditi telah dapat bersaing di pasar internasional.

1. Pertanian

• Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama yang mempengaruhi pola hidup masyarakat di Kabupaten Bandung, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan besar potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu *core business* dan *leading sektor*, selain sektor industri pengolahan dan pariwisata. Sektor pertanian juga merupakan sektor andalan yang mendukung peningkatan ekonomi wilayah di Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung memiliki kondisi iklim, lahan dan sumberdaya hayati yang sangat mendukung pengembangan usaha aneka jenis komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Kawasan ini juga telah memiliki akses pasar yang cukup baik ke Kota Bandung dan JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) yang penduduknya berdaya beli cukup baik. Dengan kondisi yang demikian, Kabupaten Bandung sangat berpeluang untuk memposisikan diri sebagai pemasok utama produk agribisnis bagi wilayah Kota Bandung dan Jabodetabek.

Keragaman sosial ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung menjadi sasaran pasar lokal pengembangan komoditas hortikultura. Secara umum, Kabupaten Bandung sampai saat ini masih merupakan daerah sentra produksi sayuran terbesar di Jawa Barat. Dari 79.065 hektar luas lahan yang digunakan untuk mengembangkan tanaman sayuran di Jawa Barat pada tahun 2006, seluas 27.606 hektar di antaranya (35% dari total luas) berada di Kabupaten Bandung. Setelah pemekaran wilayah terjadi, maka budidaya hortikultura Kabupaten Bandung dipusatkan pengembangannya di kawasan Bandung Selatan dengan komoditas unggulan kentang, kubis, paprika, tomat, wortel, bawang merah dan cabe merah.

Kondisi budidaya hortikultura di Kawasan Bandung Selatan walaupun telah mempunyai tujuan pemasaran yang jelas, tetapi pengembangannya masih belum optimal. Kondisi ini terjadi karena penjualan komoditas hortikultura masih didominasi oleh produk segar. Produk olahan hortikultura belum banyak dikembangkan, sehingga nilai tambah produk hortikultura masih terbatas. Selain itu, produktivitas, kualitas dan diversifikasi produk hortikultura yang dihasilkan belum optimal, sehingga produk tersebut kurang memiliki daya saing untuk dipasarkan.

• Peternakan dan Perikanan

Komoditas unggulan pada sektor peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Bandung adalah sapi baik sapi perah maupun sapi potong dan produk turunannya, tetapi jenis komoditas peternakan lain juga berkembang di Kabupaten Bandung seperti domba, ayam ras pedaging dan itik. Hampir di seluruh kecamatan kecuali di kecamatan Margahayu, Margaasih dan Katapang merupakan daerah peternakan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3
Penyebaran Komoditas Peternakan di Kabupaten Bandung

N O	KECAMATAN	KOMODITAS UNGGULAN				
		Sapi Perah	Sapi Potong	Domba	Ayam Ras Pedaging	Itik
1	Cileunyi		X	X	X	X
2	Cimencyan		X	X	X	
3	Cilengkrang	X			X	
4	Bojongsong				X	X
5	Margahayu					
6	Margaasih					
7	Katapang					
8	Dayeuhkolot					X
9	Banjaran			X	X	
10	Pameungpeuk			X	X	
11	Pangalengan	X		X	X	
12	Arjasari	X		X	X	X
13	Cimaung		X	X	X	X
14	Cicalengka			X	X	X
15	Cikancung		X	X	X	X
16	Rancaekek			X	X	X
17	Ciparay			X	X	X
18	Pacet			X	X	X
19	Kertasari	X		X		
20	Baleendah			X	X	X
21	Majalaya			X	X	X
22	Paseh		X	X	X	X
23	Ibun			X	X	X
24	Soreang		X	X	X	X
25	Pasirjambu	X			X	X
26	Ciwidey	X			X	
27	Rancabali	X				
28	Cangkuang			X	X	



NO	KECAMATAN	KOMODITAS UNGGULAN				
		Sapi Perah	Sapi Potong	Domba	Ayam Ras Pedaging	Itik
29	Nagreg			X	X	X
30	Solokanjeruk			X	X	X
31	Kutawaringin		X	X	X	

*) Keterangan : X = Komoditas unggulan

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2010

Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bandung diarahkan di Kecamatan Ibum, Majalaya, Ciparay, Pacet dan Bojongsoang dan pemanfaatan/pengelolaan situ-situ di Kecamatan Pangalengan, Rancabali, serta kecamatan lainnya kecuali Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Margaasih dan Kertasari . Potensi perikanan di Kabupaten Bandung dijabarkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Potensi Unggulan Perikanan di Kabupaten Bandung

NO	KECAMATAN	KOMODITAS UNGGULAN		
		Kolam Air Tenang	Minapadi	Kolam Air Deras
1	Cileunyi	X	X	
2	Cimenyan			
3	Cilengkrang			
4	Bojongsoang	X	X	
5	Margahayu	X		
6	Margaasih			
7	Katapang	X	X	
8	Dayeuhkolot	X	X	
9	Banjaran		X	X
10	Pameungpeuk	X	X	
11	Pangalengan	X		
12	Arjasari	X	X	
13	Cimaung	X	X	X
14	Cicalengka	X		
15	Cikancung	X	X	
16	Rancaekek	X	X	
17	Ciparay	X	X	



NO	KECAMATAN	KOMODITAS UNGGULAN		
		Kolam Air Tenang	Minapadi	Kolam Air Deras
18	Pacet	X	X	X
19	Kertasari			
20	Baleendah	X	X	
21	Majalaya	X	X	X
22	Paseh	X	X	
23	Ibun	X	X	X
24	Soreang	X	X	X
25	Pasirjambu		X	
26	Ciwidey	X	X	
27	Rancabali	X		
28	Cangkuang	X	X	X
29	Nagreg	X	X	
30	Solokanjeruk	X	X	
31	Kutawaringin		X	

*) Keterangan : X = Potensi unggulan

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, 2010

2. Pariwisata

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Bandung mempunyai cukup banyak potensi untuk dikembangkan, sebagian besar potensi tersebut berupa wisata alam dan agro. Potensi wisata dan lokasi pengembangannya adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Pariwisata Alam, meliputi : Gunung Patuha/Kawah Putih, Ranca Upas, Cimanggu, Walini, Situ Patengan, Kawah Cibuni, Curug Cisabuk (Kecamatan Rancabali), Gunung Puntang, [Arung Jeram Lamajang](#) (Kecamatan Cimaung), Cibolang, Punceling, Situ Cileunca, Kawah Gunung Papandayan, Arung Jeram Palayangan (Kecamatan Pangalengan), Situ Cisanti (Kecamatan Kertasari), Kawah kamojang, Situ Ciharus (Kecamatan Ibun), Gunung Keneng (Kecamatan Ciwidey), Curug Cindulang (Kecamatan Cicalengka), Curug Eti (Kecamatan Majalaya), Situ Sipatahunan (Kecamatan Baleendah), Oray Tapa (Kecamatan Cimenyan), Batukuda (Kecamatan Cilengkrang), Curug Cilengkrang (Kecamatan Cilengkrang).
- b. Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi : Gunung Padang (Kecamatan Ciwidey), Rumah adat Cikondang, Rumah Hitam (Kecamatan Pangalengan), Rumah Adat Bumi Alit (Kecamatan Banjaran), Situs Kampung Mahmud (Kecamatan Margaasih), Situs Karang Gantung (Kecamatan Pacet), Situs Bojongmenje (Kecamatan Rancaekek), Sentra Seni Jelekong (Kecamatan Baleendah), Sentra Seni Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Sentra Kerajinan (Kecamatan Pasirjambu), Sentra wisata seni Benjang (Kecamatan Cileunyi).



- c. Kawasan Pariwisata Agro, meliputi :
- Agrowisata Strawberry : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh;
 - Agrowisata Teh : Kertamanah, Malabar (Kecamatan Pangalengan), Rancabali (Kecamatan Rancabali), Gambung (Kecamatan Pasirjambu);
 - Agrowisata Sayuran : Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Pangalengan;
 - Agrowisata Herbal : Kecamatan Rancabali, Kecamatan pasirjambu, Kecamatan Ciwidey.
- d. Kawasan Pariwisata Terpadu dan Olahraga, meliputi : Stadion Si Jalak Harupat (Kecamatan Kutawaringin), Arena Golf Margahayu/BIG (Kecamatan Margahayu), arena Dago Golf (Kecamatan Cimenyan), Kawasan Wisata Terpadu Cimenyan (Kecamatan Cimenyan), Arena Golf (Kecamatan Cikancung), serta Kawasan Pariwisata Terpadu Sekitar Situ Cileunca (Kecamatan Pengalengan).

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bandung

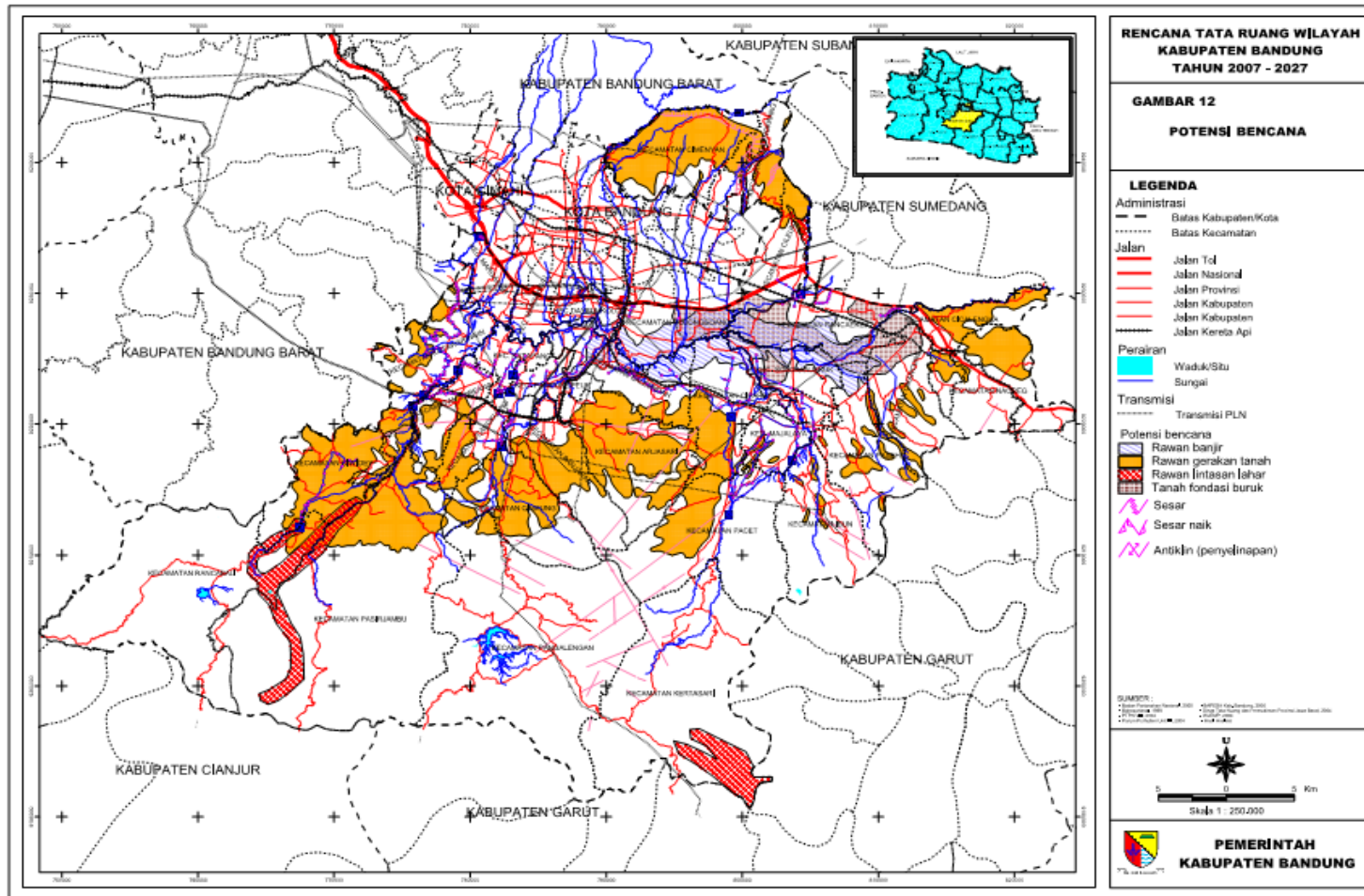
Morfologi wilayah Kabupaten Bandung terdiri atas: wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kondisi alam tersebut menyebabkan Kabupaten Bandung rentan dengan bencana alam, baik berupa banjir, longsor, erosi dan lain sebagainya.

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu serta alih fungsi lahan (dari hutan menjadi lahan pertanian) menyebabkan terjadinya pergerakan tanah (longsor), erosi dan sedimentasi serta bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Bandung. Tingginya alih fungsi lahan **dari pertanian menjadi permukiman** juga menyebabkan terganggunya sistem jaringan irigasi dan drainase. Dampak perubahan guna lahan yang terjadi di Kabupaten Bandung adalah timbulnya genangan dan kejadian banjir di beberapa titik terutama wilayah permukiman seperti banjir di Cieunteung – Baleendah, Dayeuhkolot serta Jalan terusan Kopo. Di beberapa tempat terutama daerah perkotaan di Kabupaten Bandung, saluran irigasi berubah fungsi menjadi saluran drainase. Sementara untuk penanganan limpasan air ke badan jalan, telah diupayakan pembangunan saluran drainase di 14 ruas jalan sepanjang 6.494,56 m, yang selanjutnya perlu perhatian terkait pemeliharaan saluran tersebut agar limpasan air ke badan jalan dapat diminimalkan.

Kondisi lingkungan yang kurang baik di daerah hulu, terutama terkait dengan fungsi resapan air, menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Hal tersebut diperparah dengan makin tingginya tingkat alih fungsi lahan menjadi permukiman serta perilaku masyarakat yang kurang baik dalam menjaga lingkungan (terutama terkait dengan pengelolaan sampah).



Gambar 2.1
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bandung
Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung 2007 – 2027



Sumber:

Perda



KABUPATEN BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung 2007- 2027.



2.1.4 Kondisi Umum Demografi Kabupaten Bandung

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3,215,548 jiwa, dengan sex ratio 103,91. Hal ini berarti, untuk setiap 100 penduduk perempuan pada tahun 2010 di Kabupaten Bandung terdapat 104 penduduk laki-laki. Luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 Ha, maka kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah \pm 19 jiwa/hektar. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 54,10 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 54 penduduk tidak produktif.

Tabel 2.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
1	Ciwidey	37.149	35.877	73.026	4.846,92	21
2	Rancabali	24.129	23.571	47.700	14.837,00	4
3	Pasirjambu	40.863	39.095	79.958	23.957,64	4
4	Cimaung	37.029	35.981	73.010	5.500,02	9
5	Pengalengan	69.863	68.980	138.843	19.540,93	5
6	Kertasari	33.281	32.433	65.714	15.207,36	4
7	Pacet	52.276	48.840	101.116	9.193,96	15
8	Ibun	38.619	37.157	75.776	5.456,51	17
9	Paseh	61.278	58.292	119.570	5.102,90	26
10	Cikancung	42.132	40.090	82.222	4.013,63	22
11	Cicalengka	55.336	53.775	109.111	3.599,23	30
12	Nagreg	24.406	23.459	47.865	4.930,29	12
13	Rancaekek	83.225	83.235	166.460	4.524,83	38
14	Majalaya	77.897	73.658	151.555	2.536,46	65
15	Solokanjeruk	39.364	38.193	77.557	2.400,66	33

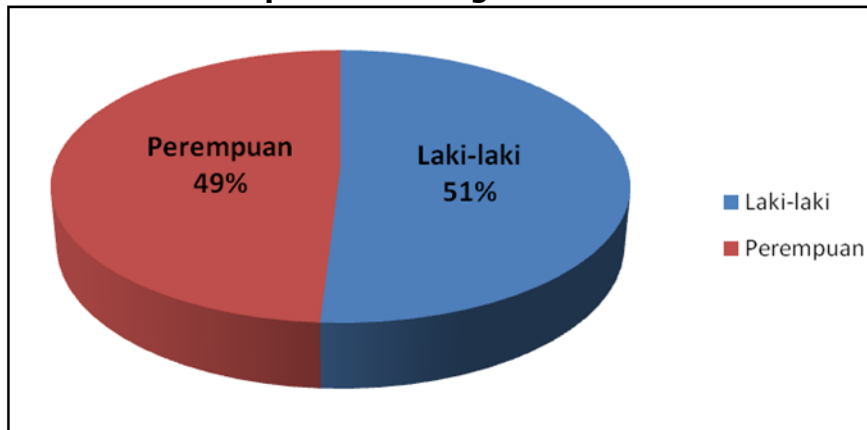


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk		
16	Ciparay	77.123	73.888	151.011	4.617,57	31
17	Baleendah	114.472	109.852	224.324	4.155,54	66
18	Arjasari	46.290	44.743	91.033	6.497,79	18
19	Banjaran	58.390	56.085	114.475	4.291,79	37
20	Cangkuang	33.116	31.847	64.963	2.461,06	27
21	Pamengpeuk	35.439	34.127	69.566	1.462,32	50
22	Katapang	56.121	53.618	109.739	1.572,46	72
23	Soreang	53.427	50.961	104.388	2.550,68	43
24	Kutawaringin	46.056	43.488	89.544	4.730,26	20
25	Margaasih	68.799	65.611	134.410	1.834,49	82
26	Margahayu	60.830	59.545	120.375	1.054,33	129
27	Dayeuhkolot	57.982	55.352	113.334	1.102,91	105
28	Bojongsoang	53.308	50.668	103.976	2.781,22	40
29	Cileunyi	83.489	80.606	164.095	3.157,51	58
30	Cilengkrang	23.708	22.912	46.620	3.011,94	15
31	Cimendan	53.226	50.986	104.212	5.308,33	26
TOTAL		1.638.623	1.576.925	3.215.548	176.238,67	19

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

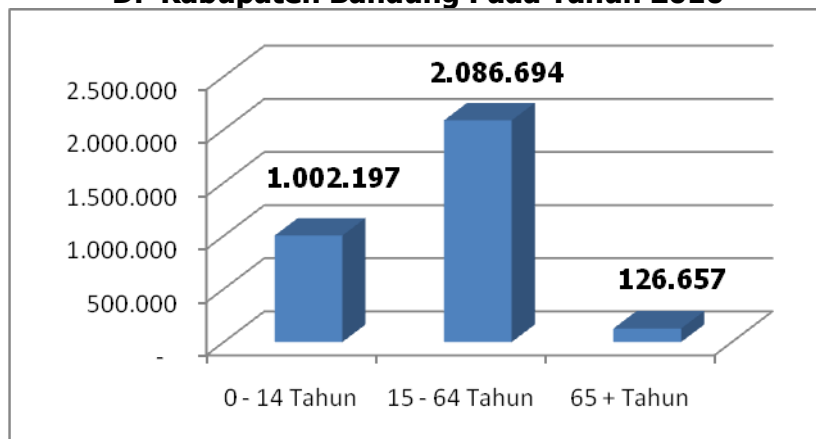


Gambar 2.2
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010



Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

Gambar 2.3
Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur
Di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2010



Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2010

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung dijelaskan melalui 3 hal, yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olah raga.

2.2. 1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Bandung

Salah satu metoda yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Bandung adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. Komponen-komponen Indikator makro tersebut



diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada Tahun 2010 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bandung baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai 46,09 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 4,89 triliun dari tahun 2009 begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yang mengalami peningkatan sebesar 1,20 triliun dari 20,53 triliun pada tahun 2009 menjadi 21,73 triliun pada tahun 2010.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi di hampir seluruh sektor ekonomi, dengan peningkatan terbesar terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tercatat laju pertumbuhan sektor ini meningkat dari 7,23 % di tahun 2009 menjadi 8,21 % di tahun 2010. Sementara itu pada tahun ini sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung mampu tumbuh sebesar 5,24 %, setelah di tahun sebelumnya sempat mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun demikian untuk beberapa sektor ekonomi seperti sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pengangkutan dan komunikasi di tahun 2010 ini justru mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian melambat dari 5,43 % di tahun 2009 menjadi 4,87 % di tahun 2010, sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi melambat menjadi 5,78 % setelah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat di tahun sebelumnya.



Tabel 2.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010
Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	1.338.248,71	7,59	1.371.807,74	7,34	1.424.992,98	7,24	1.502.003,39	7,32	1.602.050,01	7,37
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	234.570,64	1,33	245.205,27	1,31	255.888,73	1,30	269.782,12	1,31	282.922,47	1,30
3	Industry Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	10.838.753,39	61,44	11.478.643,51	61,44	12.110.396,65	61,56	12.519.327,64	60,98	13.173.587,93	60,61
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity Gas and Water Supply</i>	323.121,39	1,83	344.912,14	1,85	361.439,39	1,84	376.034,30	1,83	396.026,30	1,82
5	Bangunan/ <i>Construction</i>	312.842,65	1,77	327.475,13	1,75	339.547,36	1,73	355.614,56	1,73	381.103,63	1,75
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel and</i>	2.625.092,43	14,88	2.819.715,80	15,09	2.994.763,36	15,22	3.211.263,99	15,64	3.474.795,78	15,99



No	Sektor	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
	<i>Restourant</i>										
7	Pengangkutan dan Komunikasi <i>/ Transport and Communication</i>	717.582,16	4,07	765.192,41	4,10	795.218,84	4,04	843.661,61	4,11	892.448,05	4,11
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/	393.169,22	2,23	419.515,28	2,25	436.277,89	2,22	451.138,21	2,20	474.864,56	2,18
9	Jasa-jasa/ Services	856.789,53	4,86	911.462,79	4,88	955.207,67	4,86	1.000.817,32	4,87	1.056.862,46	4,86
	Total	17.640.170,09	100	18.683.930,07	100	19.674.494,55	100	20.527.539,56	100	21.734.661,19	100

Sumber : PDRB Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010.



Tabel 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 sampai dengan 2010
atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	2.228.624,62	7,57	2.465.321,20	7,40	2.728.755,88	7,19	3.013.007,10	7,36	3.471.661,92	7,53
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	368.568,14	1,25	419.179,42	1,26	468.303,80	1,22	526.035,13	1,28	580.783,81	1,26
3	Industry Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	17.876.119,11	60,74	20.154.147,70	60,49	23.275.745,49	60,79	24.721.851,70	60,00	27.471.535,02	59,60
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/ <i>Electricity Gas and Water Supply</i>	524.707,23	1,78	588.412,88	1,77	642.658,74	1,68	674.520,69	1,65	741.188,33	1,61
5	Bangunan/ <i>Konstruksi/ Construction</i>	506.056,81	1,72	571.271,13	1,71	648.394,06	1,69	696.720,83	1,70	764.990,68	1,66
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/ <i>Trade, Hotel and</i>	4.432.799,58	15,06	5.112.043,54	15,34	6.005.197,92	15,68	6.780.385,10	16,56	7.796.200,55	16,91



No	Sektor	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
	<i>Restourant</i>										
7	Pengangkutan dan Komunikasi/ Transport and Communication	1.360.838,71	4,62	1.566.528,90	4,70	1.783.920,50	4,61	1.795.161,77	4,38	1.933.148,22	4,19
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/	634.303,86	2,16	721.566,11	2,17	792.877,54	2,07	820.502,95	2,00	898.354,49	1,95
9	Jasa-jasa/ Services	1.499.027,98	5,09	1.721.159,87	5,17	1.936.315,52	5,06	2.173.715,40	5,05	2.434.375,72	5,28
	Total	29.431.046,06	100	33.319.630,76	100	38.282.169,45	100	41.201.900,67	100	46.092.238,72	100

Sumber : PDRB Kecamatan Kabupaten Bandung, 2006 - 2010

Tabel 2.8
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

No	Sektor	Tahun									
		2006		2007		2008		2009		2010	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1	Pertanian/ Agriculture	7,57	7,59	7,40	7,34	7,19	7,24	7,36	7,32	7,53	7,37
2	Pertambangan dan Penggalan/ Mining and	1,25	1,33	1,26	1,31	1,22	1,30	1,28	1,31	1,26	1,30



	<i>Quarrying</i>										
3	Industry Pengolahan/Manufacturing Industry	60,74	61,44	60,49	61,44	60,79	61,56	60,00	60,98	59,60	60,61
4	Listrik, Gas dan Air Bersih/Electricity Gas and Water Supply	1,78	1,83	1,77	1,85	1,68	1,84	1,65	1,83	1,61	1,82
5	Bangunan/Konstruksi/Construction	1,72	1,77	1,71	1,75	1,69	1,73	1,70	1,73	1,66	1,75
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran/Trade, Hotel and Restourant	15,06	14,88	15,34	15,09	15,68	15,22	16,56	15,64	16,91	15,99
7	Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Communication	4,62	4,07	4,70	4,10	4,61	4,04	4,38	4,11	4,19	4,11
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,16	2,23	2,17	2,25	2,07	2,22	2,00	2,20	1,95	2,18
9	Jasa-jasa/Services	5,09	4,86	5,17	4,88	5,06	4,86	5,05	4,87	5,28	4,86
	Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kecamatan Kabupaten Bandung, 2006 - 2010

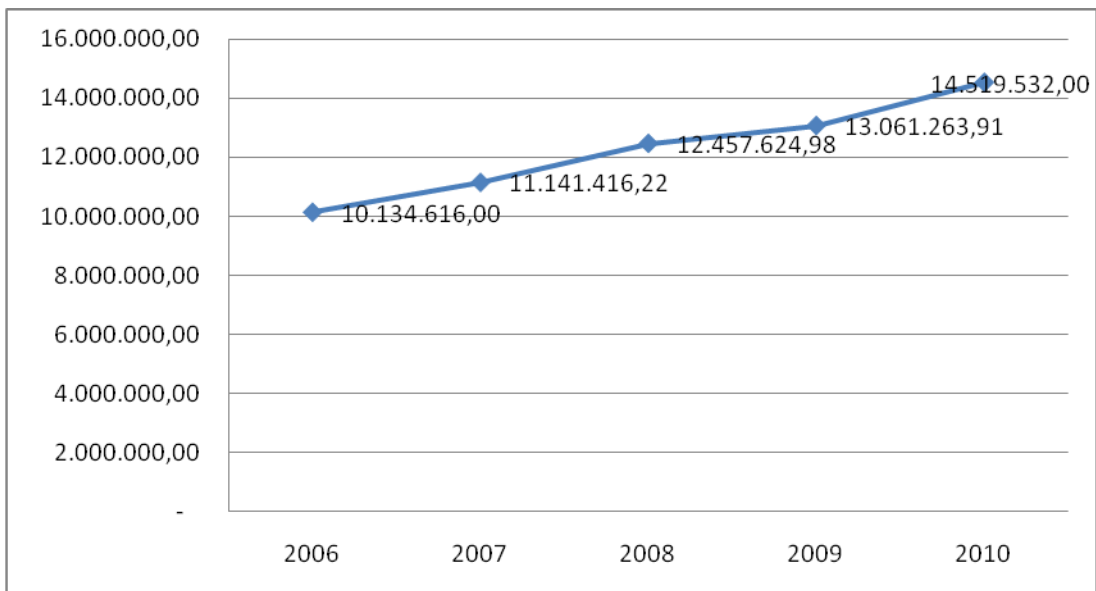


2. PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung

PDRB per kapita Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu tumbuh sebesar 44,96 % meningkat menjadi Rp. 14.519.532 per tahun di tahun 2010. Namun tidak demikian dengan tingkat pertumbuhan nilai PDRB perkapita atas dasar konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Bandung, dimana tingkat pertumbuhannya termasuk kecil yaitu hanya sekitar 16,19 % dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat, tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2009 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 15.198.351,99 sedangkan untuk Kabupaten Bandung adalah Rp. 13.061.263,91.

Gambar 2.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010



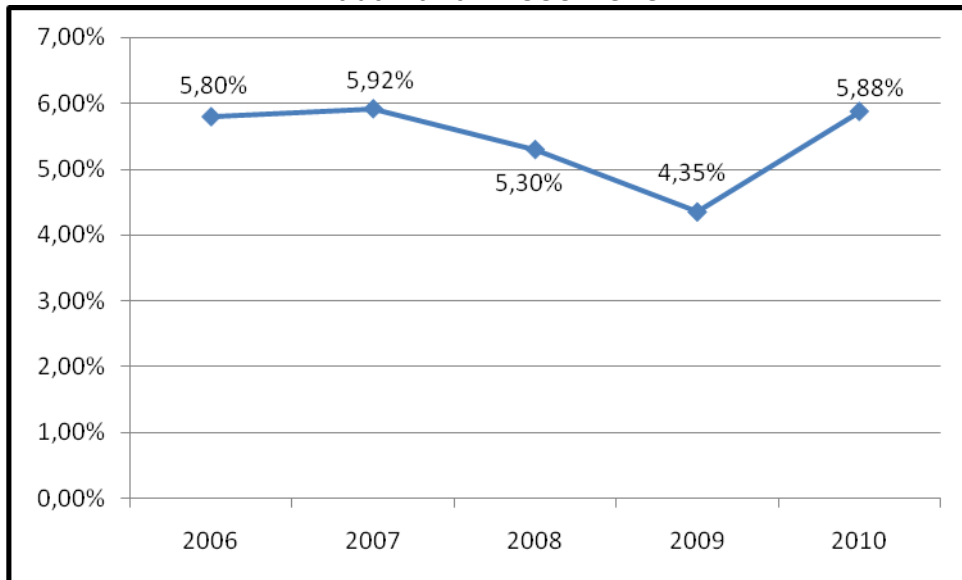
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2010

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

LPE Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 5,88 %. Jika dilihat dari pertumbuhan tiap-tiap sektor ekonomi terlihat bahwa pada tahun 2010 hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, dua sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan dengantahun sebelumnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan sampai 8,21 %, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu sebesar 4,87 % adalah sektor pertambangan dan penggalian.



Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan EKonomi Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006-2010



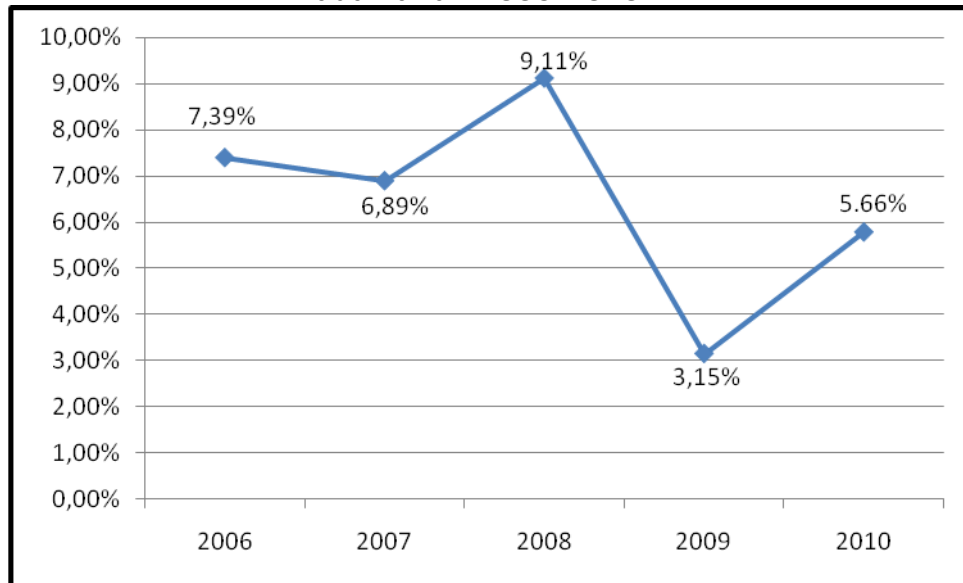
Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2010

4. Tingkat Inflasi

Pada tahun 2010 terjadi inflasi PDRB Kabupaten Bandung sebesar 5,66 %, naik dari inflasi PDRB tahun sebelumnya yang sebesar 3,15 %, walaupun meningkat namun nilai ini masih digolongkan sebagai inflasi ringan (di bawah 10 % per tahun). Berdasarkan kelompok sektor pada tahun 2010 inflasi tertinggi terjadi pada sektor pertanian yang mencapai 8,03 %, sedangkan inflasi terendah terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 1,80 %.



Gambar 2.6
Tingkat Inflasi PDRB di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006-2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2010.

5. Indikator Makro Perekonomian Kabupaten Bandung

Tabel 2.9
Kondisi Perekonomian Kabupaten Bandung
(PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi) Tahun 2010

No.	Sektor	PDRB (juta rupiah)		Kontribusi / Peranan NTB (%)	LPE Atas Dasar Harga Konstan (%)	Tingkat Inflasi (%)
		Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan			
1.	Pertanian	3.471.661,92	1.602.050,01	7,53	6,66	8,03
2.	Pertambangan dan Penggalian	580.783,81	282.922,47	1,26	4,87	5,28
3.	Industri Pengolahan	27.471.535,02	13.173.587,93	59,60	5,24	5,59
4.	Listrik, Gas dan Air	741.188,33	396.026,30	1,61	5,32	4,34
5.	Bangunan	764.990,68	381.103,63	1,66	7,17	2,46
6.	Perdagangan, Hotel & restoran	7.796.200,55	3.474.795,78	16,91	8,21	6,26
7.	Angkutan dan	1.933.148,22	892.448,05	4,19	5,78	1,80



No.	Sektor	PDRB (juta rupiah)		Kontribusi / PerananNT B (%)	LPE Atas Dasar Harga Konstan (%)	Tingkat Inflasi (%)
		Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan			
	Komunikasi					
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	898.354,49	474.864,56	1,95	5,26	4,02
9.	Jasa-jasa	2.434.375,72	1.056.862,46	5,28	5,60	6,05
	PDRB	46.092.238,72	21.734.661,19	100	5,88	5,66

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2010.

Secara umum indikator makro di Kabupaten Bandung 2007-2010 dapat tergambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Indikator Makro Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

No	Indikator	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.000	3.127.008	3.172.860	3.215.548
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,20%	2,97 %	2,93 %	1,47 %	1,35 %
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,80 %	5,92 %	5,30%	4,34%	5,88%
4	Tingkat Inflasi PDRB	7,39%	6,89%	9,11%	3,15%	5,78%
5	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
6	PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,54	20.527.539,56	21.734.661,19
7	Jumlah Keluarga	-	184.638	185.064	185.064	185.064



No	Indikator	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
	Miskin					
8	Laju Pertumbuhan Investasi	-	-	3,69%	4,73%	7,17 %
9	Pendapatan Perkapita (Rp)	10.134.616	11.141.416,22	12,457,624.98	13,061,263.91	14,519,532.00

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Dalam Angka, 2010.

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bandung

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2006 – 2010 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang ditandai dengan meningkatnya kesehatan masyarakat dan pendidikan penduduk.

Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dengan indikator angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah). Indikator lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung adalah angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bandung

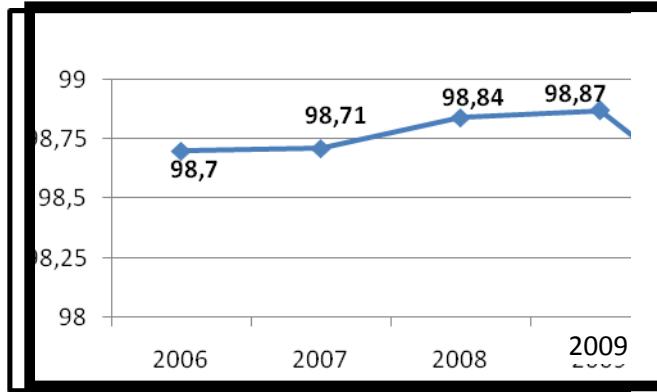
Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat terlihat dari tiga bidang utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Indikator yang mewakili bidang pendidikan untuk menggambarkan IPM adalah angka melek huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah. Pencermatan atas data sebaran rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan signifikan kedua indikator tersebut terjadi di daerah/wilayah yang berkarakter urban, sementara kondisi di wilayah rural mengalami penurunan.



➤ Angka Melek Huruf

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Bandung dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 mempunyai kecenderungan tren yang meningkat, walaupun rata-rata kenaikannya masih relatif kecil.

Gambar 2.7
Angka Melek Huruf Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 – 2009



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2009

➤ Rata-rata Lama Sekolah

Setiap tahunnya terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung. Berikut grafik rata-rata lama sekolah dari tahun 2006 sampai dengan 2010 per Kecamatan di Kabupaten Bandung.

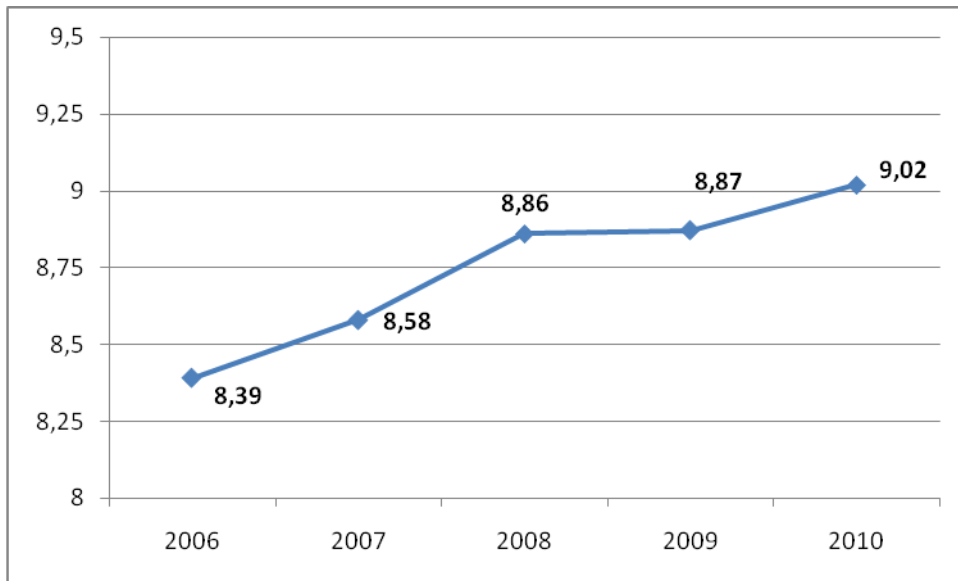
Tabel 2.10
Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Ijazah Tertinggi yang Dimiliki) Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 – 2009

Tahun	Tidak/Belum Punya Ijazah	SD/Setara	SLTP/Setara	SLTA/Setara	Perguruan Tinggi
2006	51.435	1.545.765	772.268	579.786	130.605
2007	438,454	942,228	610,161	463,128	84,984
2008	1,258,751	2,520,058	1,639,608	1,283,608	255,389
2009	2,506,811	5,008,783	3,273,970	2,557,376	509,613

Sumber : Kabupaten Bandung Dalam Angka 2006 – 2009



Gambar 2.8
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 – 2010

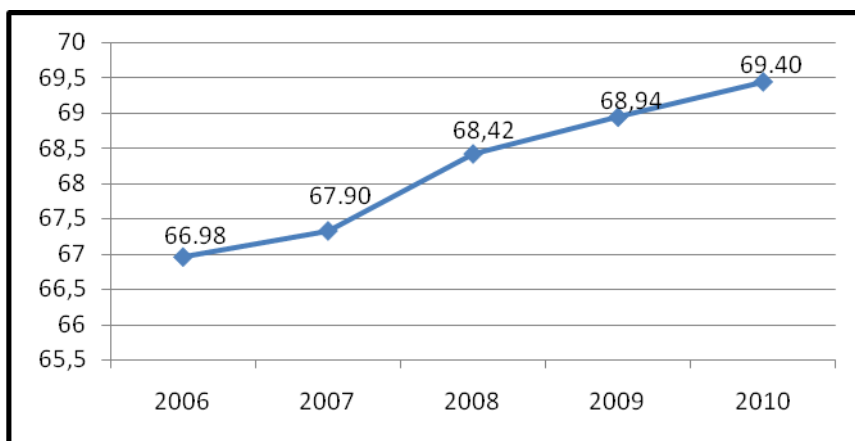


Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2010

➤ Angka Harapan Hidup

Berdasarkan data yang diperoleh, angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sejak tahun 2006 – 2010. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.9

Gambar 2.9
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 – 2010



Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2010



➤ Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung

Pembangunan manusia merupakan paradigam pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Indikator yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia (IPM) adalah tingkat intelektualitas (pendidikan), kualitas fisik (kesehatan) dan kemampuan daya beli (ekonomi).

Tabel 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 – 2010

Tahun	IPM	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Indeks Daya Beli	Keterangan
2006	70,11	84,44	69,97	55,91	
2007	70,96				Sebelum pemekaran KBB
	71,88	84,90	71,50	59,25	Sesudah pemekaran KBB atau 31 Kec.
2008	72,50	85,58	72,36	59,55	
2009	73,39	85,61	73,23	61,31	
2010	74,24	85,65	74,00	63,07	

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) sering digunakan untuk menunjukkan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APK di Kabupaten Bandung dari tiap jenjang pendidikan selalu meningkat tiap tahunnya. Berikut ini gambaran mengenai APK di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

TAHUN	Jenjang Pendidikan				
	TK	SD	SMP	SMA	PT
2006	13,99	110,14	89,12	30,91	7.78
2007	16,96	110.36	91,02	34,26	8.88
2008	14,67	103.25	91,45	36,03	13.59
2009	25,63	103.32	91,55	48,74	8.24
2010	25,26	104,31	101,22	54.04	13.57

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010/2011



3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Bandung dari tiap jenjang pendidikan meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2008 terjadi penurunan terutama pada jenjang Perguruan Tinggi. Hal tersebut terjadi, karena adanya krisis ekonomi yang berpengaruh pada tingginya angka drop out (DO). Kondisi tersebut didukung oleh kurang meratanya kesempatan penduduk di pedesaan dalam mengakses pendidikan. Hal ini kemungkinan karena gencarnya promosi program pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah secara luas dengan disertai oleh bermacam-macam kucuran dana bantuan pendidikan mulai terbatas pada kelompok masyarakat miskin hingga yang sifatnya menyeluruh seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Data mengenai angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Bandung, tersajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

Tahun	Jenjang Pendidikan				
	TK	SD	SMP	SMA	PT
2006	8,80	97,45	69,38	22,02	5.24
2007	12,25	98,12	69,84	23,60	6.62
2008	11,11	98,20	70,35	24,66	1.49
2009	19,41	98,42	70,55	37,81	6.20
2010	21,10	98,64	73,83	39,36	10.44

Sumber: Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, 2006 – 2010

4. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

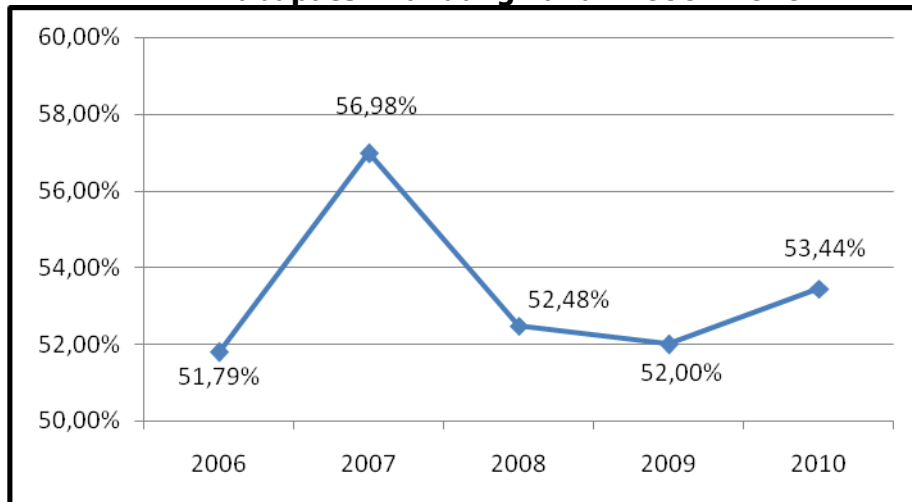
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 53,44 %. Jika dilihat berdasarkan perspektif gender, TPAK perempuan hanya mencapai 35,72 % relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai 70,56 %. Perempuan cenderung



kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga. Kesempatan kerja mencapai 89,80 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,20 % yang pada umumnya didominasi oleh perempuan sebesar 19,12 %.

Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor: pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor pertanian mencapai 18,21 %, pada sektor industri 29,23 %, perdagangan 20,50 %, jasa 14,14 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 17,22 %.

Gambar 2.10
TPAK Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2006 - 2010.

2.2.3 Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bandung ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Bandung sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Sunda namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Bandung seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Kepemudaan dan Olah Raga Pembinaan Generasi muda dilaksanakan melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan aubade, penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan



pemuda pelopor. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga SD, penyelenggaraan Pekan Olahraga SMP, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan Lomba Gerak Jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, Tes Kesegaran Jasmani bagi SMP dan SMA. Tahun 2006 - 2010 penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar SD, SMP, SMA/SMK yang terdiri dari beberapa cabang olahraga, penyelenggaraan pembinaan teknis personal, penyelenggaraan bantuan sarana dan prasarana. kegiatan Porseni SD, SMP/SMA/SMK, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani Guru olahraga, penyelenggaraan lari 10K, penyelenggaraan gerak jalan santai, penyelenggaraan TKJ Tahun 2006-2010, kegiatan POPDA SD, SMP, SMA / SMK penyelenggaraan lari 10 K, kegiatan jalan santai, penyelenggaraan Tes Kesegaran Jasmani SMP dan SMA.

Tabel 2.15
Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Bandung

No	Capaian Pembangunan	2008	2009
1	Jumlah grup Kesenian	608	803
2	Jumlah gedung Kesenian	-	-
3	Jumlah klub Olah raga per 10.000 penduduk	1,95	3,96
4	Jumlah Gedung olah raga per 10.000 penduduk	1,129	1,2

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung

2.3 Aspek Pelayanan Publik Kabupaten Bandung

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu : fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No. 32 Tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari 26 bidang, yaitu:

1. Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :



➤ Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai APS di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	325.867 Orang	366.437 Orang	349.548 Orang	356.555 Orang	400.917 Orang
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	376.117 Orang	397.631 Orang	456.903 Orang	400.438 Orang	402.631 Orang
1.3.	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	86,64%	92,16%	76,50%	89,04%	99,57%
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	144.052 Orang	100.917 Orang	105.494 Orang	106.608 Orang	154.751 Orang
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	172.239 Orang	181.304 Orang	198.798 Orang	206.499 Orang	190.535 Orang
2.3.	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	83,63%	55,66%	53,07%	51,63%	81,22%
3	SMA/MA/SMK					

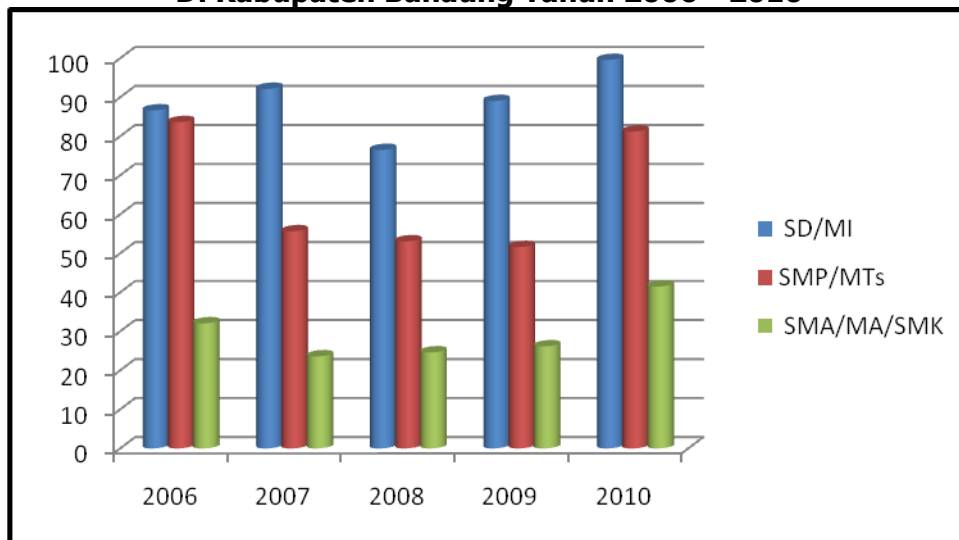


No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
3.1	Jumlah murid usia 16-18 thn	53.288 Orang	40.418 Orang	46.102 Orang	46.621 Orang	71.186 Orang
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	166.169 Orang	171.24 Orang	187.292 Orang	178.17 Orang	171.552 Orang
3.3	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	32,07%	23,60%	24,62%	26,17%	41,50%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun (2006-2010) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010)

Gambar 2.11

Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, SMP/MT dan SMA/MA/SKM Di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun (2006-2010) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010)

- Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Selama kurun waktu 2006-2010 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pada tahun 2010, perbandingan ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Bandung adalah 1 : 257,75. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SD/MI menampung 258 siswa.



Berbeda dengan SD/MA, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu meningkatnya jumlah sekolah SMA/MA/MK atau tingginya angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.17
Perbandingan Jumlah Sekolah Berdasarkan Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah sekolah	1576	1562	1547	1553	1593
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	376.117	397.631	456.903	400.438	402.631
1.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	1 : 238,65	1 : 254,57	1 : 295,35	1 : 257,85	1:252,75
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah sekolah	342	349	401	411	473
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	172.239	181.304	198.798	206.499	190.535
2.3.	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 - 15 Tahun	1 : 503,63	1 : 519,5	1 : 495,76	1 : 502,43	1:402,82
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah sekolah	207	219	238	250	253
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	166.169	171.240	187.292	178.170	171.552
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 - 18 Tahun	1 : 802,75	1 : 781,92	1 : 786,94	1 : 712,68	1:678,07

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010) dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2009)



➤ Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Selama kurun waktu tahun 2006-2010 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bandung untuk seluruh jenjang pendidikan, baik SD/MI, SMP/MTs. maupun SMA/MA/SMK per 10.000 jumlah murid mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2007 untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006. Demikian pula rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK pada tahun 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2010, perbandingan jumlah guru terhadap jumlah murid SD/MI di Kabupaten Bandung adalah 1 :29,24. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 1 guru SD/MI melayani (mengajar) $29,24 \approx 29$ murid SD. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.18
Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	12.669	13.893	15.159	15.936	14.363
1.2.	Jumlah Murid	378.765	418.597	403.247	410.245	419.990
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 29,89	1 : 30,13	1 : 26,6	1 : 25,74	1:29,24
2	SMP/MTs.					
2.1.	Jumlah Guru	8.858	8.667	9.794	10.003	9.694
2.2.	Jumlah Murid	183.265	147.277	143.328	143.411	192.851
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 20,69	1 : 17	1 : 14,63	1 : 14,34	1:19,89
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Guru	5.222	5.740	6.397	6.970	6.370
3.2	Jumlah Murid	74.953	58.668	67.476	69.799	123.027
3.3	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1 : 14,35	1 : 10,22	1 : 10,55	1 : 10,12	1:19,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2009)



➤ Rasio Guru/Murid per Kelas Rrata-rata

Pada tahun 2010, rasio guru/kelas SD/MA terhadap jumlah murid yang berusia 6 -12 tahun di Kabupaten Bandung adalah 1 : 1,48 : 43,44. Interpretasi dari angka di atas adalah bahwa 1 kelas SD dilayani (diajar) oleh $1,48 \approx 1$ orang guru, dimana kelas tersebut terdiri atas $43,44 \approx 43$ murid SD.

Tabel 2.19
Rasio Guru Per Kelas Rata-Rata Terhadap Jumlah Murid di Kabupaten Bandung

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	12.669	13.893	15.159	15.936	14.363
1.2.	Jumlah Kelas	11.142	12.544	11.724	11.474	9668
1.3.	Rasio Guru/Kelas	1 : 1,14	1 : 1,11	1 : 1,29	1 : 1,39	1:1,48
1.4.	Jumlah Murid	378.765	418.597	403.247	410.245	419.990
1.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 34	1 : 33	1 : 34	1 : 36	1 : 43
1.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1 : 1,14 : 34	1:1,11:33,37	1:1,29:34,4	1:1,39:35,75	1:1,48:43,44
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	8.858	8.667	9.794	10.003	9.694
2.2	Jumlah Kelas	2.978	3.316	3.389	3.763	3.441
2.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 2,97	1 : 2,61	1 : 2,89	1 : 2,66	1:2,8
2.4	Jumlah Murid	183.265	147.277	143.328	143.411	192.851
2.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 62	1 : 44	1 : 42	1 : 38	1 : 56
2.6	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:2,97:61,54	1:2,61:44,41	1:2,89 :42,3	1:2,66:38,11	1:2,8:56
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Guru	5.222	5.740	6.397	6.970	6.370
3.2	Jumlah Kelas	1.111	1.647	1.837	2.093	1.883
3.3	Rasio Guru/Kelas	1 : 4,70	1 : 3,49	1 : 3,48	1 : 3,33	1:3,38
3.4	Jumlah Murid	74.953	58.668	67.476	69.799	92.712
3.5	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	1 : 67	1 : 36	1 : 37	1 : 33	1 : 49



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
2.5	Rasio Guru/Kelas terhadap Jumlah Murid	1:4,70:67,46	1:3,49:35,62	1:3,48:36,73	1:3,33:33,35	1:3,38:49

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2010)

➤ Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik

Ketersediaan ruang kelas yang baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2010, ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SD/MI baru mencapai 57,21 %. Jumlah ini meningkat 2,07 % bila dibandingkan dengan tahun 2009. Demikian pula ketersediaan jumlah ruang kelas baik untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. dan SMA/MS/SMK mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009, yaitu masing-masing meningkat sebesar 2,87 % dan 2,31 %. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi ruang kelas baik di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.20
Kondisi Ruang Kelas Baik berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 – 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	4.115	5.910	5.029	5.048	3.238*
1.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	9.661	8.376	10.288	9.132	4.633*
1.3.	Persentase kondisi ruang kelas yang baik	42,59	70,56	48,88	55,28	57,21
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah ruang kelas kondisi baik	1.884	1.935	2.427	2.860	2.542*
2.2.	Jumlah seluruh ruang kelas	2.686	2.851	3.429	3.969	2.423*
2.3.	Persentase kondisi ruang kelas yang	70,14	67,87	70,78	72,06	78,91



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
	baik					
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah ruang kelas kondisi baik	1.130	1.462	1.254	1392	1.167*
3.2	Jumlah seluruh ruang kelas	1.476	1.731	1.740	1.882	1.380*
3.3	Persentase kondisi ruang kelas yang baik	76,56	84,46	72,07	73,96	76,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2009)

*Pada tahun 2009 terjadi bencana gempa bumi sehingga jumlah ruang kelas berkurang baik dari segi jumlah sekolah maupun sekolah yang kondisi baik, dan dilaporkan di tahun 2010.

➤ Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Bandung cukup rendah, tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah pada tingkat SD/MA dan SMP/MTs pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,03 dari tahun 2009. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2008 ke 2009, yaitu sebesar 0,11 %. Namun, angka putus sekolah pada tingkat SMA/MA/SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan pula pada tahun 2008 ke 2009, yaitu sebesar 0,18 %. Peningkatan angka putus sekolah ini dapat disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan pada tingkat SMA/MA/SMK sehingga sejumlah siswa di Kabupaten Bandung yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah.

Tabel 2.21
Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	307	214	588	163	285
1.2.	Jumlah seluruh Siswa	378.765	418.597	403.247	410.245	403.173



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,08	0,05	0,15	0,04	0,07
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	2.472	417	817	658	844
2.2.	Jumlah seluruh Siswa	183.265	147.277	143.328	143.411	143.328
2.3.	Angka Putus Sekolah (Persentase)	1,35	0,28	0,57	0,46	0,59
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Siswa Putus Sekolah	462	232	403	541	391
3.2	Jumlah seluruh Siswa	74.953	58.668	67.476	69.799	67.476
3.3	Angka Putus Sekolah (Persentase)	0,62	0,40	0,60	0,78	0,58

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2009)

➤ Angka Kelulusan Siswa

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua.

Jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan pada tahun 2010, baik SD/MI, SMP/MTs. maupun SMA/MA/SMK, seluruhnya mengalami peningkatan kelulusan, namun pada tahun 2010 jumlah ini menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Peningkatan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan ruang kelas terhadap rombongan belajar, ketersediaan tenaga pendidik/ guru terhadap jumlah murid/siswa, serta ketersediaan tenaga pendidik/guru. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa di Kabupaten Bandung per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.22
Jumlah Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010

No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	53.752	55.558	55.096	55.220	50.300



No.	Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010
1.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas VI	58.415	64.195	57.743	57.241	55.220
1.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	92,02	86,55	95,42	96,47	91,09
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	30.887	35.747	37.490	42.550	30.049
2.2.	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	35.942	35.621	43.328	44.357	42.550
2.3.	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	85,94	100,35	86,53	95,93	70,62
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah	14.832	16.152	16.495	17.271	15.091
3.2	Jumlah seluruh Siswa Kelas III	16.678	16.803	19.544	20.068	17.271
3.3	Angka Kelulusan Siswa (Persentase)	88,93	96,13	84,40	86,06	87,38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Statistik Pendidikan Tahun 2006-2009)

2. Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 8 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 3 unit, rumah sakit swasta sebanyak 4 Rasio



pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 1 : 535.925. Hal ini berarti bahwa untuk 1 rumah sakit di Kabupaten Bandung melayani 535.925 penduduk.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.23
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	2	2	2	3	3
2.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3	4	2	2
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	0
	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	7	6	6
	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
	Rasio	1 : 490.862	1 : 506.347	1 : 446.715	1 : 528.810	1 : 535.925

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)

➤ Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi : peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.



Jumlah Posyandu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 3.991 buah dan jumlah Balita sebanyak 333.673 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 1 : 84. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Bandung melayani 77 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.24
Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah posyandu	3.636	3.381	3.883	3.926	3.991
2.	Jumlah balita	281.853	290.160	280.874	284.112	319.333
3.	Rasio Posyandu per Jumlah Balita	1 : 77	1 : 86	1 : 72	1 : 72	1 : 84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2009)

- Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Persatuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten pada tahun 2010 mencapai 1 : 7.067. Ini artinya bahwa 1 Puskesmas/ Poliklinik/Pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 7.067 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 2 : 1. Ini artinya bahwa dalam satu kecamatan terdapat 2 unit Puskesmas.

Berikut adalah data secara lengkap mengenai rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.25
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Puskesmas	61	61	61	61	61
2.	Jumlah Poliklinik	304	304	318	317	309
3.	Jumlah Pustu	70	72	71	69	85



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	Jumlah Total Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	435	438	450	447	455
4.	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 48.281	1 : 49.001	1 : 51.262	1 : 52.014	1 : 52.714
	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	1 : 9.688	1 : 9.993	1 : 9.833	1 : 10.009	1 : 10.407
	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 42.074	1 : 42.196	1 : 44.042	1 : 45.983	1 : 37.830
	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	1 : 6.771	1 : 6.936	1 : 6.949	1 : 7.098	1 : 7.067
5.	Jumlah Kecamatan	30	30	31	31	31
6.	Jumlah Desa/kelurahan	275	275	275	276	276
	Rasio Puskesmas per Kecamatan	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1	2 : 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Profil Kesehatan Tahun 2006-2010)

3. Pekerjaan Umum

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* (jaringan jalan yang menyempit) diberbagai



jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2006 proporsi jalan kondisi baik mencapai 37,48 % namun pada tahun 2010 kondisi tersebut menurun menjadi 30,78 %. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami peningkatan, yaitu dari 13,14 % pada tahun 2006 menjadi 27,61 % pada 2010.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.26
Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	Panjang Jalan (km)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kondisi Baik	459,89	295,10	317,72	395,56	355,57
2.	Kondisi Rusak Ringan	359,65	438,42	316,22	207,49	235,19
3.	Kondisi Rusak Sedang	246,27	301,85	274,06	338,96	319,01
4.	Kondisi Rusak Berat	161,23	191,66	246,55	213,35	245,58
5.	Jalan secara keseluruhan	1.227,04	1.227,03	1.154,55	1.155,35	1.155,35
	Poporsi Kondisi Baik (%)	37,48	24,05	27,52	34,24	30,78
	Poporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	29,31	35,73	27,39	17,96	20,36
	Poporsi Kondisi Rusak Sedang (%)	20,07	24,60	23,74	29,34	27,61
	Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)	13,14	15,62	21,35	18,47	21,26

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2010

Perubahan panjang jalan antara tahun 2007 ke tahun 2008, untuk tahun 2007 merupakan hasil pemekaran dengan kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, sedangkan data tahun 2008 merupakan hasil kajian dan memiliki selisih panjang jalan 72,48 Km.



Adapun jalan nasional di kabupaten Bandung sepanjang 30,36 Km dan jalan Provinsi di kabupaten Bandung sepanjang 160,04 Km serta Jalan Desa di kabupaten Bandung sepanjang 863,37 Km.

Kriteria kenaikan status jalan Desa menjadi jalan Kabupaten :

1. Jalan Desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan alternative untuk menuju pusat kegiatan local dengan ibukota kabupaten.
2. Jalan Desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan penghubung antar ibukota kecamatan.
3. Jalan Desa yaitu jalan pemukiman atau jalan lingkungan tersebut sudah menjadi jalan untuk menuju pusat kegiatan local.
4. Lebar jalan Desa yang diusulkan tidak kurang dari 7,5 m.
5. Kecepatan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 Km/jam.

➤ Kondisi Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Panjang total jaringan irigasi Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sepanjang 1.084,15 km (panjang saluran primer 77,76 km, panjang saluran sekunder 136,00 km dan panjang saluran tersier 870,39 km). Bangunan terdiri dari Bangunan Utama (Bangunan Bendung) sebanyak 443 buah dan Bangunan Air (Bangunan Sadap, Bagi Sadap dan Pelengkap) sebanyak 1.015 buah. Angka ini tidak meningkat bila dibandingkan tahun 2009 maupun 2008.

Adapun luas lahan budidaya pada tahun 2010 36.739,75 ha (sumber hasil pendataan ulang, SDAPE, 2010). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai gambaran jaringan irigasi di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.27
Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Bandung Tahun 2010

No.	Uraian	Kondisi eksisiting saluran irigasi			
		Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Total
1.	Jaringan Primer	47,281 km (60,8%)	15,55 km (20%)	14,931 km (19,2%)	77,764 km
2.	Jaringan Sekunder	81,60 km (60%)	34 km (25%)	20,4 km (15%)	136 km
3.	Jaringan Tersier	609,30 km (70 %)	87,10 km (10 %)	173,99 km (20 %)	870,39 km
4.	Bangunan Utama	141 bh (31,8 %)	178 bh (40,1%)	124 bh (28,1%)	443 bh



No.	Uraian	Kondisi eksisting saluran irigasi			
		Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Total
5.	Bangunan Air	431 bh (42,49%)	215 bh (21,2 %)	369 bh (36,3%)	1.015 bh

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung Tahun 2010

Jaringan Drainase

Jaringan Drainase di Kabupaten Bandung terkait erat dengan keberadaan Sungai Citarum dari Hulu ke Hilir beserta anak-anak sungainya. Sungai Citarum merupakan sungai lintas Kabupaten/Kota, yang berawal dari mata air yang terletak di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) yang mengalir sepanjang 269 km hingga bermuara di Laut Jawa.

Untuk skala nasional, wilayah Sungai Citarum merupakan bagian dari wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Ciliwung-Cisadane-Citarum. Mengingat keberadaan Sungai Citarum yang sangat penting sbaga penyedia air baku ibukota, mempunyai dampak ekonomi serta secara regional menjadikannya sebagai wilayah sungai strategis nasional sehingga kewenangannya berada di pemerintah Pusat dan Provinsi.

Banjir atau genangan tahunan, 5 tahunan, dan 25 tahunan yang terjadi harus ditangani secara menyeluruh dai hulu ke hilir, secara struktural maupun non struktural. Catatan banjir besar di Bandung dan sekitarnya akibat melupanya Sungai Citarum terjadi pada tahun 1931, 1945, 1977, 1982, 1986, 1998, 2005 dan 2010. Namun demikian, saat ini hampir setiap tahun terjadi luapan Sungai Citarum.

Daerah banjir yang rutin terjadi adalah Kecamatan Majalaya, Kecamatan Bojongsong, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Dayeuhkolot. Lokasi-lokasi genangan juga terjadi di Ciparay, Solokan Jeruk, Pameungpeuk, Cangkuang, Soreang, Katapang, Margahayu, Margaasih, Rancaekek, Cilerunyi. Diharapkan pada tahun 2025, Lokasi-lokasi genangan tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.

Pada zona Citarum Hulu, permasalahan yang menakitkan terjadinya luapan dan penurunan kualitas sungai diantaranya sebagai berikut; berkurangnya areal hutan lindung, berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik, lahan kritis, erosi, sedimentasi, adanya limbah peternakan, adanya budidaya pertanian tidak ramah lingkungan, adanya limbah (industri, domestik dan sampah), dan permasalahan tata ruang.

Pada Zona Citarum Hilir permasalahan yang terjadi antara lain terjadinya degradasi prasarana pengendalian banjir, pencemaran, sedimentasi, permasalahan tata ruang (pemanfaatan bantaran sungai dan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya), untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Permasalahan Banjir di Cekungan Bandung dapat dilakukan secara Filosofis, Normatif, dan Sosial Budaya.

Secara Filosofis, diantaranya dengan melakukan relokasi penduduk dari wilayah banjir. Secara Normatif dengan melalui Metode Struktur yaitu melalui konstruksi teknik sipil (membuat waduk atau embung, membuat kolam retensi,



membuat/memperbaiki tanggul penahan banjir, melakukan normalisasi sungai, membuat polder dan sumur-sumur resapan)

Secara Normatif Menggunakan Metode Non Struktur, yaitu melakukan manajemen daerah rawan Banjir (Sistem peringatan dini, diseminasi peringatan ancaman dan sistem evakuasi banjir, pembuatan peta bahaya banjir, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan banjir, asuransi bencana banjir) dan Manajemen Daerah Airan Sungai (penataan ruang, pengendalian erosi di hulu DAS, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian perijinan pemanfaatan lahan, pengendalian kualitas air sungai, kelembagaan/otorita DAS Citarum Hulu, pembuatan peta kawasan lindung, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat untuk konservasi hulu DAS)

Secara Sosial dan Budaya melalui alih mata pencaharian, perubahan perilaku permukiman sehat dan menghidupkan kembali keraifan lokal yang positif.

Program Penanganan Banjir yang diharapkan dilakukan di Cekungan Bandung untuk 20 tahun kedepan adalah;

- Tanggap Darurat Daerah Banjir DayeuhKolot, Baleendah dan Sekitarnya
- Perbaikan drainase di Cieunteung dan Andir
- Pembuatan Situ di Cieunteung serta relokasi penduduk
- Pemeliharaan berkala S. Citarum, S. Citepus, S. Cisangkuy dan S. Cikapundung
- Tersusunnya FS dan DED Pengelolaan Banjir Cekungan Bandung
- Pembuatan waduk-waduk kecil
- Penanggulangan Erosi dan Sedimentasi di hulu

4. Perumahan Rakyat

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman.

Dari tahun 2006 sampai tahun 2010 luas permukiman yang tertata/terorganisir baru seluas 11.649,05ha atau mencapai 81,84% dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Bandung.

Tabel 2.28
Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2009	2010
1.	Luas area permukiman tertata	8.044,39	11.649,05



No.	Uraian	2009	2010
	(ha)		
2.	Total Luas area permukiman (ha)	14.297,30	14.297,30
4.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	56,27	81,84

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010.

➤ Rasio permukiman layak huni dan Rasio rumah layak huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut.

Sampai tahun 2010, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mencapai 5.124,03 ha. Sedangkan jumlah rumah layak huni mencapai 831.988 buah dari 885.674 rumah tangga di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.29
Jumlah Permukiman Dan Rumah Layak Huni
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian				2009	2010
1.	Luas permukiman layak huni (ha)	5.101,10	5.104,20	5.111,99	5.117,46	5.124,03
2.	Luas wilayah permukiman (ha)	14.200,22	14.200,22	14.200,22	14.297,30	14.297,30
3.	Persentase kawasan permukiman layak huni	35,90	35,94	35,99	35,79	35,84
4.	Jumlah rumah layak huni (unit)	575,096	575,096	575,446	576,940	577,680
5.	Jumlah rumah tangga (RT)	-	-	-	885.674	831.988
6.	Persentase rumah layak huni	-	-	-	79,80%	85%

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung.

➤ Persentase rumah tangga berakses air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Permukiman, Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertasih) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas Pertasih melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal



dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui : pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau BPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan DinasPertasih belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Bandung. Oleh karenanya Pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Pertasih Kabupaten Bandung baru mencapai 9,96% (316.310 jiwa) terhadap total jumlah penduduk Kabupaten Bandung (3.174.499 jiwa), dan mencapai 13,69% terhadap total jumlah penduduk daerah pelayanan (2.310.587 jiwa), dengan jumlah desa yang telah mendapat pelayanan air bersih sebanyak 207 desa dari 276 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil survey/identifikasi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung dapat diketahui bahwa cakupan penyediaan air bersih atas swadaya masyarakat lebih besar bila dibandingkan dengan cakupan penyediaan air bersih oleh Pemerintah, sehingga cakupan keseluruhan penyediaan air bersih di Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2009 mencapai 94,03 %. Cakupan pelayanan ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2006, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007. Cakupan pelayanan air bersih tahun 2006 mencapai 85,14 %, tahun 2007 mencapai 95,44 % dan tahun 2008 mencapai 81,95 %.

Berikut adalah data tentang kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam kurun tahun 2006-2010.

Tabel 2.30
Jumlah Proporsi Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Bersih
Di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih	645.006	746.481	669.368	832.806	763.184
2.	Jumlah rumah tangga	757.594	782.127	816.832	885.674	831.988
3.	Persentase rumah tangga berakses air bersih	85,14	95,44	81,95	94,03	91,73

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

- Persentase rumah tinggal bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)



Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa jumlah rumah di Kabupaten Bandung yang mempunyai akses sanitasi (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) telah mencapai 95,98 % pada tahun 2006. Kondisi ini meningkat menjadi 98,47 % pada tahun 2009.

Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.31
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
(Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja)
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja	727.175	734.984	802.872	872.082	797.392
2.	Jumlah rumah tangga	757.594	782.127	816.832	885.674	831.988
3.	Persentase	95,98	93,97	98,29	98,47	95,84

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

➤ Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bandung

Jumlah mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) unit dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan pendekatan jumlah Pos Damkar saat ini hanya berjumlah 3 pos. Jumlah ini tidak meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Adapun luas wilayah Kabupaten Bandung adalah 176.238,67 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.215.548 jiwa. Jumlah peristiwa kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2010 sebanyak 168 kali. Dari data ini dapat diketahui rasio mobil pemadam kebakaran terhadap luas wilayah Kabupaten Bandung, yaitu 1 : 25.177. Ini artinya bahwa satu mobil pemadam kebakaran harus melayani area Kabupaten Bandung seluas 25.177 ha.

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Permendagri no. 62 tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Damkar saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung tahun 2006-2010 baru mencapai 30,06 % dengan



tingkat waktu tanggap (*respon time*) penanggulangan kebakaran rata-rata di atas 25 menit (standar yang ditetapkan dalam Permendagri No. 62 tahun 2008 adalah 15 menit). Tingkat cakupan pelayanan kebakaran didefinisikan sebagai presentase kondisi existing wilayah manajemen kebakaran (WMK) atau Pos Damkar dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bandung yang terlayani. Nilai presentase cakupan pelayanan kebakaran akan tetap/konstan apabila jumlah WMK atau Pos Damkar berjumlah tetap/tidak ada penambahan (*standard* presentase cakupan pelayanan kebakaran yang ditetapkan dalam Permendagri no. 62 tahun 2008 adalah mencapai 75 %).

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.32
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Luas Wilayah Kab. Bandung (ha)	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67
4.	Jumlah Kejadian Kebakaran (kali)	276	184	173	172	168
5.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran terhadap Luas Wil Kab Bdg	1 : 25.177	1 : 25.177	1 : 25.177	1 : 25.177	1:25.177
6.	Persentase Tingkat Cakupan Pelayanan Kebakaran di Kab. Bandung	30,06	30,06	30,06	30,06	30,06%

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

5. Penataan Ruang

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.



Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling adalah sedikit 30% (tiga puluh persen), dimana 10% di antaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi, seperti rumah atau pabrik) dan 20% adalah RTH publik. Luas RTH di Kabupaten Bandung tahun 2010 mencapai 7,36 ha.

Tabel 2.33
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	3,9 ha*	5,98 ha*	6,28 ha*	6,92 ha*	7,36 ha*
2.	Luas wilayah	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67	176.238,67
	Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah.	2,21	3,39	3,56	3,93	4,18

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung tahun 2010.

Keterangan : * = Yang dikelola oleh Dinas Pertasih Kabupaten Bandung tahun 2010.

➤ Rasio Bangunan Yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bandung yang akan mendirikan/ membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki izin membuat bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2010 jumlah bangunan di Kabupaten Bandung yang telah ber-IMB sebanyak 3.514 unit dari 1.148.437 unit bangunan. Jumlah bangunan ber-IMB ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Rasio bangunan ber-IMB tahun 2010 mencapai 0,3%. Ini artinya bahwa jumlah bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 yang telah memiliki IMB masih sangat rendah (baru mencapai 0,3 %) demikian pula dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009).

Tabel 2.34
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

NO.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB (≥250M)	893	2.097	2.483	3.028	3.514



NO.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
2.	Jumlah Bangunan	1.142.971	1.143.333	1.144.537	1.144.923	1.148.437
3.	Persentase bangunan ber-IMB	0,08%	0,18%	0,22%	0,26%	0,3%

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

6. Perencanaan Pembangunan

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakandapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Seluruh dokumen perencanaan tersebut telah tersedia pada periode tahun 2006-2009, namun RPJPD sampai dengan tahun 2010 belum ditetapkan dengan Peraturan Daeran. Demikian pula dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD pada tahun 2006-2009 tidak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, akan tetapi ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta peraturan pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.35
Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010		Ket
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
1.	Dokumen RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA		√		√		√		√		√	Belum ditetapkan dengan Perda
2.	Dokumen RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA atau Peraturan Bupati	√		√		√		√			√	-
3.	Dokumen Renstra SKPD yg telah ditetapkan dgn Keputusan Bupati		√		√		√		√		√	Renstra-SKPD yang tersedia ditetapkan dgn keputusan kepala SKPD (sesuai PP 8/2008)
4.	Dokumen RKPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Bupati	√		√		√		√			√	-
5.	Dokumen Renja SKPD yg telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati		√		√		√		√		√	Renja-SKPD yang tersedia ditetapkan dgn keputusan kepala SKPD(sesuai PP 8/2008)

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010.



7. Perhubungan

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Rasio izin trayek

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 2.141 izin. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Data lengkap tentang rasio izin trayek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Rasio Izin Trayek di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Izin Trayek perkotaan	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
2.	Izin Trayek perdesaan	260	260	260	260	260
3.	Jumlah Izin Trayek	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
4.	Jumlah penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
5.	Rasio Izin Trayek	0,00082	0,00079	0,00077	0,00076	0,00075

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

➤ Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Seluruh angkutan umum yang diimpor di Kabupaten umum baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2010 sebanyak 8.176 unit kendaraan dari 8.972 unit kendaraan (91,13 %). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.37
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

No.	Angkutan Umum	2006			2007			2008			2009			2010		
		Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%	Jumlah	Jumlah KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	14.199	12.395	87,29	14.195	11.356	80,00	9.645	7.281	75,49	4.330	3.489	80,58	8.972	8.176	91,13
2.	Mobil bus	875	570	65,14	876	569	64,95	659	514	78,00	203	176	86,70	452	441	97,57
3.	Mobil barang	875	430	49,14	864	432	50,00	480	375	78,13	267	259	97,00	25.264	23.974	94,89
4.	Kereta gandengan	-	-	-	8	0	0,00	8	0	0,00	8	0	0,00	16	0	-
5.	Kereta tempelan	-	-	-	2	0	0,00	2	0	0,00	2	2	100,00	52	52	100
	Jumlah	15.949	13.395	83,99	15.945	12.357	77,50	10.794	8.170	75,69	4.810	3.926	81,62	34.756	32.643	93,92

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010



➤ Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaanyang terjadi. Pada tahun 2010, jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang adalah 139. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada tahun 2009, yaitu sebanyak 152 unit. Jumlah ini hanya 1,23 %-nya dari jumlah rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia di jalan-jalan Kabupaten Bandung. Demikian pula pada tahun 2008 jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas hanya mencapai 3,52 % dari 12.400 rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tersedia.

Tabel 2.38
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas	437	152	139

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

8. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Pada tahun 2009 Kabupaten Bandung hanya mempunyai 1 (satu) buah TPSA yaitu TPSA Babakan, yang terletak di Desa Babakan - Kecamatan Ciparay. Jumlah total timbulan sampah yang dihasilkan adalah sebanyak lk 6.983 m³ per hari. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai lk 6.452 m³ per hari. Dari jumlah tersebut, yang tertangani/terangkut ke TPSA hanya sebesar 560 m³ per hari (8,02 %). Dengan demikian masih tersisa sampah sebesar 6.423 (91,98 %) yang belum terangkut/terbuang ke TPSA.

Berikut disajikan data tentang kondisi persampahan di Kabupaten Bandung secara lengkap dalam kurun waktu tahun 2006-2009.



Tabel 2.39
Persentase Volume Sampah Yang Tertangani di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2006 ^{*)}	2007 ^{*)}	2008	2009	2010
1.	Jumlah volume sampah yang tertangani (m ³)	860	970,84	483	560	560
2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m ³)	8.322	8.322	6.452	6.983	6.983
3.	Persentase	10,33	11,67	7,49	8,02	8,02

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2009.

Catatan : *) Tahun 2006 dan 2007 masih belum terbentuk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2009 sudah terpisah dengan Kabupaten Bandung Barat

➤ Rasio tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) per satuan penduduk

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 39 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 117 m³. Dengan kondisi ini dapat diketahui bahwa sampah yang dihasilkan oleh 1.000 orang jumlah penduduk Kabupaten Bandung hanya dapat ditampung pada 0,0037 m³. Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya rasio daya tampung TPSS terhadap jumlah penduduk mencapai 0,0048 m³ pada tahun 2006 dan 0,0046 m³ pada tahun 2007 serta 0,0036 m³ pada tahun 2008.

Tabel 2.40
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah TPSS (unit) *	47	47	38	39	41
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (m ³)	141	141	114	117	246
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,0048	0,0046	0,0036	0,0037	-

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.



*) Lokasi TPS ada di pasar dan pabrik

- Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per satuan penduduk

Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA menggunakan truk pengangkutan sampah. Berikut disajikan data mengenai perbandingan truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.41
Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah Terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Truk Pengangkut Sampah (unit) *	55	55	55	55	57
2.	Jumlah Daya Tampung Truk (m ³)	350	350	350	350	362
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
4.	Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah terhadap Jumlah penduduk	1:54.446	1:55.237	1:56.555	1:57.253	1:58:464

Sumber : Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Tahun 2010.

9. Pertanahan

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum adanya data terkait persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bandung.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Pertumbuhan Penduduk

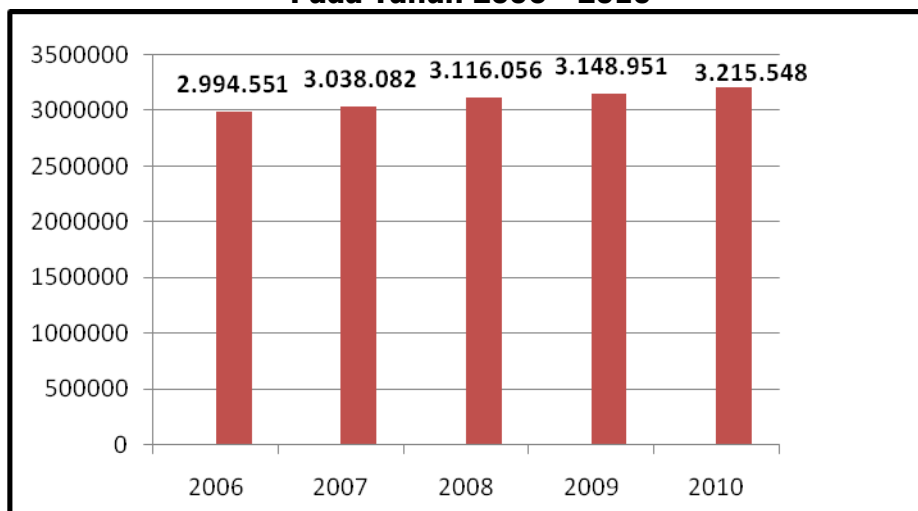
Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.



Total jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 3.215.548, meningkat 2,07% dari jumlah penduduk tahun 2009, yaitu 3.148.951 jiwa. Jumlah tahun 2009 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu : meningkat 1,05 % bila dibandingkan tahun 2008, meningkat 2,5 % bila dibandingkan dengan tahun 2007, dan meningkat 1,4 % bila dibandingkan tahun 2006.

Berikut disajikan grafik mengenai pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Gambar 2. 12
Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010



Sumber : BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010)

➤ Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Bila dilihat selama kurun waktu 4 tahun (tahun 2006-2010), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah rata-rata mengalami peningkatan, peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah) selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.42
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah
di Kabupaten Bandung Tahun 2006 - 2010

No.	Kepemilikan	2006	2007	2008	2009	2010
1.	KTP					
a.	Sudah Memiliki	125.955	1.524.005	1.872.488	2.161.004	2.269.054
b.	Belum Memiliki	1.353.158	1.212.942	823.454	707.178	742.536
2.	KK					
a.	Sudah Memiliki	81.199	189.260	405.105	532.085	558.689
b.	Belum Memiliki	676.575	606.496	411.727	353.589	371.268
3.	Akte Kelahiran					
a.	Sudah Memiliki	399.386	436.018	466.848	507.428	649.228
b.	Belum Memiliki	2.343.462	2.367.689	2.684.589	2.822.230	2.705.375
4.	Akte Nikah (Non Muslim)					
a.	Sudah Memiliki	4.150	4.550	4.930	5.330	5.597
b.	Belum Memiliki	1.600	1.200	820	420	441

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Tahun 2010.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta

Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta.

Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Bandung pada lembaga pemerintah hanya mencapai 1,84 % pada tahun 2010. Angka ini tetap bila dibandingkan dengan tahun 2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2008 tetapi meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Adapun jumlah pekerja perempuan pada lembaga swasta mencapai 98,16 % pada tahun 2010. Angka ini sama halnya dengan jumlah pekerja perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah, yaitu jumlah pekerja perempuan yang bekerja pada lembaga swasta pada tahun 2009, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008, tetapi menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007.



Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Bandung yang bekerja pada lembaga pemerintah dan swasta selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.43
Jumlah Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swasta di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	14.080	10.158	11.138	11.053
2.	Jumlah pekerja perempuan di lembaga Swasta	805.011	575.231	558.190	590.392
3.	Jumlah total pekerja perempuan	819.091	585.389	569.328	601.445
4.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1,72	1,74	1,96	1,84
5.	Persentase pekerja perempuan di lembaga Swasta	98,28	98,26	98,04	98,16

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2009.

➤ Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga. Jumlah kejadian KDRT di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 15 rumah tangga dari 885.674 rumah tangga. Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 9 KDRT dari 816.831 rumah tangga. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa rasio KDRT mencapai 0,00169 pada tahun 2009 dan 0,00110 pada tahun 2008. Data lengkap tentang rasio kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Rasio KDRT di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006-2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah KDRT	-	-	9	15
2.	Jumlah Rumah Tangga	757.594	782.127	816.832	885.674
3.	Rasio KDRT	-	-	0,11%	0,17%

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2009 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda tahun 2006-2009).



12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Berkaitan dengan hal di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak dalam keluarga di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010 rata-rata berjumlah 2-3 orang anak.

Tabel 2.45
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluargadi Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah anak	2.212.780	2.012.492	2.069.296	2.149.953
2.	Jumlah keluarga	757.594	782.127	816.832	885.674
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3	2-3	2-3	2-3

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2009 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2009).

➤ Rasio akseptor KB

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Bandung cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Bandung mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Bandung saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 455.807 peserta dari 627.110 pasangan usia subur. Jumlah ini menurut bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008. Adapun rasio akseptor KB terhadap jumlah pasangan usia subur selama kurun waktu tahun 2006-2010 masing-masing adalah 75,36; 75,16; 75,80 dan 78,84. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah PUS	804.423	553.630	575.767	600.609	627.110



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	606.184	416.092	436.405	473.550	455.807
3.	Jumlah Tidak Ber-KB	198.239	137.538	149.362	127.059	171.303
4.	Rasio Akseptor KB	75,36	75,16	75,80	78,84	82,01

Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (Suseda Tahun 2006-2010).

13. Sosial

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan sosial salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Rasio Tempat Ibadah

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

Jumlah mesjid di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 4.430 unit, adapun jumlah pemeluknya sebanyak 2.818.810 jiwa. Rasio mesjid terhadap jumlah pemeluknya adalah 1 : 636. Ini artinya bahwa 1 mesjid digunakan oleh lk. 636 jiwa pemeluknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Rasio Tempat Ibadah di Kabupaten Bandung

No.	Bangunan tempat Ibadah	2009		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Mesjid	4.430	2.818.810	1 : 636
2.	Gereja	20	37.248	1 : 37.248
3.	Pura	1	2.472	1 : 2.472
4.	Vihara	1	1.483	1 : 1.483
5.	Kelenteng	-	-	-
6.	Lain-Lain	-	-	-
	Jumlah	4.452	2.860.013	-

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Bandung tahun 2010.



14. Ketenagakerjaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Rasio daya serap tenaga kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang terserap pada 528 PMA/PMDN berjumlah sebanyak 201.646 orang. Penyerapan tenaga kerja ini lebih tinggi 0,06 % bila dibandingkan dengan tahun 2008. Namun rasio penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah PMA/PMDN pada tahun 2009 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), di mana rasio penyerapan tenaga kerja pada tahun 2006 mencapai 397 : 1, pada tahun 2007 mencapai 426 : 1, pada tahun 2008 mencapai 383 : 1 dan pada tahun 2009 mencapai 381 : 1. Hal ini berarti pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 397 orang per PMA/PMDN, pada tahun 2007 terserap sebanyak 426 orang per PMA/PMDN, tahun 2008 terserap 383 orang per PMA/PMDN dan tahun 2009 terserap 381 per PMA/PMDN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Bandung
Tahun 2006- 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	227.015	200.187	201.525	201.646	203.306
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	572	469	525	528	552
3	Rasio daya serap tenaga kerja terhadap jumlah perusahaan PMA/PMDN	397 : 1	426 : 1	383 : 1	381 : 1	368 : 1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.

➤ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar



kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Pada tahun 2008 TPAK laki-laki di Kabupaten Bandung mencapai 60,22 % dan perempuan mencapai 53,50 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2007, namun lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2006. Adapun tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2008 mencapai 16,72 %. Angka ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK dan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010 berdasarkan jenis kelamin.



Tabel 2.49
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Bandung
Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2006-2010

No	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	ANGKATAN KERJA										
	a. Bekerja	847.699	787.206	598.180	575.231	576.933	558.190	632.627	692.303	632.124	691.753
	b. Pengangguran	202.778	193.107	143.124	137.244	120.430	112.032	123.920	85.616	99.869	92.904
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	1.050.477	980.313	741.304	712.475	697.363	670.222	756.547	777.919	731.993	784.657
	Rasio Bekerja	0,81 : 1	0,80 : 1	0,81 : 1	0,81 : 1	0,83 : 1	0,83 : 1	0,84 : 1	0,89 : 1	0,86 : 1	0,88 : 1
2	BUKAN ANGKATAN KERJA										
	a. Sekolah	207.071	166.537	112.712	108.287	101.722	97.964	201.217	177.960	267.771	236.823
	b. Mengurus RT	70.610	92.159	89.308	244.635	81.324	216.795	115.163	264.271	149.226	342.435
	c. Lainnya	19.100	16.727	290.995	280.422	277.583	267.723	280.075	270.126	50.968	306.501
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	296.781	275.423	493.015	633.344	460.629	582.482	596.455	712.357	467.965	885.759
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	1.347.258	1.255.736	1.234.319	1.345.819	1.157.992	1.252.704	1.229.082	1.404.660	1.100.089	1.577.512
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	77,97	78,07	60,06	52,94	60,22	53,50	61,55	55,38	66,54	49,74
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	19,30	19,70	19,31	19,26	17,27	16,72	16,4	11,01	13,6	11,84

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.



➤ Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja) untuk para pencari kerja.

Kesempatan kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 menurut lapangan usaha mencapai 1.323.877orang. Angka ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009. Kesempatan kerja terbesar berada pada lapangan usaha pertanian, disusul dengan lapangan usaha industri pengolahan serta perdagangan, restoran dan hotel.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah penduduk yang memperoleh kesempatan kerja di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010 menurut lapangan usaha.

Tabel 2.50
Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010

No.	Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian	731.205	278.455	267.455	425.031	425.541
2	Industri pengolahan	494.056	318.816	308.418	373.763	375.632
3	Bangunan	19.540	88.475	85.596	64.537	79.536
4	Perdagangan, Restoran dan Hotel	167.202	237.968	230.212	211.794	213.298
5	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	62.156	101.970	98.643	87.590	77.775
6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan	10.944	11.617	11.226	11.262	11.296
7	Jasa	161.913	133.065	128.734	141.237	134.259
8	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)	19.242	5.045	4.861	9.716	6.540
	Jumlah	1.666.258	1.175.411	1.135.145	1.324.930	1.323.877

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung tahun 2010.

15.Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :



➤ Persentase koperasi aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Jumlah koperasi aktif pada tahun 2010 sebanyak 782 koperasi. Bila dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah koperasi ini meningkat sebesar 0,58 %, yaitu dari 49,59 % pada tahun 2008 menjadi 50,17 % pada tahun 2009, pada tahun 2010 menjadi 51,31 %.

Tabel 2.51
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah koperasi aktif	-	-	730	747	782
2	Jumlah koperasi	1.323	1.391	1.472	1.489	1.524
3	Persentase koperasi aktif	-	-	49,59	50,17	51,31

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011.

➤ Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Pada tahun 2010, jumlah UKM di Kabupaten Bandung mencapai sebanyak 5.614 UKM. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2010).

Tabel 2.52
Jumlah UKM non BPR/LKM di Kabupaten Bandung
Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah seluruh UKM	3.921	4.287	4.482	5.414	5.614

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2010 dan BPS Kabupaten Bandung (KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2008-2009)



➤ Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran sebagai transaksi jasa (payment service) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya.

Tabel 2.53
Jumlah BPR/LKM di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah BPR	31	49	49	49
2.	- Koperasi	41	41	41	76

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011 dan BPS Kabupaten Bandung (KBDA Kabupaten Bandung Tahun 2008-2009)

16. Penanaman Modal

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kabupaten Bandung.

Upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam mencari modal dalam negeri dan modal asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 28 investor, yaitu terdiri dari 9 investor dalam negeri dan 19 investor asing. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana



jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 30 investor. Data jumlah investor asing dan dalam negeri yang berinvestasi di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Jumlah Investor				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	PMDN	2	3	5	5	9
2.	PMA	6	19	12	25	19
3.	Total	8	22	17	30	28

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2011.

➤ Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah realisasi proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 11 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp 3.401.003.149,2. Jumlah realisasi ini lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah investasi yang disetujui, yaitu 28 proyek sebesar Rp 1.882.376.683,7. Bila dibandingkan dengan investasi pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah investasi pada tahun 2009 menurun sebesar 73,92 % bila dibandingkan dengan tahun 2008 dan menurun 70,94 % bila dibandingkan dengan tahun 2007.

Tabel 2.55
Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung
Tahun 2006- 2010

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2006	–	–	–	–
2007	28	1.151.199.749,00	21	308.486.784,80
2008	34	877.033.716,00	16	343.628.770,00
2009	22	682.269.594,00	13	89.634.094,00
2010	28	1.882.376.683,7	11	3.401.003.149,2

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung, Tahun 2011.



17. Kebudayaan

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Bandung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 37 set, adapun jumlah seni dan budaya yang telah diselenggarakan sebanyak 16 kali pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2007-2008 seni dan budaya diselenggarakan sebanyak 8 kali. Selanjutnya jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 198 unit, dari jumlah tersebut yang dilestarikan sebanyak 62 unit (31,31 %). Jumlah yang dilestarikan pada tahun 2009 lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2007-2008).

Tabel 2.56
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010

No.	Uraian	Sarana dan Penyelenggaraan Seni & Budaya				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (set)	37	37	37	37	37
2.	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya (kali)	8	8	8	16	16
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	62	62	62	62	62
	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	89	89	89	89	89
	Persentase Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	69,66	69,66	69,66	31,31	31,31

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tahun 2010.

18. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.



Banyaknya jumlah organisasi olahraga menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Pada tahun 2010 jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bandung sebanyak 68 buah. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2006 – 2009.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 45 buah, jumlah ini meningkat tetap bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009.

Tabel 2.57
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olah Raga
di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	47	53	58	67	68
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	40	42	42	42	45

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung, Tahun 2010.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja merupakan aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2010 jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung sebanyak 88 orang. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2008. Rasio ketersediaan jumlah pamong praja tahun 2009 sebesar 0,27. Ini artinya dari 10.000 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung baru tersedia polisi pamong praja sebanyak 27 orang. Data tentang rasio jumlah polisi pamong praja di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.58
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Pol PP	60	89	104	96	88
2.	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,20	0,29	0,33	0,30	0,27

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2010.

➤ Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memelihara ketentraman/ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 mencapai 22,80. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2009 tersedia jumlah Linmas sebanyak 22-23 orang. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2006 rasio Linmas mencapai 40,39, pada tahun 2007 mencapai 31,05 dan pada tahun 2008 mencapai 25,07. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Linmas	11.896	9.434	7.838	7.235	5.520
2.	Jumlah Penduduk	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Rasio jumlah	40,39	31,05	25,07	22,80	17,17



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	Linmas per 10.000 penduduk					

Sumber : Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.

➤ Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

Jumlah pos siskamling di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 4.476 buah, adapun jumlah desa dan kelurahan sebanyak 276 desa/kel. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah pos siskamling di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebesar 1 : 16. Ini artinya ketersediaan jumlah pos siskamling yang ada pada setiap desa/kelurahan sebanyak 16 buah. Rasio ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007, yang masing-masing mencapai 1 : 21. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Rasio Pos Siskamling di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Pos Siskamling	5.767	5.772	4.587	4.476	4.476
2.	Jumlah Desa dan kelurahan	275	275	276	276	276
3.	Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan	1 : 21	1 : 21	1 : 16	1 : 16	1 : 16

Sumber : Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :



➤ Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan krusial yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat di dalam mengakses pelayanan dasar yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kemampuan daya beli. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 186.631 rumah tangga atau 21,07 % terhadap total jumlah rumah tangga. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2007-2008), di mana pada tahun 2007 jumlah rumah tangga miskin mencapai 184.638 rumah tangga (23,60 %) dan pada tahun 2008 mencapai 186.631 rumah tangga (22,65 %).

Selanjutnya, presentase rumah tangga di atas garis kemiskinan pada tahun 2009 mencapai 78,93 %. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2007-2008, di mana pada tahun 2006 presentase rumah tangga di atas garis kemiskinan mencapai 76,39 % dan pada tahun 2008 mencapai 77,34 %.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai angka kemiskinan dan presentase penduduk miskin di atas garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.61
Persentase Rumah Tangga (RT) Miskin di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2007	2008	2009
1.	Jumlah RT Miskin	184.638	185.064	186.631
2.	Total RT	782.127	816.832	885.674
3.	Angka Kemiskinan	23,61	22,66	21,07
4.	Persentase RT di atas Garis Kemiskinan	76,39	77,34	78,93

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Tahun 2007-2009.

➤ Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA

Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bandung telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.62
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Penegakan Perda					
a.	Jumlah Pelanggaran Perda	74	89	80	82	22
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	74	89	80	82	22
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penegakan K3					
a.	Jumlah Pelanggaran K3	12	18	12	12	10
b.	Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	12	18	12	12	10
c.	Persentase Penyelesaian Penegakan K3	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Tahun 2010.

➤ Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.

Berkaitan hal tersebut di atas, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun ini telah disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur di dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.



Tabel 2.63
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006- 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat :					
	- Ada			√	√	√
	- Tidak Ada	√	√			

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010.

21. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketahanan pangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Bandung dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 513.856 ton, dengan jumlah konsumsi oleh 3.215.548 jiwa penduduk sebanyak 308.688 ton (65,32 %). Jumlah ketersediaan pangan utama dan jumlah penduduk tahun 2010 meningkat bila dibandingkan tahun 2006-2009. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.64
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bandung
Tahun 2006- 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (ton/GKG)	405.323	397.656	412.877	472.565	513.856
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.945.174	3.038.082	3.127.008	3.172.860	3.215.548
3.	Jumlah Konsumsi Pangan Utama (ton)	428.026	295.575	295.575	308.688	312.841



No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
4.	Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama terhadap Ketersediaan Pangan Utama (ton)	105,60	74,33	71,59	65,32	60,88

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2010.

➤ Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada Pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu : UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; dan sebagainya. Namun Pemerintah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2009 belum mempunyai peraturan perundang-undangan/regulasi terkait dengan ketahanan pangan, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Regulasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006- 2009

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	v	V	v	v	V
2.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada :					
	- Ada					
	- Tidak Ada	v	V	v	v	V

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Tahun 2010.



22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Kelompok Binaan LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bandung tahun 2010 sebanyak 276 kelompok, adapun jumlah LPM sebanyak 276 LPM, dengan demikian rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah sebanyak 1 kelompok. Jumlah ini tetap bila dibandingkan dengan tahun 2008-2009, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 - 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Kelompok Binaan LPM di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah LPM	440	275	276	276	276
2.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	440	275	276	276	276
3.	Rata-rata kelompok Binaan LPM per LPM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2010.

➤ Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.



Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK.

Jumlah PKK di Kabupaten Bandung tahun 2010 sebanyak 55.633 anggota, dengan Jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 4.960 kelompok. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari : Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah 0,089 kelompok per anggota PKK. Ini artinya bahwa setiap 100 PKK aktif di Kabupaten Bandung mempunyai 8,9 \approx 9 kelompok binaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67
Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Kader PKK	50.697	224.112	113.244	76.214	55.633
	Jumlah Kader PKK Aktif	50.697	224.112	113.244	76.214	55.633
	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	4.069	4.328	4.550	4.933	4.960
3.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	0,08	0,019	0,04	0,065	0,089

Sumber : BPMPD Kabupaten Bandung Tahun 2010.

➤ Jumlah LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

Jumlah LSM di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 215 LSM, dari jumlah tersebut yang tidak aktif sebanyak 103 LSM, dengan demikian jumlah LSM aktif sebanyak 112 LSM. Jumlah LSM aktif ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-



tahun sebelumnya (2006-2009). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68
Jumlah LSM Aktif di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah LSM terdaftar	112	113	121	165	215
2.	Jumlah LSM aktif	67	71	76	88	112
3.	Jumlah LSM tidak aktif	45	42	45	77	103

Sumber : Seksi Politik Dalam Negeri ; Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.

23. Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan statistik salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Ketersediaan Dokumen Statistik

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Salah satu dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009.

Tabel 2.69
Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
1.	PDRB	√		√		√		√		√	
2.	IPM	√		√		√		√		√	



No.	Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
3.	Suseda	√		√		√		√		√	
4.	Kabupaten Bandung Dalam Angka	√		√		√		√		√	
5.	Indeks Gini Ratio		√		√	√			√		√
6.	Input Output		√		√	√			√		√
7.	IKM		√		√	√		√		√	
8.	IHK		√		√		√		√		√

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010.

24. Kearsipan

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Pengelolaan Arsip secara Baku

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan secara baku. Berdasarkan data dari SKPD pengelola arsip, dari 79 SKPD di Kabupaten Bandung pada tahun 2006-2010, sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah SKPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	79	79	79	79	79
2.	Jumlah SKPD	79	79	79	79	79
3.	Persentase SKPD yang telah	100	100	100	100	100



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	Menerapkan Arsip secara Baku					

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung Tahun 2010.

➤ Peningkatan SDM Pengelola Arsip Terpadu

Mengelola arsip memerlukan teknik/cara mengelola arsip yang baik, benar dan terpadu. Hal ini bisa didapat melalui pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip. Jumlah SDM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 79 orang, dari jumlah tersebut yang telah mendapatkan pelatihan baru sebanyak 60 orang atau sekitar 75,95 %. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008, namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 dan 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Pengelola Arsip Terpadu di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang Diperlukan	79	79	79	79
2.	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	79	79	30	60
3.	Persentase SDM Pengelola Arsip yang telah Melakukan Pelatihan	100	100	37,97	75,95

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2009.

25. Komunikasi dan Informatika

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan komunikasi dan informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi. Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, *mobile*, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses,



mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Bandung terdiri dari : akses internet, sistem informasi, hotspot, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2009, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kabupaten Bandung sebanyak 44 SKPD, jumlah sistem informasi sebanyak 50 unit, jumlah titik hotspot sebanyak 9 titik, jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi sebanyak 5 buah serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 6 unit. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008) jumlah sarana/ prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang mengalami peningkatan hanya ketersediaan akses internet, di mana pada tahun 2006-2007 jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet sebanyak 37 SKPD, pada tahun 2008 sebanyak 34 SKPD dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 44 SKPD yang telah memiliki akses internet. Sarana/prasarana lainnya tidak mengalami peningkatan, bahkan jumlah radio komunikasi yang aktif mengalami penurunan, dari sebanyak 21 radio yang aktif pada tahun 2006-2007 menurun menjadi 6 radio yang aktif pada tahun 2008-2009.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah sarana/prasarana komunikasi dan informasi yang tersedia di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.72
Jumlah Ketersediaan Sarana/Prasarana Teknologi
Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 - 2009

No	Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informasi	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	37	37	34	44
2	Jumlah sistem informasi yang ada	-	-	50	50
3.	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemda	-	-	9	9
4.	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	4	4	5	5
5.	Jumlah radio komunikasi yang aktif	21	21	6	6

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2009.

26. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :



➤ Jumlah perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Selama kurun waktu tahun 2006-2010, Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik Pemda, namun jumlah perpustakaan bukan milik Pemda (perpustakaan desa) sebanyak 138 perpustakaan.

Tabel 2.73
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemda	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda (Desa)	-	-	138	138
3.	Total Perpustakaan	-	-	139	139

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2009.

➤ Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

Jumlah pengunjung ke perpustakaan milik Pemda Kabupaten Bandung pada tahun 2009 dapat diketahui sebanyak 9.405 orang. Jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2008, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007 jumlah pengunjung ini mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	6.558	3.226	10.738	9.405



2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non Pemda	-	-	-	-
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	6.558	3.226	10.738	9.405

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2009.

➤ Jumlah Kendaraan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses bahan pustaka yang ada di Perpustakaan milik Pemda, saat ini Pemerintah Kabupaten telah menyediakan kendaraan yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling, namun jumlahnya sejak tahun 2007-2009 baru sebanyak 3 unit. Selain itu telah tersedia pula kendaraan layanan internet dan motor pintar, masing-masing berjumlah 1 unit.

Dengan adanya kendaraan perpustakaan keliling, kendaraan layanan internet dan motor pintar diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses perpustakaan serta akan memberikan nilai tambah bukan saja sebagai peningkatan pengetahuan, namun akan mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian.

Tabel 2.75
Jumlah Kendaraan Perpustakaan di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2007	2008	2009
1.	Jumlah mobil unit perpustakaan keliling	3	3	3
2.	Jumlah mobil layanan internet	1	1	1
3.	Jumlah motor pintar	1	1	1

Sumber : BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tahun 2009

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu:

1. Pertanian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :



- Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Produktivitas padi di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 6,12 ton/ha. Produktivitas ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009), di mana pada tahun 2006 produktivitas padi mencapai 5,60 ton/ha, tahun 2007 mencapai 5,83 ton/ha, dan tahun 2008 mencapai 5,86 ton/ha.

Produktivitas sayuran pada tahun 2010 mencapai 141,06 kwt/ha, bila dibandingkan dengan tahun 2007-2009 produktivitas ini meningkat, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006 produktivitas tersebut menurun, di mana pada tahun 2006 produktivitas sayuran mencapai 36,38 ton/ha.

Produktivitas buah-buahan pada tahun 2010 mencapai 0,85 kw/pohon, produktivitas ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009, di mana pada tahun 2006 produktivitas buah-buahan mencapai 0,44 kw/pohon dan pada tahun 2009 mencapai 0,59 kw/pohon.

Produktivitas tanaman hias pada tahun 2010 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2007-2008. Pada tahun 2009 produktivitas tanaman hias mencapai 12,49 tangkai/m² sedangkan pada tahun 2007 dan 2008, masing-masing mencapai 2,71 tangkai/m² dan 5,68 tangkai/m².

Produktivitas perkebunan pada tahun 2010 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009). Pada tahun 2010 produktivitas perkebunan mencapai 1,16 ton/ha sedangkan tahun 2006-2009 masing-masing mencapai 6,42 ton/ha, 2,32 ton/ha, 2,16 ton/ha dan 1,16 ton/ha.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.76
Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan,
Tanaman Hias dan Perkebunan di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	70.827	70.522	74.676	75.772	84.232
	Luas Panen (ha)	72.338	68.176	70,453	78.522	84.020
	Produksi (ton)	405.323	397.657	412.877,00	472.564	513.856
	Produktivitas (ton/ha)	5,60	5,83	5,86	6,02	6,12
2.	Palawija					
	Luas Tanam				24.265	26.863



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	(ha)	20.614	21.405	21.018		
	Luas Panen (ha)	18.942	15.544	15.781	20.615	26.826
	Produksi (ton)	346.189	317.945	325.713	429.737	569.233
	Produktivitas (ton/ha)	18,28	20,45	20,63	20,84	21,21
3.	Sayuran					
	Luas Tanam (ha)	26.087	41.089	25.139	22.007	20.155
	Luas Panen (ha)	28.964	39.328	31.096	34.619	20.746
	Produksi (ton)	949.171	911.926	559.753	696.840	464.872
	Produktivitas (ton/ha)	24,14	26,34	18,00	33,56	22,41
4.	Buah-buahan					
	Luas Tanam (pohon)	113.855	156.002	305.218	266.700	200.700
	Luas Panen (pohon yg menghasilkan)	500.702	486.680	540.071	447.699	623.406
	Produksi (kw)	219.566	232.304	304.705	266.532	532.874
	Produktivitas (kw/pohon)	0,44	0,47	0,56	0,59	0,85
5.	Tanaman Hias					
	Luas Tanam (M ²)	8.281	50.908	86.044	187.841	182.231
	Luas Panen (M ²)	22.753	20.700	115.682	115.544	44.597
	Produksi (tangcai)	157.745	137.763	488.425	426.962	400.259
	Produktivitas (tangcai/M ²)	19,05	2,71	5,68	4,06	12,49



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
6.	Perkebunan					
	Luas Tanam (ha)	3453	10.175	10.805	11.097	13.643
	Luas Panen (ha)	2.871	3.209	4.706	5.030	7.482
	Produksi (ton)	22.181	23.603	23.348	23.367	34.849
	Produktivitas (ton/ha)	6,42	2,32	2,16	2,11	1,16

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, tahun 2011.

➤ Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kabupaten Bandung memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 3.471.661.920.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 1.602.050.010.000,00. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2009 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21.734.661.190.000,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Persentasentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 sebesar 7,532 % berdasarkan harga berlaku dan 7,371 % berdasarkan harga konstan. %tase kontribusi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 7,359 % berdasarkan harga berlaku dan 7,316 % berdasarkan harga konstan. Namun tidak demikian bila dibandingkan dengan tahun 2006.

Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2006. Di mana pada tahun 2006 %tase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai 7,572 % dan berdasarkan harga konstan mencapai 7,586 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.77
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian					
	- ADH Berlaku	2.228.624,63	2.465.321,20	2.728.755,88	3.013.007,10	3.471.661,92
	- ADH Konstan	1.338.248,71	1.371.807,73	1.426.244,50	1.502.003,49	1.602.050,01
2.	Jumlah PDRB					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB					
	- Atas Dasar Harga Berlaku	7,572	7,399	7,128	7,359	7,532
	- Atas Dasar Harga Konstan	7,586	7,342	7,249	7,316	7,371

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

➤ Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu

Pada tahun 2010 jumlah produksi daging mencapai **45.352.413** kg, adapun jumlah konsumsi daging mencapai **10,27** kg/kapita/th. Jumlah produksi tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 produksi daging mencapai **40.912.117** kg dan konsumsi daging **9,5** kg/kapita/th, peningkatan jumlah konsumsi tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bandung.

Konsumsi telur di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai **2,33** kg/ kapita/th, dengan jumlah produksi sebanyak **8.398.280** kg. Jumlah konsumsi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), yaitu konsumsi telur pada tahun 2006 mencapai **1,66** kg/kapita/th, pada tahun 2007 mencapai **1,62** kg/kapita/th dan pada tahun 2008 mencapai **1,74** kg/kapita/th. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi pada setiap tahunnya (2006-2010).

Konsumsi susu di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai **8,84** kg/kapita/tahun, sementara konsumsi susu nasional adalah sebesar **6,10** kg/kapita/tahun, sehingga telah melebihi batas standar konsumsi susu nasional. Jumlah konsumsi tahun 2010 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2007-2009,



namun menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006, di mana pada tahun 2007 jumlah konsumsi susu mencapai 6,90 kg/kapita/th, pada tahun 2008 mencapai 8,38 kg/kapita/th sedangkan pada tahun 2006 mencapai 8,93 kg/kapita/th. Sama halnya dengan jumlah konsumsi, jumlah produksi pun pada tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah produksi dan konsumsi daging, telur dan susu di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.78
Jumlah Produksi dan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Daging :					
	Produksi (kg)	36.981.506	37.558.487	39.275.391	40.912.117	45.352.413
	Konsumsi (kg/kapita/th)	8,38	8,98	9,48	9,49	10,5
2.	Telur :					
	Produksi (kg)	5.835.482	5.853.768	5.881.985	7.128.159	8.398.280
	Konsumsi (kg/kapita/th)	1,66	1,62	1,74	2,08	2,33
3.	Susu :					
	Produksi (kg)	56.313.186	55.034.482	57.171.658	59.534.141	60.247.543
	Konsumsi (kg/kapita/th)	8,93	6,90	8,38	8,62	8,84

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2011.

2. Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Tingkat kerusakan hutan sekarang ini menyebabkan keprihatinan yang besar bagi semua pihak. Praktek **illegal logging** dan **illegal trading**, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan serta pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (GRHLK) merupakan salah satu upaya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu dengan peran semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain) melalui mobilisasi sumber daya.



Luas penanaman kawasan hutan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 263,75 ha. Bila dibandingkan dengan tahun 2008, luasan penanaman ini mengalami peningkatan, namun bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Luasan penanaman di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 seluas 3.356,01 ha, pada tahun 2007 seluas 2.028,70 ha dan pada tahun 2008 seluas 224,12 ha. Dari luasan tersebut telah seluruhnya dilakukan rehabilitasi.

Luas lahan kritis di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 mencapai 21.130,00 ha, pada tahun 2007 mencapai 15.330,60 ha dan pada tahun 2008 mencapai 9.056,19 ha. Terhadap lahan kritis tersebut, setiap tahunnya telah dilakukan upaya rehabilitasi, yaitu pada tahun 2006 dilakukan rehabilitasi sebesar 27,45 %, pada tahun 2007 sebesar 15,50 % dan pada tahun 2008 sebesar 48,79 %, tahun 2009 telah dilakukan upaya rehabilitasi seluas 15,91 %, namun demikian hasil perhitungan melalui citra satelit dari Balai Pengelolaan DAS luasan lahan kritis pada tahun 2010 mencapai 59.969,39 Ha, hal ini mengindikasikan laju kerusakan hutan lebih tinggi daripada laju penanaman kembali.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.79
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	Jenis	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Luas hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi (ha)	LK	5.799,40	2.375,50	4.418,36	1.084,50	2.493,12
		HN BS	3.307,61	1.918,50	182,72	168,62	263,75
		HN BU	48,40	110,20	41,40	140,40	-
		HN BS + HN BU	3.356,01	2.028,70	224,12	309,02	263,75
	TOTAL		9.155,41	4.404,20	4.642,48	1.393,52	2.756,87
2.	Total luas hutan dan lahan kritis (ha)	LK	21.130,00	15.330,60	9.056,19	6.814,72	59.969,39
		HN BS	3.307,61	1.918,50	182,72	168,62	263,75
		HN BU	48,40	110,20	41,40	140,40	-
		HN BS + HN BU	3.356,01	2.028,70	224,12	309,02	263,75
	TOTAL		24.486,01	17.359,30	9.280,31	7.123,74	60.233,14
3.	Persentase Luas	LK	27,45	15,50	48,79	15,91	8,8



No.	Uraian	Jenis	2006	2007	2008	2009	2010
	hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	HN BS, HN BS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		LK, HN BS, HN BU	37,39	25,37	50,03	19,56	8,1

Sumber : BPDAS Citarum Tahun 2011.

Ket :

LK=Lahan Kritis,

HN BS = Hutan Kawasan Bandung Selatan,

HN BU = Hutan Kawasan Bandung Utara

➤ Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 mencapai 11,71 % dari 60.844,90 ha. %tase ini lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2008), di mana pada tahun 2006 kerusakan kawasan hutan mencapai 38,06 % dari 64.340,39 ha, pada tahun 2007 mencapai 26,12 % dari 66.456,83 ha, dan pada tahun 2008 mencapai 15,82 % dari 58.645,83 ha.

Tabel 2.80
Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	Jenis	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Luas Kawasan Hutan Yang Rusak	HN BS	3.307,61	1.918,50	182,72	168,62	263,75
		HN BU	48,40	110,20	41,40	140,40	-
	TOTAL		3.356,01	2.028,70	224,12	309,02	263,75
2.	Total Luas Kawasan Hutan	HN BS	36.893,54	36.893,54	36.893,54	34.458,95	34.458,95
		HN BU	2.053,31	2.053,31	2.053,31	1.983,40	1.983,40
		HK	9.784,98	9.784,98	9.784,98	9.784,98	9.784,98
	TOTAL		48.731,83	48.731,83	48.731,83	46.227,33	46.227,33
3.	Persentase Luas Kawasan Hutan yang Rusak		38,06	26,12	15,82	11,71	-

Sumber : BPDAS Citarum Tahun 2011



Ket :

HN BS = Hutan Kawasan Bandung Selatan,

HN BU = Hutan Kawasan Bandung Utara,

HR = Hutan Rakyat,

HK = Hutan Konservasi

➤ Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 15.162.760.000,00 (0,033 %) dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 7.283.050.000,00 (0,034 %). Persentase kontribusi sektor kehutanan pada tahun 2009 tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008. Pada tahun 2006 persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mencapai 0,035 %. Pada tahun tahun 2007 mencapai 0,034 % berdasarkan harga berlaku dan mencapai 0,035 % berdasarkan harga konstan. pada tahun 2008 mencapai 0,033 % berdasarkan harga berlaku dan 0,035 % berdasarkan harga konstan selanjutnya pada tahun 2009 berdasarkan harga berlaku mencapai 0.034 %, dan berdasarkan harga konstan mencapai 0,034 %.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.81
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Kehutanan					
	- ADH Berlaku	10.221,70	11.329,44	12.573,69	13.865,99	15.162,76
	- ADH Konstan	6.196,40	6.599,07	6.813,63	7.072,11	7.283,05
2.	Jumlah PDRB					
	- ADH Berlaku	29.431.046,0 6	33.319.630,76	38.289.735,1 2	40.941.217,9 8	46.092.238,7 2
	- ADH Konstan	17.640.170,0 9	18.683.930,04	19.673.732,6 1	20.529.643,2 4	21.734.661,1 9
3.	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan thd PDRB					
	- ADH Berlaku	0,035	0,034	0,033	0,034	0,033
	- ADH Konstan	0,035	0,035	0,035	0,034	0,034

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).



3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

- Energi
 - Beberapa potensi energi di Kabupaten Bandung yang dapat dimanfaatkan antara lain:
 - (a). Energi panas bumi (geothermal)
 - (b). Energi Mikrohidro
 - (c). Energi Biogas
 - (d). Energi matahari (surya)
 - (e). Energi bahan bakar nabati (limbah organik)

Adapun perincian jenis-jenis energi non fosil tahun 2006-2010 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.82
Jenis-jenis Potensi Energi Non Fosil Tahun 2006-2010

No	Jenis Energi	Potensi	Tahun				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	Panas Bumi:	1480 MW	427 MW	427 MW	427 MW	427 MW	427 MW
	a) Kamojang		200 MW	200 MW	200 MW	200 MW	200 MW
	b) Wayang Windu		227 MW	227 MW	227 MW	227 MW	227 MW
	c) Penerimaan DBH (Rp. Miliar)		163			51,9	59,5
2	Mikrohidro	20 MW	0	0	0	0	0
3	Biogas (Biodigester)	10.000 unit	43 Unit	74 Unit	256 Unit	450 Unit	1041 Unit
4	Matahari	Tidak Terbatas	0	0	0	0	150 unit SHS
5	Bahan bakar nabati (Bioetanol)	500 liter/bulan	0	0	0	0	1 Unit (20 liter/bulan)

Penerimaan DBH Panas Bumi, khusus Tahun 2006-2008 diakumulasikan sebesar Rp 163.076.396.752 berdasarkan Kepmen ESDM no 1944K/30/Men/2009, sedangkan tahun 2009 dan 2010 penerimaan DBH dialokasikan setiap tahun.

Adapun perincian rasio elektrifikasi tahun 2008-2010 ditampilkan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.83

Rasio Elektrifikasi Tahun 2006-2010

No	Perincian	Tahun		
		2008	2009	2010
1	Rumah Tangga	756,368	766,983	773,053
2	Pelanggan	409,122	426,137	446,486
3	RE (%) Dinamis	54.090	55.560	57.756
	RE (%) Statis	59.030		

➤ **Sumberdaya Mineral
Pertambangan**

Keberadaan sumberdaya mineral di Kabupaten Bandung adalah berupa andesit, tanah urug dan emas yang tersebar di kecamatan Margaasih, Baleendah, Nagreg, Kutawaringin, Pameungpeuk dan Banjaran dengan jumlah perusahaan yang melaksanakan produksi sebanyak 22 perusahaan dengan luas lahan 119,17 ha. Dari jumlah tersebut, hanya 15 perusahaan yang aktif. Potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Bandung selain andesit dan tanah urug, juga terdapat potensi emas yang sebagian besar berada di Kecamatan Kutawaringin. Kondisi pengeolaan potensi ini adalah masih dilakukan dengan pertambangan rakyat.

Pengelolaan oleh perusahaan bahan galian di Kabupaten Bandung dilakukan dengan mengedepankan konservasi dan penggalian potensi untuk peningkatan PAD. Untuk pengendalian dan pembinaan dilakukan dengan perijinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

Luas penambangan tanpa izin di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 33,33 ha, dari luasan ini yang berhasil ditertibkan seluas 12,68 ha (38,03 %). Sehingga pada tahun 2010, luas penambangan tanpa izin mencapai 20,755 ha. Dari luasan tersebut telah dilakukan penertiban seluas 16,755 ha (80,73 %). Langkah penanganan yang telah dilakukan adalah dengan pendekatan dan mendorong kepada para pengusaha yang belum berijin untuk mengikuti prosedur perijinan yang ditetapkan.

Tabel 2.84
Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Luas penambangan tanpa izin yang ditertibkan (ha)			10	12,68	16,755
2.	Total luas penambangan tanpa izin (ha)			41,33	33,33	20,755
3.	Persentase Luas penambangan liar yang ditertibkan			24,20	38,03	80,73

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Tahun 2011.



➤ Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Pada tahun 2010 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 580.783.810.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 282.922.470.000,00. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21.734.661.190.000,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa %tase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2009 sebesar 1,260 % berdasarkan harga berlaku dan 1,302 % berdasarkan harga konstan.

Persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 1,28 %. Demikian pula berdasarkan harga konstan, %tase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2010 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2009.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.85
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 - 2010

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian :					
	- ADH Berla ku	368.568,14	419.179,41	468.303,80	526.035,13	580.783,81
	- ADH Konst an	234.570,64	208.909,19	255.888,73	269.782,12	282.922,47
2.	Jumlah PDRB					
	- ADH Berla ku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konst an	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian thd PDRB					
	- ADH Berla ku	1,252	1,258	1,223	1,285	1,260
	- ADH	1,330	1,118	1,301	1,314	1,302



No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Konstan					

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

Kegeologian

Kondisi wilayah Kabupaten Bandung yang pegunungan, dataran tinggi maupun pedataran menjadi menimbulkan daerah ini mempunyai kerentanan potensi gerakan tanah/longsor terutama di lahan dengan kemiringan lereng yang curam. Ditambah dengan kondisi geologi yaitu litologi maupun struktur geologi yang beragam menambah potensi terjadinya bencana geologi berupa gerakan tanah/longsor maupun gempa.

Keterkaitan dengan potensi gerakan tanah di Kabupaten Bandung, telah dilaksanakan dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya gerakan tanah/longsor. Tercatat terdapat 22 kecamatan yang terdapat potensi bencana geologi/ gerakan tanah. Sampai dengan tahun 2011, telah dilaksanakan pemetaan dan inventarisasi daerah yang berpotensi terjadinya gerakan tanah, yaitu Kecamatan Kertasari, Arjasari dan Rancabali. Hal ini menyebabkan masih adanya Kecamatan yang belum terpetakan lahan yang mempunyai potensi gerakan tanah/longsor.

Namun demikian, penanganan kejadian bencana gerakan tanah/longsor telah dilakukan dengan upaya mitigasi dan sosialisasi kepada warga yang terkena gerakan tanah/longsor untuk menghindari kerugian jiwa maupun material. Penanganan gerakan tanah /longsor dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik vertikal (pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat) maupun instansi di Kabupaten Bandung.

Sumberdaya Air Tanah

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari cekungan air tanah Bandung-Soreang mengikuti prinsip pengelolaan 'One basin one management'. Menurut hasil penelitian dari Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral disebutkan bahwa potensi jumlah air tanah yang terkandung dalam cekungan air tanah Bandung Soreang adalah 368,5 juta m³/tahun. Dari jumlah total tersebut diperkirakan kebutuhan air di wilayah cekungan Bandung-Soreang yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut adalah sebesar 312,75 juta m³.

Dengan kebutuhan air yang banyak tersebut maka diperlukan suatu penanganan dan manajemen yang pengelolaan air tanah yang tepat agar di menjadi cepat habis. Langkah yang telah diambil dalam pengendalian jumlah air tanah adalah dengan melalui ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Diharapkan dengan adanya ijin dapat terkendainya pengambilan air tanah sesuai dengan kajian yang telah ditetapkan, sehingga upaya konservasi dan pemenuhan kebutuhan air terjalin seimbang.



Upaya konservasi juga dilakukan dengan mewajibkan seluruh pengambil air tanah untuk menyediakan sumur serapan dalam agar jumlah air yang diambil dapat terisi kembali oleh adanya sumur resapan dalam tersebut. Selain itu juga, upaya konservasi dilakukan dengan membagi zonasi kondisi air tanah yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan zonasi tersebut diharapkan dapat diketahui dan dijaga kondisi dimana pengambilan air tanah pada zona kritis dibatasi.

4. Pariwisata

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Kunjungan Wisata

Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Bandung sejak tahun 2009-2010 sebanyak 53 obyek. Jumlah kunjungan ke-53 obyek wisata tersebut sebanyak 4.607.330 orang pada tahun 2010. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2008), di mana pada tahun 2006 jumlah yang berkunjung ke-49 obyek sebanyak 2.463.366 orang, pada tahun 2007 sebanyak 3.340.875 orang, pada tahun 2008 sebanyak 4.306.602 orang dan pada tahun 2009 sebanyak 5.458.218 orang yang berkunjung ke 53 obyek. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata sebanyak 50.273 orang pada tahun 2006, sebanyak 68.181 orang pada tahun 2007, sebanyak 87.890 orang pada tahun 2008, sebanyak 111.392 orang pada tahun 2009 dan sebanyak 123.869 orang pada tahun 2010.

Tabel 2.86
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah obyek wisata (obyek)	49	49	49	49	53
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	2.463.366	3.340.875	4.306.602	5.458.218	6.069.539
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	50.273	68.181	87.890	111.392	123.869

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2011.

➤ Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sektor pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor jasa-jasa (termasuk jasa pariwisata) terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 2.434.375,72 (5,28 %) dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 1.056.862,46 (4,86 %). Bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009 persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku cenderung mengalami peningkatan.



Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.87
Kontribusi Sektor Jasa-jasa (Termasuk Jasa Pariwisata)
Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 -2010

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Jasa-Jasa (Termasuk Jasa Pariwisata)					
	- ADH Berlak u	1.499.027,98	1.721.159,87	1.936.315,52	2.173.715,40	2.434.375,72
	- ADH Konst an	856.789,53	911.462,80	955.207,67	1.000.817,32	1.056.862,46
2.	Jumlah PDRB					
	- ADH Berlak u	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konst an	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB					
	- ADH Berlak u	5.09	5.17	5.06	5.28	5,28
	- ADH Konst an	4.86	4.88	4.86	4.87	4,86

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

5. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kelautan dan perikanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan

Produksi ikan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 tercatat sebanyak **8.122** ton. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2006-2009). Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2010 mencapai **20,26** kg/perkapita/tahun. Jumlah ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung, di mana pada tahun 2006 jumlah konsumsi ikan mencapai 15,67 kg/kapita/tahun, pada tahun 2007 mencapai 16,10 kg/kapita/tahun,



tahun 2008 mencapai 17,23 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2009 mencapai 18,73 kg/kapita/tahun

Berikut secara lengkap disajikan data tentang jumlah produksi dan konsumsi ikan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009.

Tabel 2.88
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Produksi Ikan (ton)					
	- Target	7.661	7.335	7.331	7.696	8.108
	- Realisasi	6.653	7.099	7.336	7.719	8.122
2.	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	15,67	16,10	17,23	18,73	20,26
3.	Persentase Konsumsi Ikan terhadap Realisasi Produksi	15,72	15,75	14,68	13,74	15,78

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun 2011.

➤ Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Sektor perikanan merupakan bagian dari sektor pertanian. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 92.464,590.000,00 (0,209%) dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 38.226.500.000,00 (0,175%). Bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009 persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mengalami penurunan.

Berikut adalah data lengkap mengenai kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.89
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Perikanan					
	- ADH Berla ku	64.870,69	73.860,48	80.476,17	85.747,04	92.464,59
	- ADH Konst an	32.459,58	33.834,19	34.838,21	36.003,62	38.226,50
2.	Jumlah PDRB					
	- ADH Berla ku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konst an	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan thd PDRB					
	- ADH Berla ku	0,220	0,222	0,210	0,209	0,220
	- ADH Konst an	0,184	0,181	0,177	0,175	0,184

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).

6. Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai Rp 456.850.398,57. Nilai ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2008. Penurunan paling besar terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 40,14 % yaitu dari Rp 678.528.610,67 pada tahun 2007 menjadi Rp 406.188.974,51 pada tahun 2009.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.90
Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Nilai Ekspor	619.866.460 ,86	678.528.610 ,67	507.346.266, 81	406.188.97 4,51	456.850.398 ,57
3.	Nilai Ekspor Bersih (Nilai Ekspor – Nilai Impor)	619.866.460 ,86	678.528.610 ,67	507.346.266, 81	406.188.97 4,51	456.850.398 ,57

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011.

- Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian. Pada tahun 2010 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 7.796.200.550.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 3.474.795.780.000,00. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 46.092.238.720.000,00 dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 21.734.661.190.000,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung tahun 2010 sebesar 16,914% berdasarkan harga berlaku dan 15,987% berdasarkan harga konstan, prosentase kontribusi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009), yaitu prosentase kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga berlaku mencapai 15,062%, pada tahun 2007 mencapai 15,342%, pada tahun 2008 mencapai 15,684% dan pada tahun 2009 mencapai 16,561%, prosentase kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2006 berdasarkan harga konstan mencapai 14,881%, pada tahun 2007 mencapai 15,092%, pada tahun 2008 mencapai 15,222% dan pada tahun 2009 mencapai 15,642%.

Berikut disajikan data secara lengkap mengenai kontribusi sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.91
Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran)
Terhadap PDRB Kabupaten Bandung Pada Tahun 2006 - 2010

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran)					
	- ADH Berlaku	4.432.799,58	5.112.043,54	6.005.197,92	6.780.385,10	7.796.200,55
	- ADH Konstan	2.625.092,39	2.819.715,77	2.994.763,36	3.211.263,99	3.474.795,78
2.	Jumlah PDRB					
	- ADH Berlaku	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konstan	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) Terhadap PDRB					
	- ADH Berlaku	15,062	15,342	15,684	16,561	16,914
	- ADH Konstan	14,881	15,092	15,222	15,642	15,987

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).



7. Perindustrian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

➤ Pertumbuhan Industri

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan. Total jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2009, yaitu dari 722 industri menjadi 741 industri pada tahun 2010. Peningkatan ini terjadi pada industri kecil, dimana pada tahun 2008 berjumlah 331 industri dan pada tahun 2010 berjumlah 374 industri.

Tabel 2.92
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Jenis Industri	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Besar	50	78	109	141	152
2.	Menengah	104	143	180	213	215
3.	Kecil	244	306	331	368	374
Jumlah		398	527	620	722	741

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011

Gambar 2.12
Grafik Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 – 2010



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2011



➤ Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Sektor perindustrian di Kabupaten Bandung berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun 2010 %tase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai 59.601 % dan berdasarkan harga konstan mencapai 60,611 %. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2006-2009) %tase kontribusi sektor ini mengalami penurunan baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. %tase kontribusi sektor perindustrian pada tahun 2006-2009 berdasarkan harga berlaku masing-masing sebesar 60,739 %; 60,487 %, 60,788 % dan 59,601 % dan berdasarkan harga konstan mencapai 61,444 %; 61,436 %, 61,556 % dan 60,002 %.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.93
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 -2010

No	Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Kontribusi Sektor Perindustrian					
	- ADH Berlak u	17.876.119,11	20.154.147,70	23.275.745,49	24.721.851,70	27.471.535,02
	- ADH Konst an	10.838.753,39	11.478.643,51	12.110.396,65	12.517.223,96	13.173.587,93
2.	Jumlah PDRB					
	- ADH Berlak u	29.431.046,06	33.319.630,76	38.282.169,45	41.201.900,67	46.092.238,72
	- ADH Konst an	17.640.170,09	18.683.930,04	19.674.494,55	20.527.539,56	21.734.661,19
3.	Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB					
	- ADH Berlak u	60,739	60,487	60,788	60,002	59,601
	- ADH Konst an	61,444	61,436	61,556	60,982	60,611

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).



8. Ketrasmigrasian

Urusan transmigrasi merupakan urusan pilihan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Program yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung terkait urusan transmigrasi adalah pembekalan keterampilan calon transmigrasi, peninjauan kawasan transmigrasi baru di luar Pulau Jawa, penempatan dan monitoring transmigran yang telah ditempatkan. Pada tahun 2009, terdapat 4 (empat) Kabupaten di Kalimantan Barat yang telah dijajaki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagai daerah tujuan transmigrasi yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kurubaya.



2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kabupaten Bandung terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita/ angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan (pangan dan non pangan)), dan produktivitas total daerah.

➤ Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pada tahun 2009 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bandung mencapai Rp 334.757,00, terdiri dari : bahan pangan sebesar Rp 211.395,00 dan non pangan sebesar Rp 123.362,00. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2006-2007, di mana pada tahun 2006 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan baik pangan maupun non pangan sebesar Rp 217.616,00 dan pada tahun 2007 sebesar Rp 333.830. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Per Bulan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2009 (Rupiah)

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Pengeluaran rata-rata RT per kapita sebulan (pangan)	124.562	157.610	211.395	211.395
2.	Pengeluaran rata-rata RT per kapita	93.054	176.220	123.362	123.362



No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
	sebulan (non pangan)				
3.	Jumlah pengeluaran RT per kapita sebulan (pangan dan non pangan)	217.616	333.830	334.756	334.757

Sumber : PDRB Kabupaten Bandung, 2006-2009

2.4.2 Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Sektor/lapangan usaha di Kabupaten Bandung yang menunjang PDRB Kabupaten Bandung terdiri dari 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, yaitu : pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, sewa dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa. Dari ke-9 sektor/lapangan usaha tersebut, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor/lapangan usaha industri pengolahan, disusul kemudian oleh sektor/lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran. Sektor/lapangan usaha yang kontribusinya paling kecil adalah sektor/lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Pada tahun 2010 kontribusi sektor/lapangan usaha industri pengolahan mencapai Rp 27.471.535,020.000,00 (59.601 %), angka ini menurun bila dibandingkan dengan kurun waktu tahun 2006-2009 dengan rata-rata mencapai 60 %. Berbeda dengan sektor/lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, sektor ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2006-2009, di mana pada tahun 2010 sektor/lapangan usaha ini berkontribusi sebesar Rp 7.796.200,550.000,00 (16.91 %) sedangkan pada kurun waktu tahun 2006-2009 rata-rata hanya mencapai 15 %.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah per sektor/lapangan usaha (ADH berlaku) di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.



Tabel 2.95
Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 – 2010 (dlm jutaan rupiah)

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2006		2007		2008		2009		2010	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	PDRB	29.431.046,0 6		33.319.630,7 6		38.282.169, 45		41.201.900, 67		46.092.238,72	
1.1	Pertanian	2.228.624,62	7,57	2.465.321,20	7,40	2.728.755,8 8	7,19	3.013.007,1 0	7,36	3.471.661,92	7,53
1.2	Pertambangan & Penggalian	368.568,14	1,25	419.179,42	1,26	468.303,80	1,22	526.035,13	1,28	580.783,81	1,26
1.3	Industri Pengolahan	17.876.119,1 1	60,74	20.154.147,7 0	60,49	23.275.745, 49	60,79	24.721.851, 70	60,00	27.471.535,02	59,60
1.4	Listrik, Gas & Air bersih	524.707,23	1,78	588.412,88	1,77	642.658,74	1,68	674.520,69	1,65	741.188,33	1,61
1.5	Konstruksi	506.056,81	1,72	571.271,13	1,71	648.394,06	1,69	696.720,83	1,70	764.990,68	1,66
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran	4.432.799,58	15,06	5.112.043,54	15,34	6.005.197,9 2	15,68	6.780.385,1 0	16,56	7.796.200,55	16,91
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	1.360.838,71	4,62	1.566.528,90	4,70	1.783.920,5 0	4,61	1.795.161,7 7	4,38	1.933.148,22	4,19
1.8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	634.303,86	2,16	721.566,11	2,17	792.877,54	2,07	820.502,95	2,00	898.354,49	1,95
1.9	Jasa-jasa	1.499.027,98	5,09	1.721.159,87	5,17	1.936.315,5 2	5,06	2.173.715,4 0	5,05	2.434.375,72	5,28

Sumber : BPS Kabupaten Bandung (PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010).



2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

➤ Fasilitas bank dan non bank

Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi : bank konvensional dan bank syariah. Pada tahun 2009, jumlah bank umum di Kabupaten Bandung seluruhnya berjumlah 89 unit, terdiri dari : 81 unit bank umum konvensional dan 8 unit bank umum syariah. Adapun jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) seluruhnya berjumlah 24 unit, ke-24 unit tersebut adalah BPR konvensional.

Tabel 2.96
Jenis, Jumlah Bank Serta Cabangnya
di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2009
1.	Bank Umum	89
1.1.	Konvensional	81
1.2.	Syariah	8
2.	BPR	24
2.1.	Konvensional	24
2.2.	Syariah	-
Jumlah		-

Sumber : *Bagian Perekonomian – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2009.*

➤ Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan salah satunya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah makan. Selama kurun waktu 2006-2010 jumlah restoran dan rumah makan yang berhasil di data oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung belum banyak mengalami perubahan terutama pada tahun 2007-2010. Pada tahun 2006 jumlah restoran di Kabupaten Bandung sebanyak 6 restoran sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 378 rumah makan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 40 restoran dan 467 rumah makan pada tahun 2007-2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.97
Jumlah Restoran dan RumahMakan di Kabupaten Bandung
Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jenis Usaha Restoran	6	40	40	40	40
2.	Jenis Usaha Rumah Makan	378	467	467	467	467

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2011.

➤ Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah. Banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan ketersediaan penginapan salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel/penginapan.

Pada tahun 2010, jumlah penginapan di Kabupaten Bandung sebanyak 29 buah, terdiri dari : hotel bintang 3 sebanyak 2 unit dan hotelnon bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) sebanyak 27 unit. Kondisi ini sama dengan kondisi tahun 2007-2009, namun tidak demikian dengan kondisi tahun 2006. Pada tahun 2006 total jumlah pengipanan di Kabpaten Bandung sebanyak 60 unit, terdiri dari : hotel bintang 4 sebanyak 1 unit, hotel bintang 3 sebanyak 3 unit dan hotelNon bintang (hotel melati dan penginapan lainnya) sebanyak 56 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Hotel Bintang 5	-	-	-	-	-
2.	Hotel Bintang 4	1	-	-	-	-
3.	Hotel Bintang 3	3	2	2	2	2
4.	Hotel Bintang 2	-	-	-	-	-
5.	Hotel Bintang 1	-	-	-	-	-
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	56	27	27	27	27
7.	Total Jumlah	60	29	29	29	29



	Penginapan/Hotel					
--	------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bandung Tahun 2011.

2.4.4 Iklm Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bandung.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, peraturan daerah (perda) yang mendukung iklim usaha dan status desa (persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa).

➤ Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Data lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Bandung disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 99
Angka Kriminalitas di Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Kasus Narkoba	2	0	0	0	0
Jumlah Kasus Pembunuhan	16	12	1	6	2
Jumlah Kejahatan Seksual	0	13	2	0	0
Jumlah Kasus Penganiayaan	0	31	0	0	3
Jumlah Kasus Pencurian	6	67	2	0	4
Jumlah Kasus Penipuan	0	25	2	0	0
Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
Total Jumlah Kriminal	24	148	7	6	9
Jumlah Penduduk	2994551	3038082	3116056	3148951	3125548
Angka Kriminalitas	0.000801456	0.004871	0.000225	0.000191	0.000288

Sumber : Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.



➤ Jumlah Demonstrasi

Jumlah investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah dipengaruhi oleh keamanan suatu daerah, yang salah satu indikatornya adalah jumlah demonstrasi. Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Data lengkap tentang jumlah demonstrasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2006 – 2010 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.100
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bandung Tahun 2006 – 2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Demonstrasi Bidang Politik	1	-	6	9	3
2	Demonstrasi Ekonomi	5	2	10	13	3
3	Kasus Pemogokan Kerja	22	18	29	18	5
	Total Demonstrasi/Unjuk Rasa	28	20	45	40	11

Sumber : Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2010.

➤ Kemudahan perizinan

Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

Jenis perizinan yang ditangani Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 11 jenis perizinan, terdiri dari : izin usaha perdagangan (SIUP), izin tempat usaha (SITU), TDP, IUI, TDI, IMB, HO, , IPT, izin reklame, IPLC dan izin jasa konstruksi. Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut serta jumlah persyaratan dan biaya resmi dalam mengurus izin tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101
Lama Proses Perizinan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2010

No.	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
1.	SIUP	5	6	30.000
2.	SITU	5	6	400
3.	TDP	5	5	20.000
4.	IUI	14	10	75.000
5.	TDI	14	5	30.000



No.	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
6.	IMB	60	12	8.000
7.	HO	14	11	250
8.	IPT	14	14	150
9.	Reklame	-	-	-
10.	IPLC	14	13	6.000.000
11.	Jasa Konstruksi	4	12	100.000

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung Tahun 2011.

➤ Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2006-2010.



Tabel 2.102
Jumlah Realisasi serta Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006-2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Pajak Daerah	57.334.770.199,51	54.391.453.802,20	51.654.333.709,60	47.951.110.528,00	59.385.578.062,00
	Pajak Hotel	1.630.296.849,96	2.013.001.546,90	521.130.207,60	481.269.352,00	1.122.094.256,00
	Pajak Restoran	2.935.352.381,30	2.807.585.410,90	2.022.405.964,86	2.486.992.882,00	3.541.972.662,00
	Pajak Hiburan	1.321.309.950,00	1.454.863.194,90	1.822.568.665,00	2.146.174.144,00	2.063.299.025,00
	Pajak Reklame	1.948.182.431,25	1.745.262.742,50	1.818.712.879,50	1.599.992.419,00	2.022.621.402,00
	Pajak Penerangan Jalan	48.500.375.392,00	45.447.027.174,00	45.332.157.472,64	41.035.282.809,00	50.234.236.814,00
	Pajak Pengam-bilan dan Pengolahan Bahan Galian C	965.155.295,00	890.939.233,00	61.134.120,00	64.681.980,00	108.188.999,00
	Pajak Parkir	34.097.900,00	32.774.500,00	76.224.400,00	136.716.942,00	293.164.904,00
2.	Retribusi	40.907.499.229,32	44.750.349.784,97	36.067.479.245,10	40.870.885.107,00	60.370.841.839,00
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	30.401.111.973,00	33.210.256.240,00	29.122.980.499,00	32.380.883.654,00	50.640.948.750,00



No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	2.270.582.638,00	2.324.125.975,00	1.609.269.878,00	1.840.236.134,00	2.451.180.000,00
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	8.235.804.618,32	9.215.967.569,97	5.335.228.868,10	6.649.765.319,00	8.022.691.887,00

Sumber : DPPK Kabupaten Bandung Tahun 2011.



➤ Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha meliputi : Perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Berikut adalah gambaran ketersediaan perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2009.

Tabel 2.103
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usahadi Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006-2009

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	-	1	-	-
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	3	7	4	4
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	-	-	1	1

Sumber : *Bagian Hukum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.*

➤ Status Desa (Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa)

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan statusnya, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang).

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah desa/kelurahan swadaya, swakarya, dan swasembada di Kabupaten Bandung tahun 2008-2009.

Tabel 2.104
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa
di Kabupaten Bandung

No.	Uraian	2008	2009	2010
1.	Jumlah Desa/Kelurahan	97	97	97



No.	Uraian	2008	2009	2010
	Swadaya			
2.	Jumlah Desa/Kelurahan Swakarya	104	104	104
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Swasembada	75	75	75
4.	Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3)	276	276	276
5.	Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4)	27,17	27,17	27,17

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum – Setda Kabupaten Bandung Tahun 2010.

2.4.5 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kondisi aspek daya saing daerah Kabupaten Bandung terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

➤ Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.



➤ Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependencyratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratiomaka* semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Bandung selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.105
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bandung
Pada Tahun 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Rasio ketergantungan	51.81	51.93	52,19	48,95	54.10

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2010



BAB III

ANALISIS ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya *gap* ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan RPJP Kabupaten Bandung, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Perumusan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah. Rumusan permasalahan pembangunan ini menjadi dasar penyusunan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung dalam jangka waktu 20 tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan dampak penerapan konsep desentralisasi. Di Indonesia, desentralisasi mulai dilaksanakan sejak tahun 1999 dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2007, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan desentralisasi berarti adanya pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah daerah otonom terbagi atas 2, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

Urusan wajib, menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic need*) masyarakat di daerah tersebut. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib meliputi 26 urusan. Permasalahan pembangunan terkait urusan wajib pada dasar



disebabkan karena pemerintah daerah kurang optimal dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dijabarkan dalam Lampiran.



1. **Bidang Pendidikan**

Dalam rangka peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Bandung. salah satu sektor yang harus diperhatikan adalah sektor pendidikan, melalui indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, rasio guru, cakupan layanan pendidikan, sarana prasarana pendidikan dan lain-lain, dapat terlihat upaya perbaikan yang dilakukan dalam urusan pendidikan ini. Besarnya porsi anggaran yang disiapkan dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui pendidikan, terutama perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan dasar diharapkan dapat memperkuat terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Permasalahan: Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sektor pendidikan di Kabupaten Bandung pada tahun 2009/2010 mengalami perbaikan dan peningkatan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia, tetapi masih perlu dilakukan peningkatan untuk mencapai/melampaui standar nasional. Beberapa permasalahan pembangunan pada bidang pendidikan di Kabupaten Bandung adalah :

- Tingginya angka putus sekolah, permasalahan ini juga terbukti dari rendahnya jumlah siswa SD/MI yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs, dan rendahnya jumlah siswa SD/MI yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/MA/SMK.
- Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
- Masih rendahnya akses masyarakat kepada layanan pendidikan.

2. **Kesehatan**

Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), pos kesehatan desa (poskesdes) maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus ditingkatkan keberadaan dan kualitasnya agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan adalah angka harapan hidup. Bila dilihat dari data, angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan ini belum mencapai standar yang telah ditetapkan di Indonesia. Untuk meningkatkan angka harapan hidup ini, Pemda Kabupaten Bandung perlu meningkatkan pelaksanaan program pembangunan kesehatan, pembangunan sosial serta pemberantasan kemiskinan. Program ini mencakup sosialisasi tentang tingkat kecukupan gizi dan kalori, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan.

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio posyandu dan puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten telah melampaui standar nasional. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan bayi dan masyarakat di desa/kecamatan. Namun, rasio rumah sakit masih belum memenuhi standar. Kurangnya keberadaan rumah sakit dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab masih rendahnya angka harapan hidup di Kabupaten Bandung.



Permasalahan:

- Masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bandung
- Kurangnya jumlah rumah sakit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung.
- Kurangnya jumlah rasio ketersediaan Pustu dan Puskesmas terhadap jumlah penduduk.

3. **Pekerjaan Umum**

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kualitas dan kondisi jalan. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 395,56 km, 34,24 % dari panjang jalan total di Kabupaten Bandung. Hal ini perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan akses, pertumbuhan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain jalan, infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Panjang jaringan irigasi Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sepanjang 1.044,81 km. Panjang jaringan irigasi ini tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2007, dan tidak sebanding dengan pertambahan kebutuhan penduduk akan ketersediaan beras. Kuantitas dan kualitas jaringan irigasi perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan ketahanan (swasembada) pangan, terutama beras di Kabupaten Bandung.

Permasalahan:

- Rendahnya persentase panjang jaringan jalan Kabupaten Bandung yang berada dalam kondisi baik. Masih tingginya angka kerusakan jaringan jalan di Kabupaten Bandung perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi.
- Belum terkendalinya banjir di Kabupaten Bandung

4. **Perumahan Rakyat**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian beserta fasilitas penunjangnya. Hingga tahun 2010, hanya 81,84 % luas permukiman di Kabupaten Bandung yang telah tertata. Hal ini berarti kawasan permukiman yang belum tertata dan dilengkapi dengan sarana prasarana standar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut masih cukup luas. Perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman perlu diupayakan secara berkelanjutan melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pencapaian MDG's.

Persentase kawasan permukiman yang layak huni di Kabupaten Bandung hanya 4,5 %, namun persentase rumah (individual dan terorganisir) yang dinyatakan layak huni cukup baik, yaitu 85 %. Kondisi layak huni yang dimaksud dalam hal ini adalah



memenuhi standar dan kriteria perencanaan perumahan di lingkungan perkotaan, yaitu SNI 03-1733-2004. Beberapa indikator untuk menyatakan layak hunian sebuah rumah adalah adanya akses air bersih dan sistem sanitasi. Rumah tinggal yang telah memiliki sanitasi di Kabupaten Bandung, pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 98,47%, dan 95,84 % rumah di Kabupaten Bandung telah memiliki akses terhadap air bersih. Angka ini merupakan pencapaian yang cukup baik, karena hampir seluruh rumah tinggal di Kabupaten Bandung dilayani oleh jaringan utilitas.

Permasalahan :

- Belum optimalnya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Bandung.
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman

5. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam rangka menciptakan keterpaduan serta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang efisien dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu kawasan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyeimbangkan penggunaan ruang perkotaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diatur bahwa suatu kawasan harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayahnya, dimana 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH private.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Bandung pada tahun 2010, sebesar 26,13%. Hal ini berarti, RTH Kabupaten Bandung belum memenuhi target nasional. Perlu dilakukan peningkatan ketersediaan RTH, karena RTH merupakan faktor yang berperan penting bagi perkembangan kawasan dan kesejahteraan masyarakat. RTH memiliki beberapa 2 fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial-ekonomi. Fungsi ekologis RTH adalah meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan mengatur iklim mikro di kawasan tersebut. Fungsi sosial-ekonomi RTH adalah sebagai ruang interaksi sosial, sebagai sarana rekreasi serta sebagai lambang (*landmark*) suatu kawasan.

Perizinan merupakan salah satu proses pengendalian penataan ruang. Dengan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB), pemerintah mengontrol jumlah dan lokasi bangunan sehingga sesuai dengan arahan RTRW. Persentase bangunan yang memiliki IMB di Kabupaten Bandung tahun 2010 tergolong cukup rendah, yaitu 0.3%. Jumlah ini perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang efektif dan efisien.

Kabupaten Bandung merupakan hulu dari Sungai Citarum. Alih fungsi lahan yang terjadi di sepanjang daerah aliran sungai, menyebabkan terjadinya banjir tahunan di desa-desa di sekitar Citarum. Menurut data dari Kementrian Kehutanan pada tahun 2010, dari 718.000 Ha lahan di sepanjang aliran Sungai Citarum, 78% telah menjadi milik warga dan lahan bekas perkebunan. Selain itu, banjir juga disebabkan karena tidak adanya rehabilitasi lahan dan kawasan hutan di sepanjang aliran sungai. Untuk menangani masalah banjir tahunan ini, Kabupaten Bandung menyusun *grand desain* penanganan kawasan di sepanjang kawasan aliran sungai Citarum.



Permasalahan :

- RTH di Kabupaten Bandung belum memenuhi standar penyediaan RTH, sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007.
- Rendahnya pengendalian dan pengawasan bangunan di Kabupaten Bandung.
- Tingginya perubahan guna lahan di kawasan hulu.
- Belum terwujudnya kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Bandung
- Belum optimalnya peraturan kawasan strategis

6. **Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah didokumentasikan melalui buku-buku rencana yang disusun secara bertahap. Buku-buku rencana tersebut terdiri dari RPJP, RPJM, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, buku rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalisasi) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta mengetahui dan dapat berpartisipasi mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut.

Pada tahun 2010, Kabupaten Bandung belum memiliki RPJP, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang telah dilegalisasi. Namun Pemerintah Kabupaten Bandung telah melegalisasi RPJM dan RKPD. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat dan sektor swasta tidak dapat berpartisipasi dalam rangka menyelaraskan program-program jangka pendek menengah dengan tujuan jangka panjang pembangunan daerah Kabupaten Bandung.

Permasalahan :

- Tidak tersedianya Dokumen RPJP, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang telah dilegalisasi.

7. **Perhubungan**

Baiknya pelayanan pemerintah daerah pada sektor perhubungan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan dan mengurangi kemacetan di daerah tersebut. Pada tahun 2010 jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang sebanyak 152 unit.

Pada tahun 2009 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan baru mencapai 1 : 156. Hal ini berarti belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ideal dalam mengimbangi pertumbuhan kendaraan tiap tahunnya. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Permasalahan :

- Rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung.
- Rendahnya jumlah rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Bandung.



8. Lingkungan Hidup

Salah satu tujuan dilaksanakannya penataan ruang perkotaan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut hasil analisis, pada tahun 2010 sampah yang telah ditangani di Kabupaten Bandung hanya 8,02 %. Hal ini berarti 91, 98 % sampah yang dihasilkan masih menumpuk atau tidak ditangani dengan baik. Angka ini menunjukkan tingginya ketidakseimbangan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung, yang dapat menyebabkan berbagai bencana, seperti banjir, longsor sampah, penularan penyakit melalui sampah kepada manusia dan hewan, dan sebagainya. Rendahnya tingkat penanganan sampah di Kabupaten Bandung disebabkan oleh kurang tersedianya tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) dan akhir (TPSA), sehingga sebagian besar masyarakat membuang sampahnya secara sembarangan. Masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama guna meningkatkan penanganan sampah agar terjadinya bencana tersebut dapat dihindari atau diminimalisasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam aspek lingkungan hidup adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan karena pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Berbagai peraturan dan perundangan di bidang lingkungan hidup mensyaratkan ketentuan teknis dan administrasi yang harus ditaati oleh seluruh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Pengujian terhadap kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh BPLH setiap tahun sejak tahun 2001. Sejak tahun 2009, pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan BPLH. Evaluasi terhadap hasil pengujian ini dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan prioritas penanganannya. Pengujian kualitas air sungai dan udara ambien dilakukan pada titik-titik prioritas yang dievaluasi setiap tahun. Hasil pengujian kualitas air sungai dianalisis menggunakan metode Storet untuk menentukan status mutunya.

Dari pengujian yang dilakukan setiap tahun diperoleh hasil berdasarkan perhitungan menggunakan metode Storet dengan baku mutu air sungai kelas II, 96-99% berstatus mutu "cemar berat" dan hanya 1-4% berstatus "cemar sedang". Adapun parameter yang dominan melampaui baku mutu rata-rata adalah: *fecal coliform*, DO, COD, BOD, TSS, Nitrit, dan beberapa logam berat, yaitu Cu, Zn, dan Cr⁶⁺. Status "cemar berat" ini bahkan terjadi juga pada sungai-sungai di bagian hulu dengan parameter yang umumnya melampaui baku mutu yaitu *fecal coliform*, pada tahun 2010 antara lain S. Cirawa (45.900/0,1 L), S. Ciburial (50.000/0,1 L), S. Cikawao (87.000/0,1L), S. Cibangoak (155.000/0,1), S. Cirasea Hulu (60.000/0,1L), dan Cikacembang Hulu (10.000/0,1L). *Fecal coliform* pada hulu Sungai Citarum umumnya ditemukan di wilayah dimana air limbah dominan berasal dari penduduk dan atau peternakan.

Beberapa lokasi dengan status mutu yang buruk menampung air limbah yang berasal dari kabupaten/kota yang berbatasan wilayah administrasi, seperti S. Cikijing (Kabupaten Sumedang) dan S. Cibaligo Hilir (Kota Cimahi). Dengan demikian, maka selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung juga diperlukan koordinasi dengan



SKPD yang menangani sektor usaha/kegiatan terkait, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air khususnya, dan pengendalian pencemaran lingkungan umumnya.

Permasalahan :

- Masih rendahnya kualitas air sungai
- Menurunnya kualitas udara ambient
- Masih rendahnya penataan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
- Tingginya jumlah sampah yang belum dapat ditangani.
- Kurangnya peran serta masyarakat untuk mengelola sampah lingkungannya sebelum dibuang ke TPSS atau TPSA.
- Kurang tersedianya TPSS dan TPSA yang memadai.

9. **Pertanahan**

Identifikasi masalah pada bidang pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi lahan sebagai kepastian dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Kabupaten Bandung belum memiliki data tentang pertanahan, berupa data administrasi kepemilikan lahan di wilayahnya.

10. **Kependudukan dan Catatan Sipil**

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 meningkat 2,07 % bila dibandingkan tahun 2009. Dalam menilai tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung, indikator yang dapat digunakan adalah jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan akte nikah. Persentase penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 85,4%, kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 60% dan kepemilikan akte kelahiran sebesar 80%. Kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa penduduk tersebut telah terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung sudah cukup baik, namun perlu peningkatan sehingga seluruh penduduk yang tinggal di Kabupaten Bandung terdaftar.

11. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Perlindungan anak diarahkan untuk mewujudkan suatu kondisi yang menjamin hak dan tumbuh-kembang anak Pada tahun 2010, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Bandung masih sangat kecil, yaitu sebesar 1,84%, dan cukup tinggi di sektor swasta yaitu 98,16. Salah satu faktor yang melatarbelakangi perempuan lebih memilih sektor swasta, selain karena terbatasnya kebutuhan pegawai di lembaga pemerintah adalah agar mereka mampu membagi waktu antara bekerja dan mengurus keluarga. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bandung cukup kecil, terjadi pada 15 dari 885.674 rumah tangga (hanya 0,17%).



12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program keluarga berencana (KB) yang digalakkan secara nasional menganjurkan setiap keluarga memiliki 2 (dua) orang anak. Pada tahun 2006-2009, setiap keluarga di Kabupaten Bandung rata-rata berjumlah 2-3 orang anak. Dengan demikian, Kabupaten Bandung dinilai berhasil membantu mensukseskan program yang digalakkan secara nasional, yaitu program KB. Namun agar program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan, program penyuluhan KB hingga ke desa-desa harus semakin digiatkan.

13. Sosial

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi sosial di Kabupaten Bandung adalah rasio jumlah ibadah dengan jumlah pemeluknya. Berdasarkan standar nasional yang telah ditetapkan, yaitu SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan bahwa 1 masjid berfungsi untuk melayani 2.500 penduduk. Pada tahun 2009, rasio masjid per jumlah pemeluk agama di Kabupaten Bandung adalah 1 : 636. Dengan demikian, jumlah masjid yang terdapat di Kabupaten Bandung telah cukup untuk melayani penduduknya. Selain jumlah tempat ibadah, hal yang perlu diperhatikan juga terkait kondisi sosial adalah toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung sehingga tercipta kondisi yang aman dan nyaman dalam beribadah.

14. Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 adalah 53,44 dengan rasio daya serap tenaga kerja terhadap jumlah perusahaan PMA/PMDN adalah 381 : 1. Rasio ketergantungan sebesar 54,10, angka ini berarti 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung menanggung 54 penduduk yang belum/tidak produktif. Rasio ketergantungan di Kabupaten Bandung lebih tinggi bila dibandingkan dengan rasio ketergantungan nasional (yaitu 47 %).

Permasalahan: Sebagian besar permasalahan dalam urusan ketenagakerjaan, berkaitan dengan jenjang pendidikan serta *miss match* antara lulusan dan permintaan tenaga kerja. Secara umum, dapat tergambarkan permasalahannya sebagai berikut:

- Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada perusahaan dalam negeri dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia produktif.
- Rendahnya Tingkat partisipasi angkatan kerja.
- Rendahnya kualitas (terkait pendidikan) masyarakat di Kabupaten Bandung sehingga dinilai kurang mampu bersaing dengan masyarakat yang berasal dari luar Kabupaten Bandung untuk memperoleh pekerjaan.

15. Koperasi dan UKM

Koperasi sebagai salah satu lembaga perekonomian diharapkan sebagai penggerak roda ekonomi di suatu wilayah dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Peran koperasi sangat penting untuk peningkatan potensi usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal, penyedia informasi serta sebagai lembaga distribusi dan pemasaran. Di Kabupaten Bandung pada tahun 2010, hanya 51.31 % koperasi yang aktif untuk melayani 5.614 UKM. Koperasi yang aktif, sebagian besar berupa koperasi simpan pinjam. Jumlah ini dinilai sangat kurang untuk menggerakkan roda ekonomi



serta melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung. Keberadaan koperasi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena dapat meningkatkan jumlah UKM yang berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Disamping itu, perlu juga dikembangkan lembaga ekonomi produktif baik yang syaria'ah maupun konvensional dalam rangka mendukung perekonomian di Kabupaten Bandung.

Permasalahan :

Masih kurangnya jumlah koperasi yang aktif untuk melayani masyarakat Kabupaten Bandung.

16. **Penanaman Modal**

Investasi (penanaman modal) memberikan dampak positif bagi pertumbuhan suatu wilayah dan kesejahteraan penduduk. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (yaitu sebanyak 30 investor). Investor ini terdiri dari 5 investor dalam negeri dan 25 investor asing. Namun menurun bila dibandingkan tahun 2010, yaitu 28 investor. Untuk meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung, pemerintah daerah perlu melakukan promosi tentang potensi daerahnya serta kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada investor. Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi berarti peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung, yang dapat berdampak pada peningkatan daya serap lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

17. **Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Kebudayaan juga merupakan sarana promosi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Pada tahun 2009, hanya 31,31 % benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian budaya, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi atau seminar yang ditujukan kepada masyarakat agar menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan kekayaan Kabupaten Bandung.

Permasalahan :

Masih terdapat 69, 69 % benda, situs dan cagar budaya di Kabupaten Bandung yang tidak atau belum dilestarikan.

18. **Kepemudaan dan Olah Raga**

Jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam menyalurkan aspirasi dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi pemuda yang dimaksud pada bagian ini adalah binaan pemerintah dan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah. Pada tahun 2010, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bandung adalah 68 buah, jumlah ini mengalami peningkatan sejak tahun sebelumnya. Jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan, kemampuan berkompetisi secara sehat dan kemampuan bekerja sama masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah pada bidang olah raga.



Jumlah organisasi kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Bandung masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong para pemuda/i di Kabupaten Bandung agar lebih aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan dan olah raga di wilayahnya.

19. **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menitikberatkan pada kegiatan pembinaan terhadap LSM, Organisasi Masyarakat, OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Pengetahuan politik masyarakat yang mulai meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma sehingga perlu dilakukan peningkatan dan optimalisasi dalam hal pembinaan.

Dalam hal ketertiban dan ketentraman, rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memelihara dan mewujudkan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Di Kabupaten Bandung rasio polisi pamong praja pada tahun 2010 adalah 0,27. Hal ini berarti 100.000 penduduk Kabupaten Bandung, hanya dilayani oleh ±3 polisi pamong praja.

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memelihara dan menegakkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 mencapai 17,17. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Bandung dilayani oleh 17 orang petugas Linmas. Dalam penyediaan pelayanan dan antisipasi bencana kebakaran, di Kabupaten Bandung rasio jangkauan pelayanan mobil pemadam terhadap luas wilayah Kabupaten Bandung adalah sebesar 1 : 25.177 ha, berarti 1 mobil pemadam kebakaran melayani wilayah seluas 25.177 ha. Hal ini menunjukkan kurangnya jumlah mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Bandung.

Permasalahan :

- Masih rendahnya jumlah Polisi Pamong praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- Masih rendahnya Jumlah Linmas untuk memelihara ketentraman/ ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis (untuk setiap 10.000 jiwa penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2009 tersedia jumlah Linmas sebanyak 17 orang)
- Belum memadainya jumlah mobil pemadam kebakaran

20. **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung tahun 2009 mencapai 4,35 % dengan laju inflasi sebesar 3,15%. Peningkatan LPE Kabupaten Bandung hampir seirama dengan peningkatan LPE Nasional yaitu 4,5 %. Menurut Bank Indonesia, laju inflasi Indonesia pada akhir tahun 2009 adalah 2,78 %. Dapat disimpulkan bahwa, laju inflasi Kabupaten Bandung lebih rendah dibandingkan laju inflasi Indonesia. Hal ini berarti kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengontrol tingkat inflasi dinilai cukup baik.



Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi di PDRB (9 sektor), sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan yang paling besar dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu mencapai 7,23 %. Sektor ekonomi lainnya yang juga mengalami pertumbuhan cukup besar adalah sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pertanian. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku meningkat sebesar 5,01 % yaitu dari Rp 12.242.428,00 menjadi Rp 12.856.303,00 di tahun 2009. PDB Nasional per kapita atas harga berlaku, yaitu Rp24.300.000,00. Bila dibandingkan dengan PDB Nasional, PDRB per kapita masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil analisis, 78,93 % rumah tangga di Kabupaten Bandung masih tergolong miskin. Berkaitan dengan perekonomian, proses perijinan serta retribusi yang diatur daerah menentukan perbaikan iklim usaha dan investasi.

Permasalahan:

- Masih rendahnya PDRB per kapita atas harga berlaku Kabupaten Bandung dibandingkan dengan nasional.
- Tingginya persentase rumah tangga miskin di Kabupaten Bandung.

21. **Ketahanan Pangan**

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebanyak 513.856 ton, dengan jumlah konsumsi pangan 308.688 ton. Hal ini berarti persentase jumlah konsumsi pangan utama terhadap ketersediaan pangan utama sebesar 65,32%.

Permasalahan :

- Belum tercapainya distribusi pangan secara merata di Kabupaten Bandung.
- Belum adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung sebagai pedoman tata laksana keamanan, mutu dan gizi pangan di daerah.

22. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) berfungsi sebagai sarana berorganisasi, berbagi informasi, penyaluran aspirasi serta peningkatan pengetahuan/kemampuan untuk masyarakat setempat dalam mendukung pembangunan lingkungannya (RT/RW atau kelurahan). Pada tahun 2010, rata-rata 1 kelompok yang dibina oleh LPM. Jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM. Jumlah ini juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah. Jumlah kelompok yang terlibat dalam LPM perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah (masyarakat) serta pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Pada tahun 2010, terdapat 55.633 anggota PKK yang tergabung dalam 4.960 kelompok. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk



di Kabupaten Bandung, jumlah anggota PKK ini masih tergolong kecil. Hal ini menunjukkan kurangnya keaktifan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan atau kurangnya pelayanan penunjang yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan :

Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam PKK Kabupaten Bandung.

23. **Statistik**

Dokumen statistik suatu daerah dibutuhkan oleh pemerintah (daerah maupun pusat) dalam mendapatkan data kondisi dan perkembangan daerah tersebut secara umum sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan serta rencana tata ruang, bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada tahun 2009, Kabupaten Bandung tercatat belum memiliki data statistik tentang Indeks-Gini Ratio, Input-output dan IHK. Dokumen tersebut perlu segera dilengkapi dan disinkronisasi melalui koordinasi dan kerjasama antar SKPD agar rencana serta kebijakan yang disusun oleh pemerintah tepat sasaran.

Permasalahan : Kurang lengkapnya dokumen statistik, yaitu Indeks-Gini Ratio, Input-Output dan IHK Kabupaten Bandung.

24. **Kearsipan**

Pada tahun 2006-2010, SKPD Kabupaten Bandung berjumlah 79, dan sudah seluruhnya mengelola arsip secara baku. Jumlah SDM yang diperlukan untuk mengelola arsip secara terpadu di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sebanyak 79 orang, dari jumlah tersebut yang telah mendapatkan pelatihan baru sebanyak 60 orang atau sekitar 75,95%. Peningkatan kemampuan pengelolaan arsip mutlak diperlukan dalam Pemerintahan sebagai bagian dari tertib administrasi. Pada bidang kearsipan, Kabupaten Bandung dinilai berhasil mengelola arsip-arsip secara baku. Ketersediaan arsip baku ini memudahkan untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap masing-masing SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

25. **Komunikasi dan Informatika**

Pada tingkat SKPD, Kabupaten Bandung dinilai berhasil dalam menyediakan sarana komunikasi dan informatika, lebih dari 50 % (44 dari 79) SKPD telah memiliki akses internet. Keberadaan sarana komunikasi dan informatika yang memadai di setiap SKPD sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara *up to date* terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana koordinasi internal dan external SKPD di Kabupaten Bandung. Keberadaan sarana ini juga diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Pada tingkat masyarakat, masih terdapat kawasan yang belum terjangkau jaringan komunikasi. Hal ini merupakan masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun kawasan yang kerta raharja.



26. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan milik daerah dapat menunjukkan tingkat pelayanan kepada masyarakat umum dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat umum serta kelangsungan pelayanan pendidikan. Kabupaten Bandung memiliki 2 gedung perpustakaan dan 5 perpustakaan berjalan untuk melayani 31 Kecamatan di wilayahnya. Jumlah ini dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bandung juga dinilai cukup rendah dibandingkan jumlah penduduknya, yaitu 9.405 pengunjung. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas perpustakaan perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang berkualitas. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk memanfaatkan pelayanan berupa perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan, kapabilitas serta kualitas hidupnya.

Permasalahan :

- Kurangnya kuantitas dan kualitas perpustakaan daerah Kabupaten Bandung.
- Kurangnya peran masyarakat Kabupaten Bandung untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.

Tabel 3.1

Permasalahan Kabupaten Bandung Terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah

No	Bidang	Permasalahan
1	Pendidikan	a. Tingginya angka putus sekolah
		b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan.
		c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
		d. Masih rendahnya akses masyarakat kepada layanan pendidikan.
2	Kesehatan	a. Masih rendahnya Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bandung
		b. Kurangnya jumlah rumah sakit bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung.
		c. Kurangnya rasio jumlah ketersediaan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas terhadap jumlah penduduk
3	Pekerjaan Umum	a. Rendahnya persentase panjang jaringan jalan Kabupaten Bandung yang berada dalam kondisi baik.
		b. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi
		c. Belum terkendalinya banjir di Kabupaten Bandung
4	Perumahan Rakyat	a. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman di kabupaten bandung
		b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman
5	Penataan Ruang	a. RTH Kabupaten Bandung belum memenuhi standar penyediaan RTH sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007.
		b. Rendahnya pengendalian dan pengawasan bangunan di kabupaten bandung
		c. Tingginya perubahan guna lahan di kawasan hulu.
		d. Belum terwujudnya kawasan-kawasan strategis di Kab.



No	Bidang	Permasalahan
		Bandung.
		e. Belum optimalnya peraturan kawasan strategis
6	Perencanaan Pembangunan	Tidak tersedianya dokumen RPJP, Renstra SKPD dan Renja SKPD yang dilegalisasi
7	Perhubungan	a. Rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan
		b. Rendahnya jumlah rambu-rambu lalu lintas
8	Lingkungan Hidup	a. Masih rendahnya kualitas air sungai
		b. Menurunnya kualitas udara ambient
		c. Masih rendahnya penataan terhadap peraturan perundangan di Bidang Lingkungan Hidup
		d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan
		e. Masih tingginya kerusakan lahan
		f. Tingginya jumlah sampah yang belum dapat ditangani
		g. Kurangnya peran serta masyarakat untuk mengelola sampah sebelum dibuang ke TPSS atau TPSA
		h. Kurang tersedianya TPSS dan TPSA yang memadai
9	Pertanahan	Belum adanya data tentang pertanahan.
10	Kependudukan dan catatan sipil	Masih rendahnya tingkat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil
11	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Masih diperlukan peningkatan penyuluhan tentang keluarga berencana hingga ke daerah pedesaan.
13	Sosial	Masih diperlukan peningkatan kerukunan umat beragama dan antar suku di Kabupaten Bandung.
14	Ketenagakerjaan	a. Rendahnya penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif.
		b. Rendahnya TPAK.
		c. Rendahnya daya saing masyarakat dalam memperoleh pekerjaan.
15	Koperasi dan UKM	Kurangnya jumlah koperasi aktif.
16	Penanaman Modal	Belum optimalnya realisasi nilai investasi di sektor industri
17	Kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian benda, situs dan cagar budaya.
18	Kepemudaan dan Olah Raga	Kurangnya organisasi kepemudaan dan olah raga yang dibina Pemda
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	a. Masih rendahnya jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas
		b. Belum cukupnya prasarana dan sarana pemadam kebakaran



No	Bidang	Permasalahan
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	a. Masih rendahnya PDRB per kapita atas harga berlaku dibandingkan dengan nasional.
		b. Tingginya persentase rumah tangga miskin
21	Ketahanan Pangan	a. Belum tercapainya ketahanan pangan
		b. Belum adanya regulasi ketahanan pangan sebagai pedoman tata laksana keamanan, mutu dan gizi pangan.
22	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam PKK Kabupaten Bandung.
23	Statistik	Kurangnya kelengkapan dokumen statistic
24	Kearsipan	Masih diperlukan peningkatan pengelolaan kearsipan yang lebih efektif dan efisien.
25	Komunikasi dan Informatika	Masih terdapat kawasan yang belum terjangkau jaringan komunikasi.
26	Perpustakaan	a. Kurangnya kuantitas dan kualitas perpustakaan daerah
		b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Bandung

Urusan pilihan, menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Terdapat 8 bidang/sector yang menjadi urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dijabarkan dalam Lampiran.



1. **Pertanian**

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Bandung masih cukup tinggi, yaitu 6,12 ton. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung pada tahun 2010 sebesar Rp 1.602.050,01, hal ini berarti sektor pertanian menyumbang 7.37% atau ketiga terbesar setelah Jasa dan Industri manufaktur terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Kontribusi ini dinilai cukup besar, mengingat kondisi geografi dan masyarakat Kabupaten Bandung sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Pertanian dalam hal ini adalah pertanian dalam arti luas, termasuk pertanian palawja, buah-buahan, sayuran, peternakan dan perkebunan. Potensi pertanian dan tingginya kontribusi pertanian terhadap PDRB masih belum sebanding dengan perbaikan taraf hidup petani.

2. **Kehutanan**

Pada tahun 2009 luas hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bandung mencapai 7.123,74 ha dan telah dilakukan rehabilitasi seluas 19,56%. Total lahan kritis di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 seluas 59.971 ha, namun lahan yang berhasil di rehabilitasi hanya 2.493,12 ha. Pemerintah daerah harus pemeliharaan ketat terhadap kawasan hutan dan penegakan hukum yang tegas terhadap perubahan guna lahan di lahan kritis, terutama di Kawasan Bandung Utara untuk mencegah terjadinya bencana (berupa banjir, kekurangan air, erosi, longsor, dsb) di bagian selatan Kabupaten Bandung. Luasan Hal ini terkait kondisi topografi, iklim dan fungsi kawasan Bandung Utara sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air. Pada tahun 2010, kehutanan memberi kontribusi 0,034% terhadap PDRB Kabupaten Bandung.

3. **Energi dan Sumber Daya Mineral**

Luasan pertambangan tanpa ijin di Kabupaten Bandung dianggap masih cukup besar, yaitu 33,33 Ha. Pertambangan tanpa ijin ini biasanya memberi dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat dan ekonomi suatu daerah. Untuk meminimalisasi dampak negative ini, Pemerintah Kabupaten Bandung harus bertindak tegas pada pihak-pihak yang menambang tambang tanpa ijin. Dengan demikian, lingkungan Kabupaten Bandung dapat terjaga, masyarakat tidak dirugikan serta keberadaan sektro energy dan sektor mineral menambah devisa daerah.

Pada tahun 2010, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Bandung adalah Rp. 282.922,47. Hal ini berarti sektor energi dan sumber daya mineral menyumbang 1,30 % terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Dengan pengelolaan yang lebih baik, kontribusi dari sektor energi dan sumber daya mineral dapat lebih dioptimalkan.

4. **Pariwisata**

Jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Bandung cukup tinggi, dan meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2010, 53 kawasan wisata di Kabupaten Bandung memiliki pengunjung 4.607.330 orang. Bila dirata-ratakan, pengunjung tiap objek wisata adalah 86.930 orang. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mempromosikan objek-objek wisatanya. Pemerintah daerah diharapkan tetap meningkatkan promosi, kondisi lingkungan, kenyamanan dan fasilitas pendukung tiap objek wisatanya agar tetap mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan objek wisata lain di luar Kabupaten Bandung.



5. **Kelautan dan Perikanan**

Kabupaten Bandung tidak memiliki laut, karena kondisi geografisnya yang berada di kawasan pegunungan. Produksi ikan di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 tercatat sebanyak 7.719 ton dan meningkat menjadi 8.122 ton pada tahun 2010. Perikanan di Kabupaten Bandung sebagian besar berupa perikanan darat, karena kondisi geografis wilayah yang sebagian besar berada pada dataran tinggi. Kontribusi perikanan adalah sebesar Rp. 38.226,50, yang berarti sektor perikanan menyumbang 0,178% terhadap PDRB Kabupaten Bandung. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan potensi perikanan darat di Kabupaten Bandung ini, dengan melaksanakan pembinaan terhadap para peternak ikan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas ikan yang dihasilkan.

6. **Perdagangan**

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bandung pada tahun 2009 mencapai Rp 406.188.974,51. Nilai ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2010, menjadi Rp. 456.850.398,5. Nilai ekspor bersih yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai ekspor dikurangi dengan jumlah impor. Nilai ini perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, salah satu caranya adalah dengan peningkatan keanekaragaman, kualitas dan promosi barang-barang yang diekspor. Barang-barang yang diekspor oleh Kabupaten Bandung berupa hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.

7. **Perindustrian**

Sektor industri di Kabupaten Bandung mempunyai kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, terutama industri olahan hasil-hasil pertanian. Ditinjau dari skalanya, industri yang paling banyak berkembang di Kabupaten Bandung adalah industri kecil. Total jumlah industri di Kabupaten Bandung pada tahun 2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Bandung perlu memberi perhatian dan pembinaan terhadap perkembangan industri, terutama industri skala kecil agar dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

8. **Urusan Ketrasmigrasian**

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Bandung pada tahun 2009, hasil capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan transmigrasi adalah peninjauan daerah penerima di 4 (empat) Kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kurubaya dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketrasmigrasian. Pada tahun 2009, telah dilaksanakan pendaftaran dan pembinaan ketrasmigrasian ke desa-desa di Wilayah Kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Pulau Jawa.

Permasalahan pada urusan ketrasmigrasian di Kabupaten Bandung adalah :

1. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Pulau Jawa
2. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan tingkat pendaftaran transmigrasi yang semakin meningkat.

**Tabel 3.2****Permasalahan Kabupaten Bandung Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Daerah**

No	Bidang	Permasalahan
1	Pertanian	Masih rendahnya taraf hidup petani
2	Kehutanan	Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	Masih tingginya luas pertambangan tanpa ijin.
4	Pariwisata	a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas fasilitas pendukung kegiatan pariwisata. b. Masih rendahnya promosi kawasan pariwisata.
5	Kelautan dan Perikanan	a. Masih rendahnya pembinaan terhadap peternak ikan. b. Ancaman penyakit ikan yang dapat mempengaruhi produktivitas perikanan.
6	Perdagangan	a. Masih rendahnya jumlah pusat/sentra perdagangan. b. Belum optimalnya kegiatan promosi terhadap produk-produk yang dihasilkan.
7	Perindustrian	Masih rendahnya pembinaan terhadap industri kecil.
8	Transmigrasi	Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di luar Pulau Jawa.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Bandung, isu dunia internasional serta penelaahan kebijakan pembangunan, nasional dan daerah lain di sekitar Kabupaten Bandung. Isu strategis merupakan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung selama 20 tahun ke depan.

3.2.1 Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Perumusan isu strategis Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat.



Tabel 3.3
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis		
	Dunia Internasional (MDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Jawa Barat)
1	Mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan	Mengurangi jumlah penduduk miskin	Tingginya angka pengangguran dan masalah ketenagakerjaan
2	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	
4	Menurunkan angka kematian bayi	Menurunkan angka kematian bayi	Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian bayi melalui peningkatan kualitas KIA
5	Menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan	Menurunkan angka kematian ibu melahirkan	Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian bayi melalui peningkatan kualitas KIA
6	Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.	Menurunkan angka kesakitan dan kematian.	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat
7	Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan energy	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat
8	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan		Meningkatkan kualitas demokrasi dan peran pemerintah daerah
9		Menurunkan pertumbuhan penduduk	Menekan pertumbuhan penduduk dan persebarannya
10		Pembangunan jatidiri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air.	Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial



No	Isu Strategis		
	Dunia Internasional (MDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Jawa Barat)
11		Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
12		Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana baik kualitas maupun cakupan pelayanan	Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur
13		Pemerataan pembangunan	
14		Mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah	
15		Meningkatkan profesionalisme birokrasi	
16		Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	

3.2.2 Penelaahan RPJP Daerah Lain

Dalam menentukan isu-isu strategis di Kabupaten Bandung perlu diperhatikan pula isu-isu strategis daerah lain. Penelaahan RPJPD daerah lain karena diperlukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan dan adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama (khususnya pada daerah-daerah yang letaknya di daerah perbatasan dua wilayah) serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Tabel 3.4
Identifikasi RPJPD Daerah Lain
(Kabupaten Garut dan Kota Bandung)

No.	Daerah Lain	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Garut	2005 – 2025	Peningkatan pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi Pembangunan kesehatan masyarakat dan peningkatan gaya hidup sehat Peningkatan keahlian dan perlindungan



No.	Daerah Lain	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait
			bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat dan lanjut usia
			Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal
			Peningkatan kualitas tenaga kerja yang lebih profesional dan kredibel
			Mengarahkan kebijakan pasar kerja untuk mendorong terciptanya lapangan kerja
			Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak
			Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang
			Pengembangan IPTEK
			Memperkuat perekonomian domestik yang berdaya saing dan berorientasi regional dan nasional serta menciptakan iklim investasi yang menarik
			Pembangunan sektor pertanian (pengembangan agroindustri dan agribisnis) dan peternakan
			Pengembangan UMKM dan pemberdayaan koperasi
			Pengembangan kepariwisataan
			Pembangunan kehutanan serta perlindungan dan konservasi SDA dan Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan
			Pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah
			Pembiayaan perumahan yang terjangkau
			Pembangunan birokrasi yang profesional serta efektivitas pengawasan aparatur
			Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan
			Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah
			Pembangunan bidang komunikasi dan informasi
2	Kota Bandung	2005 – 2025	Peningkatan kualitas pendidikan
			Penumbuhan ekonomi kreatif kota dan sector ekonomi kreatif dan tradisional
			Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota
			Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur



No.	Daerah Lain	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait
			serta penataan kota
			Peningkatan kualitas kesehatan dan penanganan penyakit
			Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
			Penyediaan pelayanan umum Kota yang prima
			Optimalisasi manajemen pemerintahan kota
			Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

3.2.3 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bandung

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Bandung serta isu-isu strategis jangka panjang internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya maka isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Menurunnya kualitas lingkungan hidup serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan
3. Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta rendahnya kualitas SDM
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong ekonomi lokal
5. Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah
6. Belum meratanya pembangunan serta Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan umum.



Tabel 3.5
Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional dan Kabupaten Bandung

No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional (MDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Jawa Barat)	Kabupaten Bandung
1	Mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan	Mengurangi jumlah penduduk miskin	Tingginya angka pengangguran dan masalah ketenagakerjaan	
2	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Meningkatkan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan	Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta rendahnya kualitas SDM
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak		
4	Menurunkan angka kematian balita	Menurunkan angka kematian balita		
5	Menurunkan angka kematian ibu akibat melahirkan	Menurunkan angka kematian ibu melahirkan		
6	Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.			
7	Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan energy	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara tepat	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesadaran masyarakat	Menurunnya kualitas lingkungan hidup serta rendahnya peran masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan
8	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan		Meningkatkan kualitas demokrasi dan peran pemerintah daerah	
9		Menurunkan pertumbuhan penduduk	Menekan pertumbuhan penduduk dan persebarannya	Tingginya laju pertumbuhan penduduk serta rendahnya kualitas SDM



No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional (MDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Jawa Barat)	Kabupaten Bandung
10		Pembangunan jatidiri bangsa Indonesia seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air.	Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah dan penanganan masalah sosial	
11		Peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong ekonomi lokal
12		Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana baik kualitas maupun cakupan pelayanan	Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	Rendahnya kualitas dan cakupan infrastruktur wilayah
13		Pemerataan pembangunan		Belum meratanya pembangunan serta Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan umum.
14		Mendukung ketahanan pangan di daerah, mendorong sektor produksi serta mendukung pengembangan wilayah		
15		Meningkatkan profesionalisme birokrasi		Perlunya reformasi birokrasi serta profesionalisme aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik



No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional (MDGs)	Kebijakan Nasional (RPJP Nasional)	Regional (RPJP Provinsi Jawa Barat)	Kabupaten Bandung
16		Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang		



BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN BANDUNG

4.1 Perumusan Visi

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni 20 tahun ke depan. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Visi Kabupaten Bandung dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para stakeholders dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Hasil perumusan visi Kabupaten Bandung 2005-2025 adalah:

Tabel 4.1
Perumusan Visi

No	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Repeh	Aman, damai, rukun, setia kawan, gotong royong.	Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kerta Raharja Tahun 2025
2	Rapih	Tertib, teratur, serasi, disiplin, taat hukum, Keterbukaan , lingkungan terlaksana dan terpelihara.	
3	Kerta Raharja	Makmur, sejahtera, maju, mandiri, dan Berdaya Saing	

Tabel 4.2
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"KABUPATEN BANDUNG YANG REPEH RAPIH KERTA RAHARJA"	1. Repeh : Aman, damai, rukun, setia kawan, gotong royong	Keadaan satu kondisi di mana tidak terjadi gangguan terhadap hak seseorang oleh individu, kelompok dan institusi , yaitu



Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
TAHUN 2025"	royong,	diantaranya kejahatan, kerusakan dan regulasi .
	2. Rapih : Tertib, teratur, serasi, disiplin, taat hukum, Keterbukaan, lingkungan terlaksana dan terpelihara.	Suatu keadaan di mana pemimpin, aparaturnya serta masyarakatnya mempunyai sifat soleh, jujur dan amanah. Selain itu juga supremasi hukum dan disiplin ditegakkan, serta adanya keterbukaan informasi . Kondisi lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah, limbah dan polusi, berkurangnya dampak bencana alam, kondisi sumberdaya alam yang asri dan terjaga .
	3. Kerta Raharja : Makmur, sejahtera, maju, mandiri dan Berdaya Saing	Kondisi di mana masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok dan terjangkau harganya. Semua kegiatan usaha berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan gratis untuk keluarga miskin sehingga masyarakat Kabupaten Bandung sehat jasmani dan rohani. Fasilitas perumahan yang tersedia dapat dijangkau dan mudah didapat, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin menjadi program prioritas . Dalam bidang kebudayaan diharapkan Kabupaten Bandung menjadi pusat pengembangan kebudayaan religius dan kebudayaan Sunda .

Terkait visi Kabupaten Bandung Tahun 2025 yaitu: **Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kerta Raharja Tahun 2025**, memiliki peran terhadap **perwujudan** visi Nasional Tahun 2025, yaitu : **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**, serta visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yaitu : **Dengan Iman dan Taqwa, Tahun 2025 Jawa Barat Sehat, Cerdas dan Sejahtera**, sebagai mana tercantum dalam Tabel 4.4.



Tabel 4.3
Keterkaitan Sasaran Visi RPJP Nasional, Sasaran Visi RPJP Provinsi Jawa Barat,
dan Visi Kabupaten Bandung

No	Sasaran Visi RPJP Nasional	Sasaran Visi RPJP Provinsi Jawa Barat	Visi Kab Bandung
1.	Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan Negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri		Repeh
2.	Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang berbasis etika, efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang meningkat	Rapih
3.	Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan		
4.	Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari	Terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan lestari yang ditandai dengan meningkatnya keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengendalian pertumbuhan penduduk, kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan yang efektif, serta meningkatnya keserasian pemanfaatan ruang.	
5.	Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera	Terwujudnya perekonomian yang tangguh berbasis pada potensi daerah dengan peningkatan keterkaitan antarsektor produktif, peningkatan infrastruktur penunjang perekonomian, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan, tersedianya regulasi yang efektif dan peningkatan daya saing dunia	Kerta Raharja
6.	Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan		



No	Sasaran Visi RPJP Nasional	Sasaran Visi RPJP Provinsi Jawa Barat	Visi Kab Bandung
		usaha	
		Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan dan perbaikan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya serta pemerataan pelayanan kesehatan terpadu	
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas yang ditandai oleh peningkatan akses pelayanan pendidikan yang berimbang pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif, cerdas dan berbudi pekerti luhur	
7.	Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.	-	
	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional		

4.2 Perumusan Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (*the chosen track*) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu menyediakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan bagi seluruh *stakeholder*. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan **meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif efisien dan terukur**. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, perlu disusun pendefinisian visi terlebih dahulu menjadi pokok-pokok visi. Pokok-pokok visi disusun dengan memperhatikan stakeholder yang menjadi pelaku **dan** atau terkena dampak pelaksanaan



pembangunan. Tabel 4.5 menjelaskan proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung melalui proses pendefinisian visi menjadi pokok-pokok visi.



Tabel 4.4
Perumusan Misi Pembangunan Kabupaten Bandung

No.	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder Pembangunan			Misi			
			Masyarakat	Pemerintahan Daerah	Pelaku Ekonomi (Dunia Usaha)				
1	Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kerta Raharja Tahun 2025	Repeh dan Rapih	√	Peran serta masyarakat sangat berpengaruh dalam menciptakan kondisi yang aman, damai, tertib dan teratur serta lingkungan yang terlaksana dan terpelihara	√	Pemerintah daerah menyiapkan perangkat atau aturan dalam mewujudkan kondisi Kabupaten Bandung yang kondusif dan berwawasan lingkungan serta terciptanya hubungan yang harmonis dan sinergis	√	Peran serta pelaku ekonomi dibutuhkan untuk mendukung kondisi yang aman, rukun, setia kawan dan gotong royong dalam melakukan kegiatannya dan berdampingan dengan masyarakat sekitar serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan (tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan)	Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib
2							Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
3								Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	
4		Kerta Raharja	√	Dapat berperan serta dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sumber dana non pemerintah	√	Pemerintah daerah menyiapkan perangkat atau aturan serta penyediaan/dukungan sarana dan prasarana	√	Dapat membantu dan bekerjasama dengan pemerintah dengan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan masyarakat (CSR)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia



No.	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder Pembangunan			Misi
			Masyarakat	Pemerintahan Daerah	Pelaku Ekonomi (Dunia Usaha)	
5			Mendukung pemerintah dengan memberikan informasi serta masukan terkait dengan kondisi pembangunan di wilayah masing-masing		Bekerjasama dengan pemerintah dan berkontribusi dalam pembangunan terutama untuk daerah-daerah terpencil	Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
6			Berusaha untuk lebih mandiri dan menciptakan lapangan kerja/usaha dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya lokal		Menciptakan kerjasama dengan pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonominya serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah	Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing



Tabel 4.5
Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Dengan Misi
Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Misi RPJP Nasional	Misi RPJP Provinsi Jawa Barat	Misi RPJP Kabupaten Bandung
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu		2. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	3. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari	4. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional		
6. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional		
7. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	4. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah	5. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing
8. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan	6. Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan



Tabel 4.6
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung

VISI	MISI
KABUPATEN BANDUNG YANG REPEH	Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib
	Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
KABUPATEN BANDUNG YANG RAPIH	Misi 3 : Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan
	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
KABUPATEN BANDUNG YANG KERTA RAHARJA	Misi 5 : Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
	Misi 6 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib

Untuk pelaksanaan pembangunan yang terarah dan dapat mencapai tujuan diperlukan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan serta dapat dirasakan hasil pembangunan. Kondisi keamanan yang kondusif dan ketentraman masyarakat yang terjaga (tidak terjadi kerusuhan) adalah situasi dan kondisi yang diperlukan untuk dilaksanakannya pembangunan tersebut. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh *stakeholders* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, pembangunan diarahkan untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat antara lain dengan mencegah tindak kejahatan, **kerusuhan**, mengurangi tindak kriminalitas, serta menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.

Budaya silih asah, silih asih dan silih asuh, yang merupakan nilai budaya lokal, serta masih adanya budaya paguyuban, dan lembaga-lembaga yang menangani masalah-masalah sosial dan keamanan swakarsa, serta adanya budaya siskamling diharapkan mampu terjaganya kondisi keamanan dan ketentraman di masyarakat Kabupaten Bandung.

Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah mempunyai rasa kegotong-royongan dan toleransi yang tinggi, sifat yang telah tertanam di masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan masih tertanam sampai sekarang. Sifat ini telah banyak memberikan nilai positif bagi pelaksanaan pembangunan. Tetapi akibat dari tingginya arus globalisasi yang membawa dampak negatif antara lain sifat individualistik sehingga mengakibatkan menurunnya sifat kesetiakawanan dan kegotongroyongan yang telah ada serta tertanam di masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk itu salah satu tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya untuk memelihara dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat. Selain itu,



penguatan peran BAZ serta adanya regulasi zakat diharapkan dapat memelihara dan mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kegotongroyongan masyarakat.

Budaya tertib dan disiplin merupakan persyaratan yang penting untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Masih banyaknya pelanggaran hukum dan peraturan kemasyarakatan adalah indikasi bahwa masih rendahnya rasa disiplin dan ketertiban di masyarakat. Keteladanan dari aparat dan tokoh masyarakat adalah sesuatu yang perlu dikembangkan dalam **penegakkan hukum dan aturan yang berlaku**. Untuk waktu jangka panjang diharapkan rasa tertib dan budaya disiplin dapat melekat dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang aman, tertib, tentram dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

Hukum merupakan aturan yang mengatur segala aspek kemasyarakatan agar kehidupan manusia berjalan dengan baik dan tidak saling **mengganggu hak individu, kelompok tertentu dan institusi**. Misi ini diarahkan melalui penguatan instansi dan badan penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. **Selain itu inspektorat daerah sebagai instansi pengawasan pemerintah harus lebih difungsikan.**

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang bersifat konstruktif antara tiga domain utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang memiliki karakteristik efisien, efektif, partisipatif berlandaskan hukum, adil demokratis, **keterbukaan**, responsif, berorientasi **konsensus**, kesetaraan, akuntabel dan memiliki visi strategik.

Misi kedua didasarkan atas kondisi objektif bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparat pemerintah kepada masyarakat belum optimal **sehingga menyebabkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah** .

Misi 3 : Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat di mana kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga lingkungan memerlukan perhatian terutama untuk pembangunan jangka panjang dimana dampak dan akibat pembangunan terakumulasi. **Konsekuensi** logis dari dilaksanakannya pembangunan adalah penggunaan segala sumber daya termasuk sumber daya alam dan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pembangunan. Tetapi pelaksanaan pembangunan tidak harus mengesampingkan dan mengorbankan kondisi lingkungan. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang akan tetap terjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan keberlangsungan pembangunan dan masih dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan yang bersih, bebas dari segala polusi, **sampah dan limbah** yang menurunkan kondisi, kualitas dan daya dukung lingkungan, melakukan mitigasi bencana alam yang mungkin terjadi, menjaga kondisi dan keasrian sumber daya **alam** yang sangat penting bagi masyarakat luas.

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan religius diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan **dan daya beli**, yang merupakan **tiga** indikator



dalam IPM. Namun dalam kaitan dengan misi Kabupaten Bandung bukan sekedar peningkatan IPM saja, tetapi juga menciptakan SDM handal yang religius dicerminkan dari ketaatan terhadap ajaran agama, bermoral, beretika, dan berperilaku baik yang harus menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung. Hal ini, diharapkan menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas kehidupan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Dengan adanya tambahan religius, maka SDM yang handal tersebut akan memberikan manfaat bagi dirinya, orang lain, (keluarga dan masyarakat) serta kehidupan sosial melalui berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap upaya pembangunan wilayah.

Misi 5 : Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang bersifat holistik (menyeluruh). Ada tiga aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu **kesatuan** utuh yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan kesejahteraan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang semu, artinya ada kesenjangan di tengah masyarakat.

Misi kelima merupakan penjabaran dari visi Kerta Raharja yang memfokuskan pada pertumbuhan wilayah di mana masyarakat mempunyai kesamaan terhadap semua aksesibilitas yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada wilayah yang secara geografis diuntungkan oleh kedekatannya dengan pusat pertumbuhan nasional (Kota Bandung) tetapi juga pada wilayah-wilayah tertinggal, **kawasan-kawasan pembangunan yang strategis, pengembangan wilayah pesisir.**

Misi 6 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing

Kabupaten Bandung memiliki potensi di bidang pertanian, pariwisata maupun industri dan bila seluruh potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan serta **menumbuhkembangkan** perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber daya lokal melalui **lembaga ekonomi produktif (Koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional), pemanfaatan potensi lokal wilayah perdesaan (OVOP), dan optimalisasi pemberdayaan** masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi keenam ini merupakan penjabaran dari visi Kerta Raharja yang memfokuskan pada pengembangan agribisnis, industri manufaktur, pariwisata, **jasa**, perdagangan, investasi daerah, pengurangan pengangguran penduduk, pengurangan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Dari fokus tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan kompetitif dan komparatif dengan berbasis pada potensi lokal.



BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BANDUNG

5.1. Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Repeh, Rapih, Kertaraharja 2025”

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan tujuan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai 20 tahun mendatang. Tujuan pokok dijabarkan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, dan sasaran pokok merupakan langkah yang hendak dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran, disusunlah indikator pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang.

Tabel 5.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2025

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Jangka Panjang	Sasaran Pokok
1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib	Terciptanya rasa aman, tenang dan damai	1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bandung
		1.2 Terjalinnnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong di masyarakat Kabupaten Bandung
		1.3 Terwujudnya Kepastian Hukum dan Politik
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima	2.1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima serta Mengikuti Dinamika Pelayanan Aparatur Pemerintahan yang Transparan.
		2.2 Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean goverment</i>



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Jangka Panjang	Sasaran Pokok
		2.3 Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi .
3. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan yang bersih dan bebas sampah, limbah dan polusi	3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		3.2 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan (<i>Sustainable Resources Management</i>).
		3.3 Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
		3.4 Terwujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas dan kemandirian masyarakat	4.1 Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan
		4.2 Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa
		4.3 Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.4 Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan
		4.5 Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga
5. Menciptakan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan	5.1 Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan
		5.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan hierarki dan kebutuhan masyarakat.
		5.3 Terwujudnya pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan strategis dan pengembangan wilayah pesisir



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Jangka Panjang	Sasaran Pokok
6. Meningkatnya Perekonomian yang Berdaya Saing	Meningkatnya kapasitas dan kualitas perekonomian daerah	6.1 Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis potensi lokal
		6.2 Tercapainya produk pertanian yang berdaya saing
		6.3 Terwujudnya Ketahanan pangan
		6.4 Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing
		6.5 Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi
		6.6 Terlaksananya pembangunan Pusat - Pusat Perdagangan
		6.7 Terwujudnya lembaga ekonomi produktif (koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syaria'ah maupun konvensional) yang mandiri dan maju

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, sasaran pokok disusun pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya. Tahap berikutnya adalah perumusan indikator kinerja yang menjelaskan target pencapaian sasaran pokok dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Perumusan indikator kinerja RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005 – 2025 dijelaskan pada Tabel 5.2.



Tabel 5.2
Perumusan Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
1. Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Aman dan Tertib	1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkurangnya angka kejahatan/ kriminalitas. ➤ Berkurangnya kerusuhan/huru-hara di lingkungan masyarakat. ➤ Berkurangnya gangguan terhadap hak individu, kelompok masyarakat dan institusi. ➤ Meningkatnya daya dukung, sarana dan kualitas pembinaan dan pelayanan aparat pelindung masyarakat (linmas).
	1.2 Terjalannya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong di masyarakat Kabupaten Bandung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mematuhi norma budaya dan kearifan lokal, yaitu <i>silih asah, silih asih dan silih asuh</i>. ➤ Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Bandung. ➤ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
	1.3 Terwujudnya Kepastian Hukum dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kualitas dan pelaksanaan produk-produk hukum yang dihasilkan. ➤ Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam menjunjung tinggi peraturan/hukum yang berlaku ➤ Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum . ➤ Meningkatnya kesempatan masyarakat untuk berorganisasi dan berpolitik.



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
<p>2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p>	<p>2.1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima serta Mengikuti Dinamika Pelayanan Aparatur Pemerintahan yang Transparan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) yang mengedepankan minim struktur kaya fungsi ➤ Terciptanya keseimbangan formasi antara jabatan struktural dan fungsional di setiap SOPD. ➤ Terciptanya sistem karir yang berbasis pada kompetensi, kinerja, profesionalisme dan kehandalan. ➤ Terciptanya akuntabilitas aparatur pemerintah daerah melalui penerapan sistem <i>reward and punishment</i> (penghargaan dan hukuman). ➤ Terwujudnya sistem kepegawaian yang mengarah pada profesionalitas pengelolaan pemerintahan ➤ Meningkatnya akses masyarakat kepada dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. ➤ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Kabupaten Bandung.



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
	2.2 Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas publik sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. ➤ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah. ➤ Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
	2.3 Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. ➤ Meningkatnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi
3. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan	3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkurangnya luas lahan kritis. ➤ Menurunnya tingkat bahaya erosi (TBE). ➤ Menurunnya laju sedimentasi di daerah tangkapan air. ➤ Meningkatnya kesuburan tanah. ➤ Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
	<p>3.2 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan (<i>Sustainable Resources Management</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya penambangan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang. ➤ Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan. ➤ Berkurangnya kegiatan penambangan tanpa izin.
	<p>3.3 Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau. ➤ Kualitas kawasan permukiman meningkat (ketersediaan fasilitas umum dan sosial yang sesuai dengan ketentuan/standar yang ada) ➤ Berkurangnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang ➤ Berkurangnya perubahan guna lahan terutama pada kawasan lindung.



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
	3.5 Terwujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berkurangnya tingkat pencemaran ➤ Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengolahan sampah/limbah terpadu ➤ Termanfaatkannya sampah/limbah sebagai sumber pendapatan
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	4.1 Meningkatnya kualitas iman dan taqwa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya pembinaan rohani bagi pemerintahan dan masyarakat. ➤ Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. ➤ Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa.
	4.2 Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya wajar dikdas. ➤ Berkurangnya masyarakat keluarga miskin yang tidak memperoleh hak pendidikan wajar dikdas ➤ Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah tertinggal
	4.3 Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Angka melek huruf. berkurang ➤ Angka putus sekolah berkurang. ➤ Kualitas dan kuantitas sarana pendidikan meningkat. ➤ Kualitas dan kuantitas guru meningkat.



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
	4.4 Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya angka kesakitan. ➤ Menurunnya penyakit menular ➤ Menurunnya AKI dan AKB ➤ Meningkatnya pembinaan dan pendidikan pola hidup sehat bagi masyarakat ➤ Meningkatnya akses terhadap sarana kesehatan lingkungan
	4.5 Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan ➤ Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau secara geografis maupun biaya ➤ Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana keagamaan sesuai peraturan yang berlaku ➤ Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga yang terpadu
5. Menciptakan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	5.1 Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
	5.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan hierarki dan kebutuhan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya sarana dan prasarana publik di setiap WP yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan penduduk. ➤ Meningkatnya peran dan fungsi wilayah sesuai dengan arahan RTRW.



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
	5.3 Terwujudnya pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, kawasan-kawasan strategis dan pengembangan wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan-kawasan strategis ➤ Meningkatkan aksesibilitas terwujudnya kawasan pesisir
6. Meningkatnya Perekonomian yang Berdaya Saing	6.1 Terwujudnya perkembangan industri dan UMKM berbasis potensi lokal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal oleh sebagian besar industri unggulan ➤ Meningkatnya penggunaan tenaga kerja lokal untuk bekerja di industri lokal. ➤ Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi dan UMKM yang sehat. ➤ Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan fasilitasi akses permodalan. ➤ Pengembangan kemitraan usaha hulu hilir secara terintegrasi
	6.2 Terwujudnya Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤
	6.3 Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan pariwisata di Kabupaten Bandung. ➤ Meningkatnya pengelolaan daerah tujuan wisata. ➤ Meningkatnya keanekaragaman objek wisata. ➤ Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Bandung ➤ Meningkatnya pola kerja sama, kemitraan dan promosi wisata daerah. ➤ Terciptanya wisata desa yang berbudaya sunda, religius dan berwawasan lingkungan ➤ Meningkatnya pendapatan masyarakat setempat dan daerah ➤ Terwujudnya wisata pesisir



Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator Pencapaian
	6.4 Terlaksananya pembangunan Pusat - Pusat Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang informal (PKL) ➤ Meningkatnya Pemasaran hasil produk unggulan lokal di kawasan objek wisata. ➤ Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan. ➤ Meningkatnya fasilitas yang mendukung pemasaran produk unggulan ➤ Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan ➤ Meningkatnya ketersediaan pasar tradisional yang ramah lingkungan
	6.6 Meningkatnya pertumbuhan investasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi para pelaku UMKM. ➤ Meningkatnya pelayanan pemerintah berupa perizinan satu pintu. ➤ Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti. ➤ Meningkatnya infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi secara kuantitas dan kualitas.
	6.7 Terwujudnya lembaga ekonomi produktif (koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional) yang mandiri dan maju	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya jumlah koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional



5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah per lima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka mencapai Kabupaten Bandung yang regeh, rapih dan kerta raharja. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan pengadaaan dana. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pentahapan pembangunan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 tahun. Dengan demikian dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, terdapat 4 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah.



Tabel 5.3

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Dalam RPJP Kabupaten Bandung Dengan RPJP Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Dalam RPJP Jawa Barat

Prioritas Pembangunan			
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
2005 - 2010	2010 – 2015	2015 – 2020	2020 - 2025
1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai	Memantapkan penataan Indonesia dalam segala bidang, dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian).	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis			
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia			



Prioritas Pembangunan Dalam RPJP Jawa Barat

Prioritas Pembangunan			
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang akan diraih terutama melalui upaya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Jawa Barat.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi.	Mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional.
2. Pengembangan Struktur Perekonomian Regional yang Tangguh, hal ini diperlukan untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Jawa Barat agar memiliki kemandirian, kemampuan, dan daya saing dalam menghadapi persaingan global serta mengentaskan masyarakat miskin.			



Prioritas Pembangunan			
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
3. Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan aspek politik, hukum dan HAM			
4. Peningkatan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan, terutama untuk mengendalikan keseimbangan daya dukung lingkungan dengan jumlah dan persebaran penduduk dalam satu kesatuan ruang, serta upaya meningkatkan mitigasi bencana alam.			
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial yang Berlandaskan Agama dan Budaya Daerah, yang harus menjadi landasan pembangunan di Jawa Barat, baik dalam pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik dan hukum maupun pengelolaan lingkungan dan tata ruang.			



Prioritas Pembangunan Dalam RPJP Kabupaten Bandung

Prioritas Pembangunan			
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
Pembangunan di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan infrastruktur dan suprastruktur	Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur dan Suprastruktur dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang	Peningkatan kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing	Pemantapan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera yang didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas



Penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan proses pendefinisian visi dan misi menjadi tahapan dan prioritas pembangunan per lima tahun selama 20 (dua puluh) tahun untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah agar lebih terarah ke pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini juga merupakan pedoman untuk menyusun RPJM Daerah serta dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam proses penentuan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, terlebih dahulu akan dilakukan identifikasi tujuan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang merupakan penurunan dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Pengidentifikasian tujuan dan sasaran pokok dilaksanakan untuk menentukan kondisi target yang ingin dicapai per tahapan pembangunan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kondisi target tersebut. Arah kebijakan pada hakekatnya merupakan sasaran pokok terkait masalah yang dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Tabel 5.4

Tahapan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung 2005 – 2025

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
1	1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bandung	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<p>1. Belum optimalnya daya dukung penciptaan kondisi aman, tentram dan damai</p> <p>2. Belum optimalnya pola pembinaan dan koordinasi /kerjasama dengan lembaga keamanan terhadap SDM</p> <p>3. Belum utuhnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.</p>	<p>1. Meningkatkan rasio Linmas dibandingkan dengan jumlah penduduk.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas anggota Linmas.</p> <p>3. Menganangkan pelaksanaan kerjasama pengamanan lingkungan antara masyarakat, pemerintah dengan aparat keamanan.</p>	<p>1. Menciptakan kondisi keamanan, ketertiban dilingkungan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.</p> <p>3. Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.</p>	<p>1. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.</p> <p>2. Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.</p>	<p>1. Memantapkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.</p> <p>2. Mempertahankan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.</p> <p>3. Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.</p>	<p>1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat.</p> <p>2. Meningkatnya kerja sama dengan lembaga keamanan</p> <p>3. Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.</p>

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
	1.2 Terjalinnnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong di masyarakat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Mulai lunturnya budaya gotong royong dan kesetiakawanan sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran gotong royong di masyarakat. 2. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan social, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. 2. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan social, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan rasa kesetiakawanan sosial dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. 2. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan social, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan rasa kesetiakawanan sosial dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. 2. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan social, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. 	Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial, kepedulian dalam masyarakat serta budaya gotong royong di masyarakat.
	1.3 Terwujudnya Kepastian Hukum dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Belum utuhnya pemahaman masyarakat tentang HAM, hak dan kewajiban warga Negara, demokrasi, toleransi, keterbukaan dan kekeluargaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan penurunan angka tindakan pidana ringan (Tipiring). 2. Meningkatkan konsistensi penegakan hukum. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. 4. Meningkatkan kesetaraan masyarakat di mata hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar perda, melalui penguatan jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi mendukung tegaknya Perda. 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar perda, melalui penguatan jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi mendukung keterlibatan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya 2. Memantapkan kepedulian dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar perda, melalui penguatan jajaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan aparat penegak hukum demi mendukung kepastian hukum dan politik. 2. Mewujudkan kepastian hukum dan politik. 3. Memantapkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendidikan politik dan HAM hingga tingkat Desa dan Kelurahan. 2. Meningkatnya kualitas kehidupan politik yang demokratis. 3. Meningkatnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					sekitarnya. 3. Meningkatkan Keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dengan melibatkan masyarakat melalui ruang-ruang publik 4. Menciptakan kondisi kehidupan polotik yang demokratis	keterlibatan masyarakat dalam berperilaku dan berbudaya tertib serta taat terhadap peraturan daerah yang berlaku. 4. Menciptakan kondisi kehidupan polotik yang demokratis	berperilaku dan berbudaya tertib serta taat terhadap peraturan daerah yang berlaku. 4. Menciptakan kondisi kehidupan polotik yang demokratis	
2	2.1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian	Belum optimalnya pelayanan publik terhadap masyarakat	1. Menyelenggarakan persiapan PPTSP secara <i>online</i> . 2. Membangun UPTD Terpadu (secara bertahap) 3. Memperbaiki sistem pelayanan publik/perijinan ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian.	1. Meningkatkan sistem pelayanan publik/perijinan ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya. 2. Mewujudkan pengembangan <i>outlet-outlet</i> pelayanan publik yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik/perijinan. 2. Memantapkan pelayanan publik yang prima.	1. Mempertahankan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan	Tersedianya pelayanan publik yang prima.

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
	2.2 Meningkatnya sinergitas pemerintahan dalam upaya mewujudkan <i>good governance. dan clean government</i>	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sesuai penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas. 2. Belum efektif dan efisiennya sistem organsasi dan tata kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 2. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 3. Meningkatkan kualitas para aparat pemerintahan 4. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja. 5. Meningkatkan disiplin pegawai. 6. Mengimplementasikan sisdur <i>reward & punishment</i> pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 2. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 3. Meningkatkan kualitas para aparat pemerintahan 4. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja. 5. Meningkatkan disiplin pegawai. 6. Meningkatkan pelaksanaan sisdur <i>reward & punishment</i> pegawai. 7. Mempermudah akses masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 2. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 3. Meningkatkan kualitas para aparat pemerintahan 4. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja. 5. Meningkatkan disiplin pegawai. 6. Mewujudkan penyempurnaan satuan organisasi pemerintah daerah (SOPD) ke arah organisasi yang efektif dan efisien. 7. Mewujudkan sistem kepegawaian yang professional. 8. Memantapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 2. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 3. Meningkatkan kualitas para aparat pemerintahan 4. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja. 5. Mengimplementasikan sisdur <i>reward & punishment</i> pegawai. 6. Mewujudkan <i>good governance</i> dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Bandung 7. Mewujudkan perencanaan partisipatif dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian penempatan pegawai dengan kompetisi pendidikan dan pola karir yang jelas. 2. Meningkatnya kapasitas organisasi dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam kinerja birokrasi yang ramping struktur. 3. Terciptanya sistem birokrasi yang efektif dan efisien.

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
						kompetensi, kinerja, serta kehandalan aparaturnya yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan 9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.		
	2.3 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Rendahnya peran masyarakat dalam pesta demokrasi.	Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terkait proses pemilihan umum.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum.	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum.	Mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan umum.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pesta demokrasi.
3	3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	1. Masih tingginya tingkat pencemaran dari samapah, limbah dan polusi 2. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanggulangan	1. Melaksanakan penanganan terhadap lahan kritis, pencemaran lingkungan 2. Menetapkan regulasi agar tidak terjadi penambahan	1. Menerapkan regulasi agar tidak terjadi penambahan luas lahan dan kritis 2. Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami	1. Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku	Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan dengan mengupayakan peningkatan penanganan lahan kritis dan lahannya potensial kritis di beberapa wilayah	1. Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis. 2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (banjir,

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			bencana (banjir, gerakan tanah, letusan gunung api dan gempa.	luas lahan kritis. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lahan kritis.	kondisi rawan bencana. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lahan kritis. 4. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana 5. Membentuk Badan penanggulangan bencana daerah	kepentingan dan lintas sektor. 2. Memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan perbaikan lahan kritis secara mandiri. 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana 4. Optimalisasi fungsi BPBD		gerakan tanah, letusan gunung api dan gempa)
	3.2 Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan (<i>Sustainable Resources Management</i>).	Lingkungan Hidup; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral	1. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya kelembagaan dan sistem penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan 2. Memantapkan kepranataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 3. Mengoptimalkan penggunaan	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan 2. Meningkatkan sistem informasi dan sumber daya lingkungan. 3. Optimalisasi penggunaan teknologi ramah lingkungan	1. Memperkuat kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung. 2. Mengontrol sistem penegakan hukum dan pemerintahan (terkait pengelolaan	1. Memantapkan daya dukung lingkungan dalam pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan. 2. Mendorong perilaku dan budaya ramah	1. Meningkatnya daya dukung lingkungan dan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. 2. Memperkuatnya sistem penegakan hukum dan

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			<p>hidup.</p> <p>3. Kerusakan hutan dan lahan kritis</p> <p>4. Masih terdapatnya pertambangan mineral dan air tanah yang belum berizin.</p> <p>5. Masih belum teridentifikasinya potensi bahan galian mineral.</p> <p>6. Masih kurangnya jumlah SDM dibidang pertambangan</p> <p>7. Masih kurangnya data, kondisi, potensi dan kebencanaan geologi.</p> <p>8. Masih kurangnya upaya konservasi air tanah dan reklamasi penggalian bahan mineral.</p> <p>9. Masih adanya kerusakan yang diakibatkan oleh</p>	<p>teknologi ramah lingkungan</p> <p>4. Memperkuat kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung.</p> <p>5. Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan (terkait pengelolaan lingkungan hidup) yang baik secara adil dan konsistensi.</p> <p>6. Mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis</p> <p>7. Peningkatan sistem penegakan hukum dibidang pertambangan.</p> <p>8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola bidang</p>	<p>4. Memperkuat kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola sumber daya air dan kawasan lindung.</p> <p>5. Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik secara adil dan konsistensi.</p> <p>6. Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (terkait pengelolaan lingkungan hidup) secara adil dan konsistensi.</p> <p>7. Meningkatkan daya dukung lingkungan serta pengendalian tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan.</p> <p>8. Meningkatkan peran serta</p>	<p>lingkungan hidup) yang baik secara adil dan konsistensi.</p> <p>3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.</p> <p>4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam.</p> <p>5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>6. Meningkatkan upaya pemulihan kualitas lingkungan.</p> <p>7. Mengurangi resiko bencana yang diakibatkan perubahan iklim.</p> <p>8. Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana.</p> <p>9. Mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis</p> <p>10. Mengembangkan usaha ekonomi</p>	<p>lingkungan</p> <p>3. Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (terkait pengelolaan lingkungan hidup).</p> <p>4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.</p> <p>5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup</p> <p>6. Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana.</p> <p>7. Mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis</p> <p>8. Meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi bidang</p>	<p>pemerintahan yang baik.</p> <p>3. Terpeliharanya hutan lestari dan menurunnya luas lahan kritis</p> <p>4. Meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi bidang pertambangan mineral, air tanah dan kegeologian.</p> <p>5. Berkurangnya jumlah kerugian yang diakibatkan kebencanaan geologi.</p> <p>6. optimalnya pemanfaatan energi non fosil</p>

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			kebencanaan geologi. 10. Belum optimalnya pemanfaatan energi non fosil	pertambangan. 9. Peningkatan potensi di bidang pertambangan mineral dan air tanah melalui teknologi ramah lingkungan. 10. Meningkatkan upaya konservasi terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mineral dan air tanah. 11. Meningkatkan potensi di bidang kegiologian. 12. Meningkatkan sistem penanganan kebencanaan geologi. 13. Meningkatkan pemanfaatan energi: panas bumi, mikrohidro, biogas, surya, dan bahan bakar nabati	masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. 9. Mengurangi kerusakan hutan dan lahan kritis 10. Menganalkan usaha ekonomi produktif (pertanian dan perkebunan) dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan 11. Inisiasi pengintegrasian objek hutan ke dalam jaringan ekonomi produktif (pariwisata) 12. Meningkatkan supaya penegakkan hukum di bidang pertambangan mineral dan air tanah. 13. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola bidang	produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan 11. Menguatkan upaya penegakan hukum di bidang pertambangan mineral dan air tanah. 12. Meningkatkan pemanfaatan energi: panas bumi, mikrohidro, biogas, surya, dan bahan bakar nabati	pertambangan mineral, air tanah dan kegeologian. 9. Berkurangnya jumlah kerugian yang diakibatkan kebencanaan geologi. 10. Meningkatkan pemanfaatan energi: panas bumi, mikrohidro, biogas, surya, dan bahan bakar nabati	

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					<p>pertambangan.</p> <p>14. Optimalisasi potensi di bidang pertambangan mineral dan air tanah.</p> <p>15. Meningkatkan upaya konservasi lingkungan</p> <p>16. Optimalisasi potensi di bidang kegeologian.</p> <p>17. Meningkatkan potensi dan penanganan kebencanaan geologi.</p> <p>18. Meningkatkan pemanfaatan energi: panas bumi, mikrohidro, biogas, surya, dan bahan bakar nabati</p>			
	3.3 Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.	Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersusunnya data spasial yang lengkap untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan . 2. Belum tersusunnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana tata ruang wilayah. 2. Menyusun rencana pembangunan. 3. Meningkatkan ketersediaan data spasial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan data spasial. 2. Sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan data spasial. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang 3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang 4. Meningkatkan pengendalian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan data spasial. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang 3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang 4. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan data spasial untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan. 2. Meningkatnya jumlah dokumen rencana pembangunan yang telah dilegalisasi.

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			<p>dokumen rencana pembangunan yang telah dilegalisasi.</p> <p>3. Belum optimalnya sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang.</p> <p>4. Belum tersedianya Perda RDTR</p>		<p>4. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang</p> <p>5. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tataruang Disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya</p>	<p>pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tataruang</p> <p>6. Sosialisai pemanfatan dan pengendalian ruang</p>	<p>pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan terpadu.</p> <p>5. Sosialisai pemanfatan dan pengendalian ruang</p>	<p>3. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang.</p>
	3.4 Terwujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu	Lingkungan Hidup	<p>1. Masih tingginya tingkat pencemaran sampah, limbah dan polusi</p> <p>2. Belum terkelolanya penanganan sampah, limbah dan</p>	<i>Renstra DINAS (LH dan Dispertasih)</i>	<p>1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan</p> <p>2. Penerapan Teknologi tepat</p>	<p>1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan</p> <p>2. Peningkatan Penerapan Teknologi tepat</p>	<p>1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan</p> <p>2. Peningkatan Penerapan Teknologi tepat</p>	<p>Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih sehat dan nyaman Terkelolanya sampah, limbah dan polusi</p>

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			polusi		<p>guna untuk pengolahan sampah dan limbah</p> <p>3. Rintisan pembentukan lembaga pengelolaan sampah dan limbah</p> <p>4. Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan</p>	<p>guna untuk pengolahan sampah dan limbah</p> <p>3. Terbentuknya lembaga pengelolaan sampah dan limbah</p> <p>4. Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan</p>	<p>guna untuk pengolahan sampah dan limbah dan sehingga menghasilkan nilai tambah dari sisi ekonomi</p> <p>3. Terbentuknya lembaga pengelolaan sampah dan limbah</p> <p>4. Peningkatan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan sesuai dengan kebutuhan</p>	

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
4	4.1 Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya angka pastiripasi murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Belum optimalnya pendidikan anak usia dini. Belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin Masih lemahnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pendidikan. Belum terimplementasinya Perda Dinniyah 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan wajardikdas 9 tahun. Mencanangkan pendidikan anak usia dini Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan Mencanangkan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar Mencanangkan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar Meningkatkan mutu pendidikan dan tenanga pendidik 	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan wajar dikdas 9 Tahun Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Mencanangkan wajar dikdas 12 Tahun Mengembangkan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar Mengembangkan sekolah berbasis internasional. Mengembangkan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar Meningkatkan beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi Melibatkan peran pihak swasta dalam bidang pendidikan Optimalisasi Implementasi dari Perda dan Perbup Dinniyah Meningkatkan kesempatan 	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan wajar dikdas 12 Tahun Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas Meningkatkan kualitas SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar Meningkatkan kualitas sekolah berbasis internasional Meningkatkan kualitas perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar Meningkatkan program beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi Meningkatkan peran pihak swasta dalam bidang pendidikan Optimalisasi Implementasi dari Perda dan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan wajar dikdas 12 Tahun Mempertahankan kualitas pendidikan anak usia dini Mempertahankan kualitas SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar Mempertahankan kualitas sekolah berbasis internasional Mempertahankan kualitas perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar Meningkatkan pelaksanaan program beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi. Meningkatkan peran pihak swasta dalam 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya APM pada setiap jenjang pendidikan. Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini. Meratanya kesempatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Meningkatnya sekolah-sekolah kejuruan yang berorientasi pasar, berbasis potensi wilayah dan <i>life skills</i> yang memiliki daya saing internasional. Terimplementasinya Perda dan Perbub Dinniyah

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					pendidikan bagi masyarakat miskin	Perbup Dinnyah 9. Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin	bidang pendidikan 8. Optimalisasi Implementasi dari Perda dan Perbup Dinnyah 9. Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin	
	4.2 Meningkatnya kualitas budaya, iman dan taqwa	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai budaya Sunda. Perlunya peningkatan jati diri masyarakat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif. 	<ol style="list-style-type: none"> Mencanangkan pembangunan fasilitas seni dan budaya. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya sunda. Menanamkan toleransi dan sikap saling menghargai antar umat beragama sejak di Sekolah Dasar 	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan bahasa dan budaya Sunda serta kearifan lokal sejak Sekolah Dasar. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan peninggalan budaya lokal. Meningkatkan penanaman toleransi dan sikap saling menghargai 	<ol style="list-style-type: none"> Melestarikan budaya dan aset-aset bersejarah. Meningkatkan pengelolaan dan revitalisasi kawasan bersejarah di Kabupaten Bandung untuk menjaga kelestariannya. Mencanangkan program promosi budaya dan bangunan bersejarah pada tingkat nasional Mengadakan lomba-lomba budaya Sunda 	<ol style="list-style-type: none"> Mencanangkan program budaya dan bangunan bersejarah pada tingkat internasional. Mempertahankan kualitas aset-aset kekayaan budaya. Meningkatkan pelaksanaan lomba-lomba budaya Sunda yang bersifat nasional dalam 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas cagar budaya dan aset-aset kekayaan budaya Meningkatnya promosi, inovasi dan kreativitas pengembangan seni dan budaya.

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					<p>antar umat beragama sejak di Sekolah Dasar</p> <p>4. Meningkatkan rasa cinta terhadap seni dan budaya tradisional Sunda semenjak usia sekolah.</p> <p>5. Menganangkan musyawarah pada tingkat desa untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama.</p> <p>6. Memperkenalkan bahasa dan budaya Sunda dan budaya religius serta kearifan lokal sejak Sekolah Dasar.</p> <p>7. Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman</p>	<p>yang bersifat lokal dalam rangka pelestarian budaya.</p> <p>5. Mendorong inovasi dan kreativitas pengembangan seni dan budaya.</p> <p>6. Meningkatkan forum-forum diskusi yang melibatkan masyarakat lintas budaya dan agama dalam rangka mempererat kerukunan di masyarakat Kabupaten Bandung.</p> <p>7. Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa</p> <p>8. Memperkenalkan bahasa dan budaya Sunda dan budaya religius serta kearifan lokal sejak Sekolah Dasar.</p> <p>9. Terbangunnya Islamik Center sebagai salah pusat pengembangan</p>	<p>rangka pelestarian dan promosi budaya.</p> <p>4. Meningkatkan inovasi dan kreativitas pengembangan seni dan budaya.</p> <p>5. Mempertahankan forum-forum diskusi yang melibatkan masyarakat lintas budaya dan agama dalam rangka mempererat kerukunan.</p> <p>6. Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa</p> <p>7. Memperkenalkan bahasa dan budaya Sunda dan budaya religius serta kearifan lokal sejak Sekolah</p>	

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					8. dan taqwa Membuat Rintisa Islamik Center sebagai salah pusat pengembangan n budaya religius islami	budaya religius islami	8. Dasar. Terbangunnya Islamik Center sebagai salah pusat pengembangan budaya religius islami	
	4.3 Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan	Pendidikan	1. Masih rendahnya mutu pendidikan masyarakat. 2. Masih rendahnya daya saing masyarakat di bidang pendidikan dan keahlian lainnya.	RENSTRA DINAS DISDIK	1. Mewujudkan masyarakat yang mampu membaca dan menulis 2. Menanamkan Program Gemar Membaca Bagi anak usia sekolah 3. Meningkatkan kualitas guru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 4. Meningkatkan ketertarikan siswa/I SMP/MTs untuk melanjutkan sekolah ke SMK	1. Mendorong peningkatan ketertarikan masyarakat lulusan SMA/MA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan daerah dan perpustakaan berjalan hingga ke tingkat desa. 3. Meningkatkan keberadaan institusi pendidikan formal dan nonformal terkait pertanian	1. Mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil dalam.	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. 2. Meningkatnya daya saing masyarakat Kabupaten Bandung terhadap masyarakat di luar Kabupaten Bandung.

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja	dan pengembangan teknologi untuk industri 4. Menciptakan ketertarikan masyarakat untuk mengerti bahasa asing dan penggunaan teknologi 5. Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pendidikan/organisasi non formal.		
	4. 4 Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan	Kesehatan	1. Masih terbatasnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 3. Belum optimalnya, penyuluhan dan pendidikan hidup masyarakat	1. Mewujudkan pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan terhadap masyarakat miskin. 2. Melaksanakan Pelayanan kesehatan di puskesmas secara gratis melalui jaminan pelayanan kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hidup sehat 2. Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi tentang lingkungan dan budaya hidup yang sehat kepada masyarakat. 3. Meningkatkan penyuluhan tentang gizi dan program imunisasi	1. Meningkatkan kualitas tenaga-tenaga di bidang pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil dan kesehatan bayi. 3. Meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia. 4. Meningkatkan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di	1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian terhadap pelayanan kesehatan dan kesadaran akan gizi dan pola hidup sehat. 2. Meningkatkan informasi layanan kesehatan hingga tingkat desa 3. Mempertahankan fasilitas pendukung	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 2. Memadainya jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan. 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 4. Optimalnya, penyuluhan dan

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
				program bidan/dokter masuk desa hingga ke desa-desa.	<p>kepada bayi yang baru lahir</p> <p>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan hingga menjangkau desa-desa.</p> <p>5. Menyediakan fasilitas pendukung bagi tenaga medis di daerah.</p>	daerah.	bagi tenaga medis di daerah	pendidikan pola hidup bagi masyarakat
	4.5 Tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan kesehatan	Kesehatan , olahraga	1. Masih minimnya fasilitas pendukung untuk meningkatkan sarana prasarana kesehatan dan olahraga	<i>Renstra DINAS kesehatan dan</i>	<p>1. Mewujudkan sarana prasarana sebagai daya dukung kesehatan</p> <p>2. Rintisan penyelenggaraan even olahraga prestasi</p> <p>3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas atlet berprestasi</p> <p>4. Menyediakan fasilitas sarana</p>	<p>1. Mewujudkan sarana prasarana sebagai daya dukung kesehatan</p> <p>2. Rintisan penyelenggaraan even olahraga prestasi</p> <p>3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas atlet berprestasi</p> <p>4. Menyediakan fasilitas sarana untuk olahraga</p>	<p>1. Mewujudkan sarana prasarana sebagai daya dukung kesehatan</p> <p>2. Rintisan penyelenggaraa n even olahraga prestasi</p> <p>3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas atlet berprestasi</p> <p>4. Menyediakan fasilitas sarana</p>	Tersedianya fasilitas pendukung untuk meningkatkan sarana prasarana kesehatan dan olahraga

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					untuk olahraga masyarakat umum	masyarakat umum	untuk olahraga masyarakat umum	
5	5.1 Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> Masih kurang tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Masih kurangnya transparansi dalam proses pembangunan 	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Terciptanya transparansi dalam proses pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Terciptanya transparansi dalam proses pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Terciptanya transparansi dalam proses pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Terciptanya transparansi dalam proses pembangunan
	5.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan hierarki dan kebutuhan masyarakat.	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> Belum memadainya aksesibilitas, mobilitas, kemantapan dan kapasitas infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kondisijalan dan jembatan Meningkatnya bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Meningkatnya bangunan turap/talud/bronjong secara bertahap pada daerah rawan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan Meningkatnya bangunan turap/talud/bronjong secara bertahap pada daerah rawan longsor dan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan kualitas jalan dan jembatan Mempertahankan bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana Merpertahankan 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas, mobilitas, kemantapan dan kapasitas infrastruktur

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
				<p>sistem jaringan drainase pada daerah rawan banjir dan mengurangi genangan air</p> <p>4. Meningkatkan kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan (penerangan jalan umum)</p> <p>5. Meningkatkan trotoarisasi dan saluran tertutup</p> <p>6. Rintisan kajian peningkatan dan pemantapan status jalan</p>	<p>longsor dan bencana</p> <p>3. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjirdan mengurangi daerah genangan air pada kawasan perkotaan dan pemukiman</p> <p>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan (penerangan jalan umum)</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan</p>	<p>3. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjirdan mengurangi daerah genangan air pada kawasan perkotaan dan pemukiman</p> <p>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan (penerangan jalan umum)</p> <p>5. Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan</p>	<p>sistem jaringan drainase pada daerah rawan banjirdan mengurangi daerah genangan air pada kawasan perkotaan dan pemukiman</p> <p>4. Mempertahankan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan (penerangan jalan umum)</p> <p>5. Mempertahankan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada</p>	
	5.3 Terwujudnya pembangunan wilayah-		1. Belumnya maksimalnya pembangunan	1. Percepatan terhadap pembangunan di daerah	1. Percepatan terhadap pembangunan di daerah	1. Percepatan dan penataan terhadap pembangunan di	1. Terwujudnya peralihan daerah tertinggal	1. Maksimalnya pembangunan pada daerah

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
	wilayah tertinggal, kawasan-kawasan strategis dan pengembangan wilayah pesisir		<p>an pada daerah tertinggal</p> <p>2. Belum optimalnya pembangunan di kawasan strategis</p>	<p>tertinggal</p> <p>2. Percepatan terhadap pembangunan kawasan strategis</p> <p>3. Rintisan Kajian wilayah pesisir</p>	<p>tertinggal</p> <p>2. Percepatan terhadap pembangunan kawasan strategis</p> <p>3. Kajian wilayah pesisir</p>	<p>daerah tertinggal</p> <p>2. Percepatan dan penataan terhadap pembangunan kawasan strategis</p> <p>3. Kajian wilayah pesisir</p>	<p>menjadi daerah maju dan mandiri</p> <p>2. Terwujudnya pembangunan kawasan strategis</p> <p>3. Kajian wilayah pesisir</p>	<p>tertinggal</p> <p>2. optimalnya pembangunan di kawasan strategis</p>
6.	6.1 Terwujudnya perkembangan industri dan KUKM berbasis potensi lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Koperasi dan UMKM - Penanaman Modal - Perdagangan 	<p>1. Masih rendahnya manajemen dan kualitas produk UMKM.</p> <p>2. Masih rendahnya penggunaan teknologi ramah lingkungan di UMKM.</p> <p>3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap informasi pasar dan permodalan.</p>	<p>1. Meningkatkan jumlah industri manufaktur.</p> <p>2. Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan industri manufaktur berbasis potensi lokal</p> <p>3. Meningkatkan teknologi industri manufaktur</p>	<p>1. Mengelompokkan dan mengembangkan kawasan menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif.</p> <p>2. Menyiapkan infrastruktur, berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung kegiatan jasa perdagangan.</p> <p>3. Menetapkan AMDAL bagi kawasan yang akan dikembangkan menjadi UMKM,</p>	<p>1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal untuk terlibat di dalam kegiatan jasa perdagangan.</p> <p>2. Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran, dan kemudahan untuk mengakses permodalan</p> <p>3. Meningkatkan kualitas infrastruktur</p>	<p>1. Menguatkan (dari segi ekonomi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan) UMKM dan industri kreatif agar lebih mandiri dan berdaya saing.</p> <p>2. Meningkatkan promosi hasil-hasil UMKM dan industri kreatif pada tingkat internasional.</p>	<p>1. Terserapnya produk UMKM di pasar regional, nasional bahkan internasional</p> <p>2. Meningkatnya kualitas produk UMKM.</p> <p>3. Meningkatkan akses UMKM terhadap informasi pusat dan mengakses permodalan</p>

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					<p>industri kreatif serta pusat perdagangan.</p> <p>4. Meningkatkan kondisi iklim investasi yang menarik dan memudahkan bagi investor baik dalam maupun luar negeri.</p> <p>5. Menganangkan kerja sama antara daerah produsen dengan pasar-pasar yang menjadi target penjualan hasil-hasil industri.</p>	<p>dan fasilitas pendukung kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jasa perdagangan, dari skala kabupaten menjadi skala regional (antar kabupaten)</p> <p>5. Mendorong peningkatan investasi terhadap UMKM dan industri kreatif.</p> <p>6. Meningkatkan - promosi hasil-hasil UMKM dan industri kreatif pada tingkat nasional.</p>		
	6.2 Tercapainya produk pertanian yang berdaya saing	Pertanian; Kelautan dan perikanan	<p>1. Belum optimalnya penggunaan teknologi pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan</p> <p>2. Belum terwujudnya kawasan agropolitan 'one village</p>	<p>1. Revitalisasi Kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dalam aglomerasi ekonomi</p> <p>2. Menganangkan intensifikasi pertanian, perkebunan, peternakan,</p>	<p>1. Menumbuhkembangkan sistem manajemen terpadu antar komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan wilayah sentra produksi</p> <p>2. Mengelola dan melaksanakan</p>	<p>1. Mendorong terbentuknya klaster industri-industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan yang ramah lingkungan.</p> <p>2. Mendorong terbentuknya industri-industri pengolahan hasil</p>	<p>1. Mendorong pengembangan industri pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan n di sektor hilir</p> <p>2. Mendorong terciptanya linkage (keterkaitan) antara daerah produsen (penghasil bahan</p>	<p>1. Terwujudnya kawasan agropolitan 'one village one product' berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang mandiri, berteknologi</p>

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			<p>one product' berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang mandiri, berteknologi dan berdaya saing.</p> <p>3. Masih rendahnya promosi terhadap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan pada tingkat internasional.</p>	<p>Perikanan)</p> <p>3. Pencanangan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan</p> <p>4. Mencanangkan program 'one village one product' dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan.</p>	<p>intensifikasi lahan pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan</p> <p>3. Mendorong masyarakat untuk terlibat pada sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan</p> <p>4. Meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam rangka peningkatan kualitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan</p> <p>5. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan industri pengolahan.</p> <p>6. Mewujudkan</p>	<p>pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan yang teraglomerasi dan ramah lingkungan.</p> <p>3. Mencanangkan kerja sama antara petani dengan industri pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan serta antara sektor industri dengan pasar-pasar yang dianggap potensial</p> <p>4. Mendorong penggunaan teknologi pada industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan</p> <p>5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan penggunaan teknologi agar dapat terlibat dalam industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan,</p>	<p>baku dengan daerah aglomerasi industri pengolahan) serta daerah distribusi (pasar).</p> <p>3. Meningkatkan promosi terhadap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian pada tingkat internasional</p> <p>4. Memantapkan kawasan agropolitan 'one village one product' yang berbasis potensi</p> <p>5. Memantapkan program 'one village one product' dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan.</p> <p>6. Meningkatkan</p>	<p>dan berdaya saing.</p> <p>2. Meningkatnya promosi terhadap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian pada tingkat internasional.</p>

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
					<p>program 'one village one product' dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan</p> <p>7. Menganangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pengembangan agribisnis kepewilayahan</p>	<p>Perikanan.</p> <p>6. Meningkatkan program 'one village one product' dalam rangka mendukung kegiatan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan.</p> <p>7. Meningkatkan promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian di tingkat nasional melalui pencitraan produk pertanian lokal.</p> <p>8. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi pada pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan, pengembangan agribisnis, dan informasi pasar</p>	<p>promosi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Perikanan dan hasil industri pengolahan pertanian di tingkat internasional</p>	

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
	6.3 Terwujudnya Ketahanan pangan	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya rumah tangga miskin yang belum terpenuhi pangan pokok Masih rendahnya kemandirian produksi bahan pangan Masih rendahnya pengawasan mutu dan keamanan pangan dan gizi Masih rendahnya konsumsi pangan non beras Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin Pengembangan Desa Mandiri Pangan Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Meningkatkan mutu dan Keamanan Pangan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin Pengembangan Desa Mandiri Pangan Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Meningkatkan mutu dan Keamanan Pangan Daerah Pengembangan sistem distribusi pangan yang efektif 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin Pengembangan Desa Mandiri Pangan Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Meningkatkan mutu dan Keamanan Pangan Daerah Penguatan sistem distribusi pangan yang efektif 	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin Pengembangan Desa Mandiri Pangan Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Meningkatkan mutu dan Keamanan Pangan Daerah Penguatan sistem distribusi pangan yang efektif 	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok bagi rumah tangga miskin Meningkatnya jumlah desa mandiri pangan Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan dan gizi Meningkatnya konsumsi diversifikasi pangan Meningkatnya kualitas dan ketersediaan pangan Pemerataan dalam ketahanan pangan
	6.4 Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya fasilitas pelayanan di sektor pariwisata Belum optimalnya promosi 	<ol style="list-style-type: none"> 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan pariwisata Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengelola dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung daerah pariwisata yang telah ada saat ini. Meningkatkan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan potensi kawasan pariwisata agar lebih menarik bagi para wisatawan. Meningkatkan kelengkapan infrastruktur dan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya fasilitas pelayanan di kawasan pariwisata. Meningkatnya promosi pariwisata nusantara di

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			<p>pariwisata di dalam dan luar negeri</p> <p>3. Belum tergalinya potensi wisata lainnya</p> <p>4. Masih belum regulasi yang berkenaan dengan pengembangan wisata daerah</p> <p>5. Belum optimalnya pendapatan dari sektor pariwisata</p>		<p>investasi usaha pariwisata.</p> <p>4. Meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisata</p> <p>5. Meningkatkan jumlah dan keragaman daerah tujuan wisata</p> <p>6. Rintisan regulasi pariwisata</p>	<p>kualitas lingkungan hidup dan revitalisasi kawasan-kawasan budaya yang merupakan objek wisata.</p> <p>3. Melibatkan masyarakat dalam industri pariwisata (sebagai penyedia jasa dan fasilitas pendukung kegiatan wisata)</p> <p>4. Meningkatkan promosi hasil-hasil pertanian dan industri pengolahan sebagai ciri khas objek wisata.</p> <p>5. Meningkatkan promosi daerah wisata dan potensinya pada tingkat nasional.</p> <p>6. Terwujudnya penataan kawasan pariwisata daerah</p>	<p>fasilitas pendukung kegiatan wisata.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas/pengetahuan masyarakat tentang industri pariwisata dan kegiatan bangkitannya.</p> <p>4.</p>	<p>dalam dan di luar negeri</p> <p>3. Tergalinya potensi wisata lainnya</p> <p>4. Terseedianya regulasi yang berkenaan dengan pengembangan wisata daerah</p> <p>5. Optimalnya pendapatan dari sektor pariwisata</p>
	6.5 Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan	Penanaman Modal	<p>1. Belum kondusifnya iklim investasi.</p> <p>2. Belum memadainya sarana dan</p>	<p>1. Mengadakan promosi pada skala nasional dan internasional terhadap sektor-sektor yang</p>	<p>1. Mendorong terciptanya hubungan yang baik dan saling percaya antara pemerintah dan</p>	<p>1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi investor.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas lembaga</p>	<p>1. Mempertahankan kondisi iklim investasi yang kondusif bagi investor</p> <p>2. Memelihara</p>	<p>1. Terciptanya iklim yang kondusif bagi investor</p> <p>2. Meningkatnya kualitas sarana</p>

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
	investasi		prasarana pendukung kegiatan investasi. 3.	potensial dan menguntungkan untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung. 2. Mendorong terciptanya lembaga-lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. 3.	masyarakat terhadap investor, serta antara investor terhadap pemerintah dan masyarakat. 2. Menerapkan sistem insentif bagi para investor yang hendak berinvestasi di Kabupaten Bandung. 3. Memeratakan informasi dan kemudahan akses mencari investor dan mencari sektor yang potensial berkembang serta membutuhkan investasi. 4. Pengembangan kegiatan pariwisata	pendukung investasi yang aman, terpercaya dan memudahkan proses investasi. 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi. 4.	sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi. 3. Meningkatkan dan memantapkan kondisi pariwisata daerah	dan prasarana pendukung kegiatan investasi. 3. Meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
	6.6 Terlaksananya pembangunan Pusat - Pusat Perdagangan	Perdagangan	Masih terbatasnya sarana dan parasarana pusat-pusat perdagangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencanangkan jumlah sentra industri manufaktur. 2. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah sentra industri manufaktur. 2. Meningkatkan pemeliharaan yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merintis alternatif jenis industri dan pembinaan sentra-sentra industri kecil. 2. Mementapkan pemeliharaan yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan alternatif jenis industri dan pembinaan sentra-sentra industri kecil. 2. Mementapkan pemeliharaan yang mendukung pengembangan pusat-pusat perdagangan produk lokal. 	Meningkatnya ketersediaan sarana dan parasarana pusat-pusat perdagangan yang berkualitas.
	6.7 Terwujudnya lembaga ekonomi produktif (koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola syariah maupun konvensional) yang mandiri dan maju	Kop dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih minimnya pengembangan lembaga ekonomi produktif pedesaan 2. Belum optimalnya pembinaan terhadap lembaga ekonomi 3. Belum optimalnya peran aktif lembaga ekonomi 	Liat Renstra DINAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah akses pembentukan lembaga ekonomi produktif 2. Meningkatkan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga ekonomi produktif 3. Meningkatkan jumlah lembaga 	Meningkatkan jumlah dan memantapkan lembaga ekonomi produktif Me	Meningkatkan jumlah dan memantapkan lembaga ekonomi produktif yang profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi produktif pedesaan 2. Optimalnya pembinaan terhadap lembaga ekonomi 3. Optimalnya peran aktif lembaga ekonomi masyarakat dalam dunia

No	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan kebijakan				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2005-2010	2010-2015	2015-2020	2020-2025	
			masyarakat dalam dunia usaha		ekonomi produktif			usaha



BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
2. RPJP Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten, RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, anatr waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) di Kabupaten Bandung berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi, dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung dengan didukung oleh Instansi Vertikal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, serta masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tahun 2005 – 2025;
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bandung untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan;
5. Dalam pelaksanaannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
6. Hasil pelaksanaan pengawasan intern oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan



menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bandung.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bandung, tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintah daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bandung. Untuk itu RPJPD Kabupaten Bandung 2005-2025 ini perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

LAMPIRAN

PROYEKSI INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 - 2025

Tabel L.1
Proyeksi Indikator Kinerja Makro Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahapan RPJPD			
		2010*	2015	2020	2025
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	74,24	76,27	79,3	82,27
	a. Indeks Kesehatan	74.00	75.74	76.99	77.89
	- Angka Harapan Hidup (tahun)	69,40	70,44	71,19	71,73
	b. Indeks Pendidikan	85,65	86,42	87,32	88,03
	- Angka Melek Huruf (%)	98,41	98,77	99,37	99,9
	- Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,02	9,26	9,48	9,64
	c. Indeks Daya Beli	63,07	66,66	73,6	80,9
2	Jumlah Penduduk	3.215.548	3.479.581	3.972.925	4.550.335
3	LPP (%)	2,56	2,65	2,71	2,78
4	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	635.763 (5,89%)	686.266 (5,88%)	778.680 (5,86%)	883.538 (5,84%)
5	KETENAGAKERJAAN (Jumlah dan Persentase pengangguran)	130.451	140.897	160.347	183.002

Tabel L.2
Proyeksi Indikator Kinerja Perekonomian Daerah

No	Indikator Kinerja	Tahapan RPJPD			
		2010*	2015	2020	2025
1	Konsumsi Rata-rata RT per Kapita Sebulan	393.327	569.502	745.676	921.851
2	LPE (%)	5,88	5,67	5,75	4,74
3	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	14.519,53	18.421,49	26.318,12	34.578,17
4	Investasi (Milyar Rupiah)	3.401.003.149	6.900.998.,571	11.412.775.779	15.924.552.988
5	Laju Investasi (%)	7,17	8,87	8,31	5,50

Tabel L.3
Proyeksi Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB Atas Harga Konstan

No	Indikator Kinerja	Tahapan RPJPD			
		2010*	2015	2020	2025
1	Pertanian	7,53	8,16	9,19	10,75
2	Pertambangan dan Bahan Galian	1,26	1,20	1,21	1,34
3	Industri Pengolahan	59,60	58,07	54,93	50,78
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,61	1,48	1,25	1,1
5	Bangunan (Konstruksi)	1,66	1,72	1,81	1,63
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,91	18,09	20,32	22,17
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,19	3,83	3,39	3,15
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/	1,95	1,80	1,54	1,41
9	Jasa-jasa	5,28	5,66	6,35	7,67

Catatan :

1. Angka proyeksi tahun 2011-2015, 2016-2020, 2021-2025 merupakan angka rata-rata.
2. Dengan asumsi tingkat inflasi rata-rata sebagai berikut :
 - Tahun 2011=2015 sebesar 5,83 persen
 - Tahun 2016-2020 sebesar 4,92 persen
 - Tahun 2021-2025 sebesar 4,00